SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR : 26 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung (Lebar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 31);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembnagunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembar Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat;

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, peogran SKPD, lintas SKPD, Program kewilayahan dan lintas wilayah, disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif; Renstra SKPD adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
5. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun;
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
9. Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD;

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2020 merupakan penjabaran dari RPJMD;

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
b. prioritas pembangunan daerah; dan
c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) berpedoman kepada RKP Tahun 2020, Program Strategis Nasional, RPJMD, dan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;

Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 menjadi dasar penyusunan KUA, PPAS, dan RAPBD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020;

Pasal 4

(1) RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. Bab I : Pendahuluan
b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
c. Bab III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
d. Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
e. Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
f. Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
g. Bab VII : Penutup;

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB II

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sesuai ketentuan perundang-undangan;

BAB III

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 2 Juli 2019

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 3 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2019
NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur; S.Sos., M.IP
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAEARAH
(RKPD) TAHUN 2020

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
2019

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAEARAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk disusun setiap tahunnya. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, RKPD dimaksud memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.

RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2020 merupakan penjabaran tahun kedua dari RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat periode tahun 2017-2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat. Sebagai dokumen perencanaan, RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat :

1. secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan OPD penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);

3. secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja OPD; dan
4. secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD Kabupaten Tulang Bawang barat dilakukan melalui serangkaian tahapan dan tata cara yang antara lain meliputi: (a) Penyusunan rancangan awal RKPD, (b) Penyusunan rancangan RKPD, (c) Pelaksanaan musrenbang, (d) Perumusan rancangan akhir, serta (d) Penetapan.

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD untuk menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setelah rancangan awal RKPD dibuat, tahap selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD Kabupaten dengan rancangan Renja OPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja OPD serta untuk mengharmoniskan dan menyinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

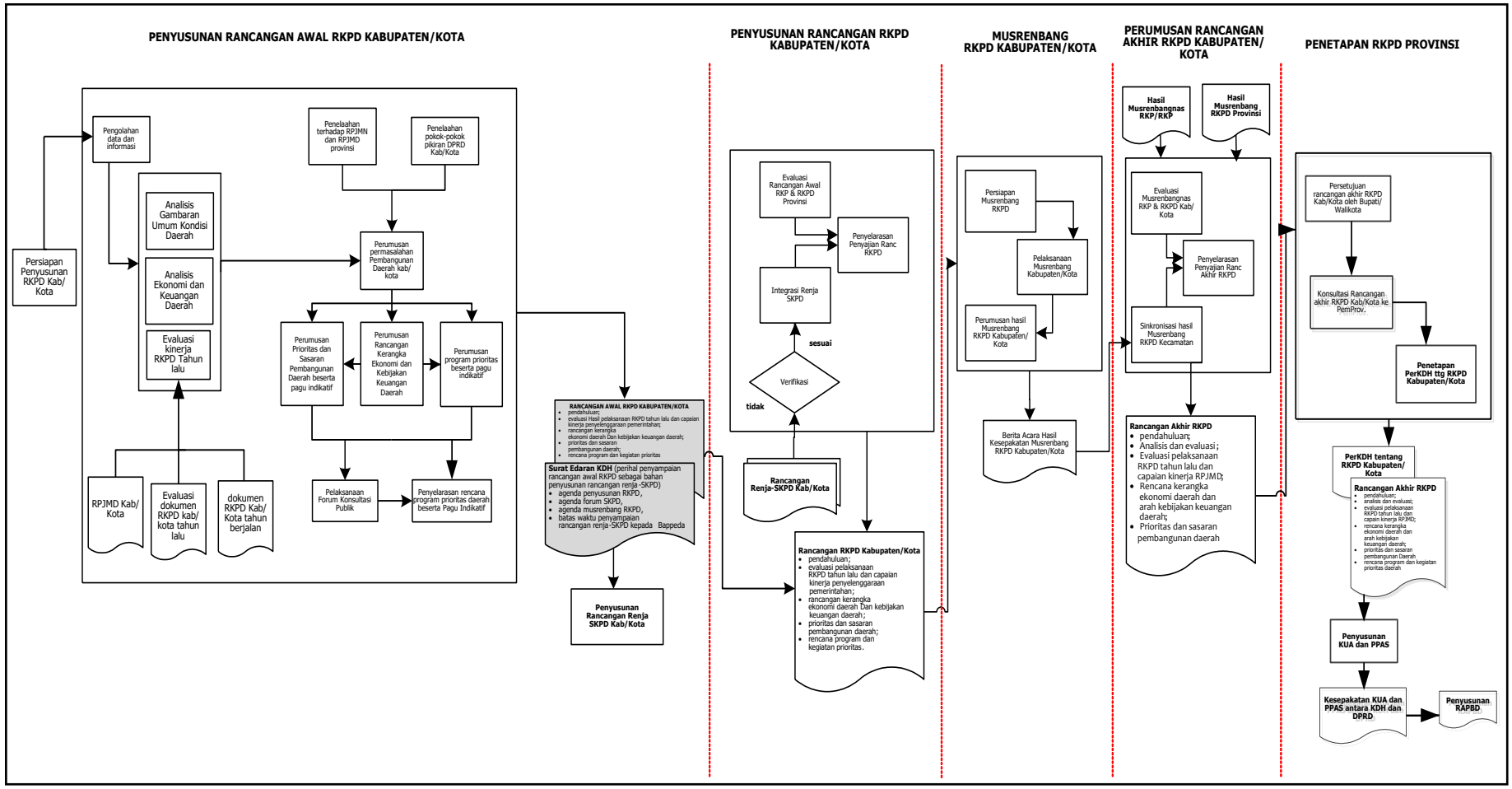
Langkah selanjutnya adalah evaluasi Rancangan Awal RKPD, dimana tahapan ini merupakan bagian dari proses identifikasi kebijakan nasional dan Provinsi yang digunakan untuk melengkapi analisis dan evaluasi yang telah dilakukan pada tahap penyusunan rancangan awal, khususnya identifikasi kebijakan nasional untuk tahun rencana. Suatu kebijakan menjadi relevan bagi suatu daerah dikarenakan beberapa karakteristik:

1. Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah) atau khusus pada daerah tertentu.
2. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah merupakan tujuan dari kebijakan tersebut.
3. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud.

Kemudian tahap selanjutnya adalah Verifikasi dan Integrasi Program dan Kegiatan Prioritas, dengan tujuan pokok adalah menyangkut kesamaan materi antara program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sama dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas tiap-tiap OPD, termasuk informasi tentang indikator kinerja, selain itu juga memastikan agar program dan kegiatan prioritas telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan Renja OPD pada OPD terkait.

Proses perumusan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahap penyusunan R-APBD, yakni sebagai pedoman dalam penyusunan KUA serta PPAS, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), RKPD Provinsi Lampung, RPJMD Tulang Bawang Barat 2017 – 2022, RPJP Kabupaten Tulang Bawang Barat, RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat, RPJMD Provinsi Lampung 2014 – 2019, serta RPJMN 2014-2019. Untuk lebih jelas prosesnya dapat dilihat sebagaimana gambar bagan dibawah ini :

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten/kota



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung (Lebar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembar Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 11);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

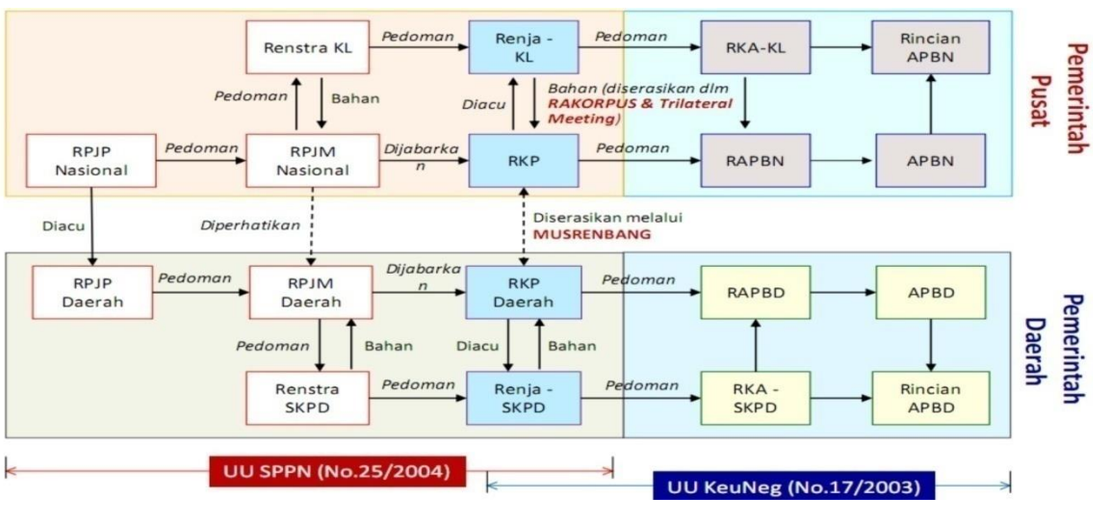
RKPD memiliki hubungan yang saling terikat dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun Provinsi Lampung. Di tingkat nasional, dokumen perencanaan pembangunan terdiri dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dengan periode 20 (dua puluh) tahun, dijabarkan menjadi Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan periode 5 (lima) tahun, dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan periode selama 1 (satu) tahun.

Pada tingkat Provinsi Lampung, dokumen perencanaan pembangunan terdiri dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan periode 20 (dua puluh) tahun, dijabarkan menjadi Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode 5 (lima) tahun dan dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan periode 1 (satu) tahun.

Untuk Kabupaten Tulang Bawang Barat, dokumen perencanaan pembangunan dijabarkan dari dokumen RPJPD dengan periode selama 20 (dua puluh) tahun, yang dijabarkan menjadi Rencana pembangunan RPJMD dengan periode selama 5 (lima) tahun dimana untuk tahun 2020 merupakan pelaksanaan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Tulang Bawang Barat 2017-2022.

Hubungan yang saling terikat antar dokumen tersebut dapat dijelaskan seperti gambar di bawah ini:

Gambar 1. 2 Keterkaitan RKPD Kabupaten dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun KUA serta PPAS, yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan R-APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2020. RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat diuraikan lebih terfokus setiap OPD pada dokumen Renja OPD. Dokumen Renja OPD menjadi acuan RKA OPD sebagai input penyusunan R-APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat. Uraian tersebut menunjukkan bahwa penyusunan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan sebagian dari sistem perencanaan yang harus sinergis dengan rencana pembangunan nasional dan Provinsi Lampung.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 disusun dengan maksud untuk :

a. mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan daerah.
b. mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.
c. mengidentifikasikan kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas pembangunan.
d. memberikan arah dan menyatukan tujuan kegiatan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat dan OPD dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat di tahun 2020.

1.4.2. Tujuan

RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 disusun dengan tujuan untuk :

a. sebagai acuan bagi Daerah dalam menyusun KUA dan PPAS, yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan RAPBD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2020.
b. sebagai pedoman bagi OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam penyempurnaan Renja-OPD Tahun 2020.
c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan (*planning*), penganggaran (*budgeting*), pelaksanaan (*executing*), serta pengendalian dan evaluasi (*monitoring and evaluating*) pembangunan yang terukur.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahu rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra OPD, Renja OPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Berisi uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang bersekala nasional, maupun lokal.

1.3. Hubugan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya.

Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti : RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah.

1.5. Sistemmatika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusun dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Berisi tentang penjelasan dan penyajian secara logis dasar – dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi :

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD.

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu serta realisasi RPJMD.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan perioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang

berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi perangkat daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

2.3.2. *Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.*

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber – sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP Nasional, RKPD Provinsi dan juga kebijakan bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Kabupaten.

3.2. Arah kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Berisi tentang perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan vivi / misi dan tujuan / sasaran pembangunan yang diambil dari dokumen RPJPD Kabupaten dan RKPD Provinsi.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Berisi gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan arah pembangunan pada RPJPD Kabupaten.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan RKPD tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berisi penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi indikator kinerja utama (IKU) maupun indikator kinerja kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Dalam pembuatan kebijakan terdapat beberapa tahapan yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan yang sebelumnya menjadi salah satu poin penting untuk membenahi dan merencanakan kebijakan yang baru. RKPD merupakan kebijakan program kegiatan daerah yang berkelanjutan tiap tahunnya sehingga hasil evaluasi realisasi tahun sebelumnya menjadi landasan yang penting. Tercapainya sasaran RKPD tahun sebelumnya yang belum tercapai menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan untuk menyempurnakan kebijakan yang baru.

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang digunakan sebagai dasar acuan perencanaan pembangunan daerah meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

A. Aspek Geografi (Karakteristik Wilayah)

1) Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara geografis wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat terletak di antara $104^{0}55^{I}$ - $105^{0}10^{I}$ Bujur Timur dan $04^{0}10^{I}$ - $04^{0}42^{I}$ Lintang Selatan serta di bagian paling utara Provinsi Lampung.

Luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah 120.175 ha atau 1.201km^2 atau sekitar 3,39% dari luas wilayah Provinsi Lampung yang seluas 35.376,50 km^2. Secara administratif, Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri atas 9 (sembilan) wilayah kecamatan dan 93 (sembilan puluh tiga) tiyuh dan 3 (tiga) kelurahan, dengan kecamatan yang memiliki wilayah paling luas adalah Kecamatan Tulang Bawang Tengah (274.930 ha), sedangkan

untuk wilayah yang paling kecil adalah Kecamatan Way Kenanga (76.480 ha).

Kecamatan dengan tiyuh terbanyak sebelum adanya pemekaran kecamatan adalah Kecamatan Gunung Terang yaitu berjumlah 20 tiyuh, sedangkan setelah adanya pemekaran kecamatan maka untuk kecamatan dengan jumlah tiyuh terbanyak adalah Kecamatan Tulang Bawang Tengah dengan berjumlah 19 tiyuh dan untuk kecamatan paling sedikit jumlah tiyuhnya adalah Kecamatan Pagar Dewa yang memiliki 6 Tiyuh, untuk pembagian wilayah administrasi Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kab.Tulang Bawang Barat

S	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah
1.	Tulang Bawang Tengah	19	274,93 Km^2
2.	Tumijajar	10	133,22 Km^2
3.	Tulang Bawang Udik	9	237,35 Km^2
4.	Gunung Terang	20	141,91 Km^2
5.	Batu Putih		
6.	Gunung Agung	13	127,64 Km^2
7.	Way Kenanga	9	76,48 Km^2
8.	Lambu Kibang	10	109,82 Km^2
9.	Pagar Dewa	6	99,65 Km^2
Jumlah		**96**	**1.201 Km^2**

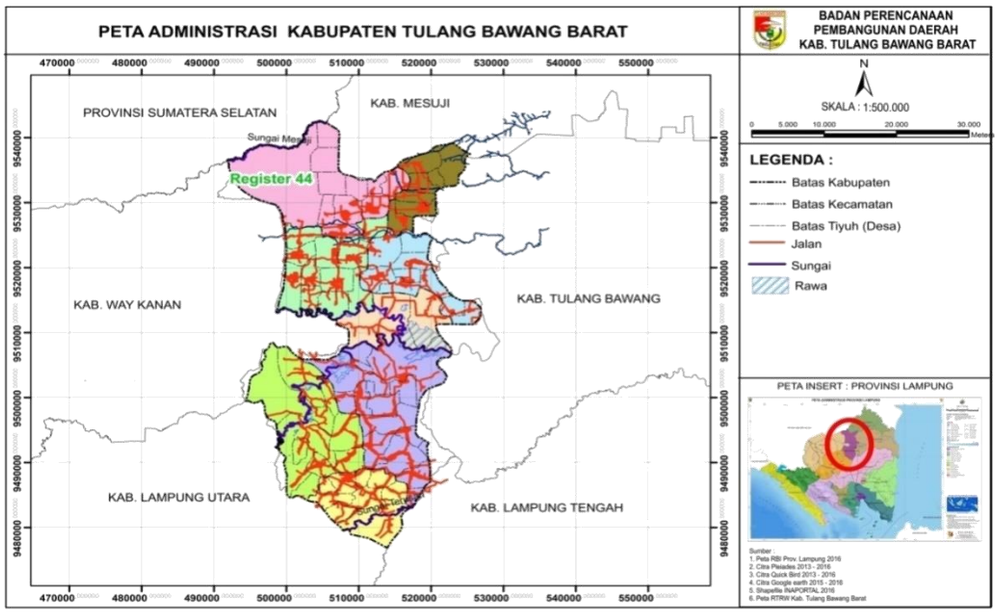
Sumber : BPS Kabupaten Tulang Bawang Barat 2018

Secara administratif batas daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah:

a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mesuji dan Provinsi Sumatera Selatan;
b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara;
c. sebelah timur berbatasan denganKabupaten Tulang Bawang;
d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan;

Peta batas administrasi wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat seperti ditunjukkan pada Gambar 2.1.

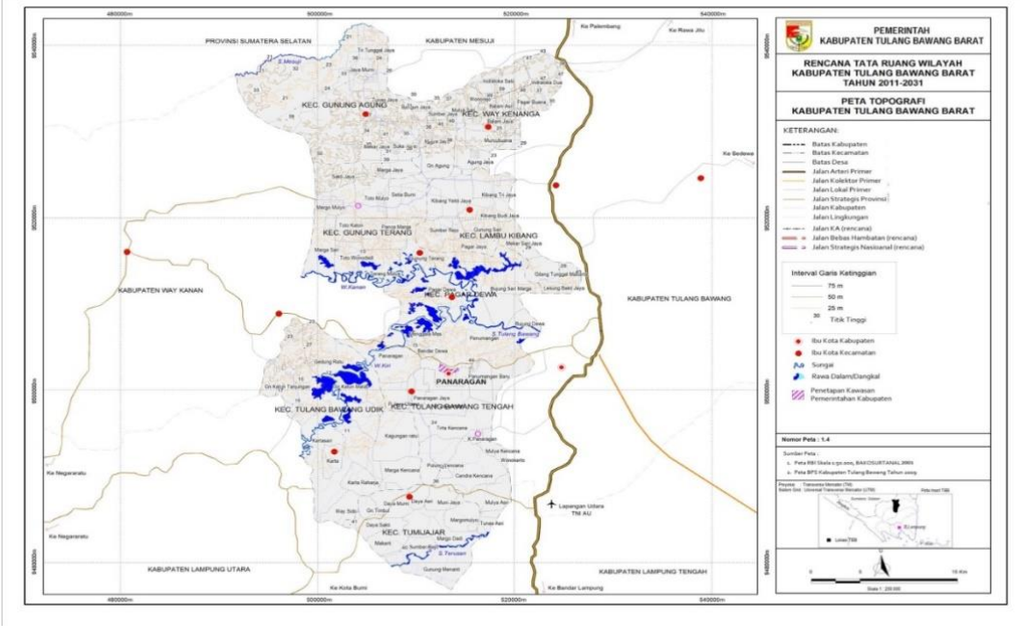
Gambar 2.1
Peta Batas Administrasi Kabupaten Tulang Bawang Barat



2) Topografi

Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan daerah yang datar dengan ketinggian wilayah antara 13 - 68 Mdpl, dan dialiri sebanyak 15 sungai yang panjang keseluruhan mencapai 406,07 Km dengan daerah aliran sepanjang 12,24 Km^2. Di bagian Utara Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalir sungai besar yaitu Sungai Muara dua yang merupakan bagian hulu dari Way Mesuji.

Gambar 2.2
Peta Topografi Kabupaten Tulang Bawang Barat



3) Geologi

Keadaan geologi penyusun batuan Kabupaten Tulang Bawang Barat umumnya tersusun atas formasi muara enim yang terdiri dari perselingan batu lempung pasiran dan batu lanau tufaan dengan sisipan batu pasir tufaan dan batu lempung hitam. Selain itu terdapat pula formasi pasir kwarsa yang membentang disepanjang sisi timur dengan bentukan pasir kasar kerikil sampai sedang dan penyusun dominan mineral kwarsa.

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Aluvial, Regosol, Podsolik Coklat, Latosol, dan Podsolik Merah Kuning. Dalam sistem klasifikasi Soil Taxonomy, jenis tersebut setara dengan ordo tanah Entisols, Alfisols, Inceptisols, Oxisols, dan Ultisols.Karateristik alluvial memiliki kandungan kerakal, kerikil, lempung dan setempat pecahan cangkang fosil. Daerah dengan karaketrikstik alluvial umumnya terdapat pada daerah endapan sungai, dengan jenis tanah tropquents, fluvaquents dan tropofluents. Endapan aluvial terdiri atas kerakal, kerikil, batu pasir halus kasar endapan ini umumnya berasal dari endapan Way Tulang Bawang.

4) Kondisi Hidrologi

Secara umum, kondisi sistem hidrologi disuatu daerah dapat ditinjau dari kajian Daerah Aliran Sungai (DAS). DAS merupakan suatu bentang alam yang dibatasi oleh pemisah alami berupa topografi perbukitan / pegunungan dan berfungsi mengumpulkan, menyimpan dan mengalirkan air, sedimen dan unsur hara ke sungai utama yang akhirnya bermuara pada satu outlet tunggal. Di Kabupaten Tulang Bawang Barat terdapat 5 sungai dan 3 (tiga) DAS. Pola aliran drainase menunjukkan arah aliran yang masing-masing menuju ke sungai-sungai utama yang melintasi dan di sekitar wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang selanjutnya dapat disebut sebagai system hidrologi/drainase wilayah. Sungai utama yang melalui Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Way Kanan, Way Kiri dan Way Tulang Bawang.

Pola aliran sungai di Kabupaten Tulang Bawang Barat antara lain: (1) Pola aliran dendritik, yaitu pola aliran berbentuk seperti pohon. (2) Pola aliran trellis, yaitu pola aliran pada beberapa sungai yang mendapat tambahan air dari anak sungainya, dimana arah alirannya tegak lurus pada sungai tersebut.

5) Kondisi Klimatologi

Berdasarkan klasifikasi iklim Smith dan Ferguson, wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat masuk ke dalam tipe iklim B yang dicirikan dengan jumlah bulan basah selama 9 bulan pada bulan September - Mei. Berdasarkan data Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Angka (2017), curah hujan di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2016 selama 12 bulan (Januari hingga Desember) tahun 2016 adalah antara 44 mm (Juli) hingga 549 mm (Maret) dengan suhu rata-rata Kabupaten Tulang Bawang Barat relatif sama dengan berada pada suhu 26,6 – 27,6 $_{o}$C dengan kelembaban rata-rata 78 – 84%.

6) Kondisi Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan eksisting di Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya.

a) Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Tabel 2.3. menyajikan informasi kawasan lindung kabupaten tulang bawang barat

Tabel 2.2.
Kawasan Lindung Kabupaten Tulang Bawang Barat

Jenis Kawasan Lindung	Keterangan
Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	Kawasan sekitar rawa yang terdapat di Kecamatan Tulang bawang Udik dan Kecamatan Pagar Dewa
Kawasan perlindungan setempat	Sempadan sungai dikembangkan pada seluruh aliran sungai yang ada di kabupaten, baik yang mengalir di kawasan perkotaan maupun di luar kawasan perkotaan

Kawasan Cagar Budaya	a. Kawasan Benteng Karang Talang dan Benteng Sabuk yang terdapat di Kecamatan Tulang Bawang Udik b. Kawasan Makam Minak Indah/Tuan Rio Sanak di Kecamatan Tulang Bawang Tengah c. Kawasan Makam Tuan Rio Mangku Bumi (Raja Tulang Bawang), Makan Tuan Rio Cikai Dilangek (hulu bawang Kerajaan Tulang Bawang), Makam Prajurit Hidayatullah (putra Mahkota), Makam Tubagus Buang, dan Makam Tubagus Minak saleh di Kecamatan Pagar Dewa
Kawasan Rawan Bencana	Kawasan rawan banjir yang terdapat disekitar bantaran sungai Tulang Bawang yang melewati Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Pagar Dewa, Kecamatan Gunung Terang dan Batu Putih, Kecamatan Lambu Kibang, Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Kecamatan Gunung Agung

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Tulang Bawang Barat 2012-2031

b) Kawasan Budi Baya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan dapat dilihat pada Tabel 2.4. berikut menyajikan informasi kawan budidaya Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Tabel 2.3.
Kawasan Budidaya Kabupaten Tulang Bawang Barat

Jenis Kawasan Lindung	**Lokasi**
Hutan Produksi	Kecamatan Gunung Agung dan Gunung Terang dan Batu Putih
Hutan Rakyat	Gunung Agung dan Kecamatan Gunung Terang dan Batu Putih
Pertanian	
Pertanian pangan	
Sawah irigasi	Beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat
Sawah bukan irigasi	Beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat
Pertanian Holtikultura	Seluruh Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat
Perkebunan	Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Way Kenanga, dan Kecamatan Tumijajar
Peternakan	Seluruh Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat
Perikanan	
- Perikanan Budidaya	Kecamatan Pagar Dewa, Gunung Terang dan Batu Putih, Tulang Bawang Tengah dan Tulang Bawang Udik
- Pengolahan Ikan	Kecamatan Pagar Dewa, Gunung Terang dan Batu Putih, Tulang Bawang Tengah dan Tulang Bawang Udik
- Minapolitan	Kecamatan Pagar Dewa, Kecamatan Gunung Terang dan Batu Putih, Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Kecamatan Tulang Bawang Udik

Pertambangan	sepanjang Sungai Way Tulang Bawang, Way Kanan dan Way Kiri yang tersebar di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik dan Pagar Dewa
Perindustrian	
Kawasan industri kecil dan rumah tangga	Kecamatan Pagar Dewa dan Tumijajar
Kawasan Industri pengolahan hasil tanaman perkebunan	Kawasan perkebunan
Pariwisata	
Pariwisata alam	Kecamatan Pagar Dewa
Pariwisata buatan	Kecamatan Tumijajar dan Tulang Bawang Tengah
Pariwisata budaya	Kecamatan Tulang Bawang Udik, Tulang Bawang Tengah, dan Pagar Dewa
Permukiman	
Permukiman perkotaan	Kecamatan Tumijajar, Tulang Bawang Tengah dan Lambu Kibang
Permukiman perdesaan	Kecamatan Tumijajar, Tulang Bawang Tengah, Way Kenanga, Gunung Terang dan Batu Putih, Gunung Agung, Pagar Dewa dan Tulang Bawang Udik
Kawasan peruntukan lainnya	

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Tulang Bawang Barat 2012-2031

c) Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan data guna lahan yang telah dijelaskan sebelumnya, kawasan budidaya mendominasi lahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Lahan budidaya yang mendominasi ini menjadi potensi yang luar biasa bagi Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam hal pengelolaan lahan.

Selain dipengaruhi oleh penggunaan lahan, potensi kawasan budidaya uga dipengaruhi oleh topografi dari wilayah itu sendiri. Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki topografi yang bervariasi yang menyebabkan komoditas unggulan dari masing-masing wilayah juga bervariasi.

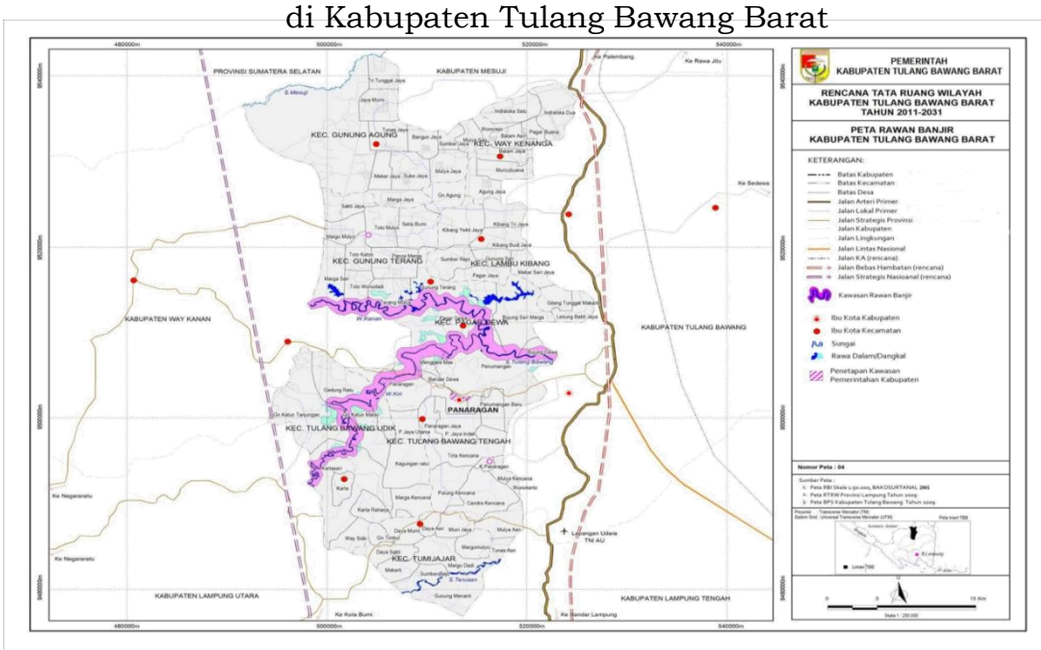
Komoditas unggulan yang dimiliki Kabupaten Tulang Bawang Barat terus diupayakan tidak hanya diunggulkan di tingkat kabupaten, tetapi juga menembus tingkat provinsi dan nasional. Komoditas tersebut dapat dikategorikan sebagai komoditas khas Kabupaten Tulang Bawang Barat, dimana ke khasan tersebut dapat dilihat dari perbedaan karakteristik komoditas yang dimiliki

Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan daerah lainnya. Perbedaan karakteristik komoditas ini diantaranya berdasarkan jenis komoditas, besaran produksi serta cita rasa yang dimilikinya.

7) Wilayah Rawan Bencana

Pada beberapa lokasi sering terjadi banjir terutama di sungai Way Tulang Bawang, Way Kanan dan Way Kiri. Muara atau pertemuan Sungai Way Kanan dan Way Kiri yang kemudian mengalir ke Sungai Way Tulang Bawang berada di Kecamatan Pagar Dewa. Kawasan yang sering mengalami banjir merupakan kawasan lahan kering akibat dari meningkatnya volume debit air data dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Gambar. 2.3.
Peta Wilayah Potensi Bencana (Rawan Banjir)
di Kabupaten Tulang Bawang Barat



B. Aspek Demografi

a) Jumlah Penduduk

Berdasarkan data dari Badan Statistik Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil, penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada akhir tahun 2017 terjadi kenaikan jumlah penduduk dari 259.675 jiwa pada tahun 2013 menjadi 269.162 jiwa pada tahun 2017. Banyaknya Penduduk

Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 – 2017, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4.
Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2013 – 2017 Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Tahun	Laki – Laki		Perempuan		Jumlah
		Jiwa	%	Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	2013	133.327	51,3	126.403	48,7	259.675
2.	2014	134.611	51,3	127.705	48,7	262.316
3.	2015	135.811	51,3	128.901	48,7	264.712
4.	2016	136.922	51,3	130.051	48,7	266.973
5.	2017	137.998	51,3	131.164	48.7	269.162

Sumber : Kumpulan Anggka Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2018

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2013 – 2017 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Pertumbuhannya pun relatif sedang, hal ini disebabkan fungsi Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai daerah otonomi baru dan bukan sebagai daerah tujuan atau pun sebagai daerah pengembangan pemukiman/perumahan, sehingga pertumbuhan penduduk yang terjadi lebih banyak didorong oleh faktor tingkat kelahiran dan perpindahan penduduk.

Tabel 2.5.
Laju Pertumbuhan Penduduk
Tahun 2013-2017 di Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Jenis Data	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (% / Tahun)	0,99	1,02	0,91	0,85	0,82

Sumber:Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2018

b) Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Sedangkan untuk kepadatan penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan rata – rata jumlah penduduk yang tinggal pada setiap hektar lahan. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, kepadatan jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2017 sebesar 224 jiwa/Km^2.Jumlah

kepadatan penduduk per-kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6
Luas Wilyah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kecamatan Tahun 2018

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Penduduk		Kepadatan Penduduk
		Km²	%	Jumlah	%	Orang/Km²
1	Tulang Bawang Udik	237,35	19,76	31.276	11,61	132
2	Tumijajar	133,22	11,09	43.322	16,09	325
3	Tulang Bawang Tengah	274,93	22,89	84.206	31,27	306
4	Pagar Dewa	99,65	8,30	6..092	2,62	71
5	Lambu Kibang	109,82	9,14	23.630	8,02	197
6	Gunung Terang	141,91	11,82	33..204	12,77	242
7	Batu Putih	NA	NA	NA	NA	NA
8	Gunung Agung	127,64	10,63	29.126	10,82	228
9	Way Kenanga	76,48	6,37	18.306	6,8	239
Jumlah		**1.201,00**	**100**	**266.973**	**100**	**224**

Sumber : Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2018

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dari aspek kesejahteraan masyarakat mencakup gambarandan analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat secara umum, yang dibagi secara spesifik kedalam beberapa fokus, yaitu:

A. Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.
B. Fokus kesejahteraan sosial.
C. Fokus senibudaya dan olahraga.

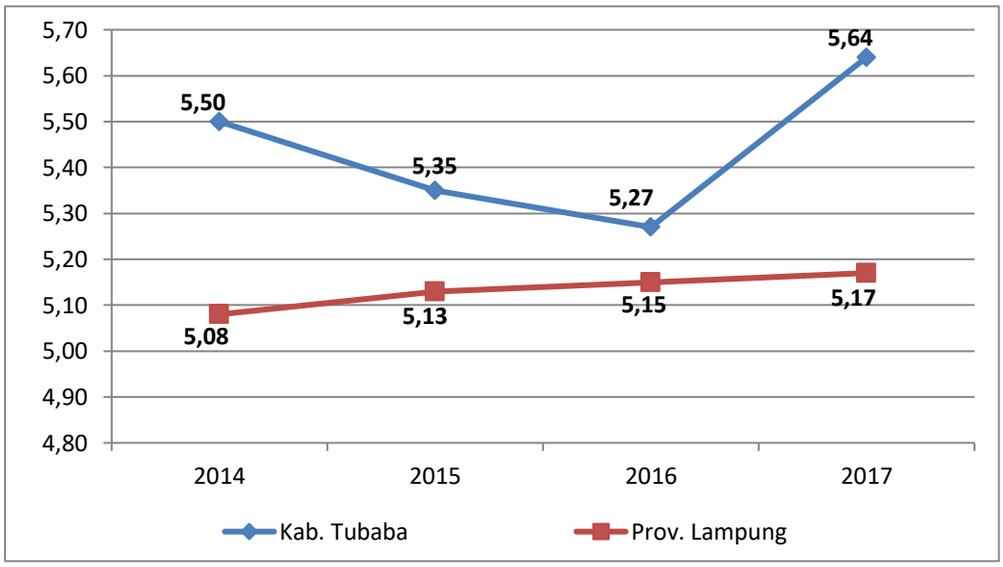
A. Fokus Kesejahteraaan dan Pemerataan Ekonomi

1) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat selama periode 2013-2017 cenderung menurun. Namun, angka pertumbuhan ekonomi tersebut masih berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung. Grafik perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Provinsi

Lampung periode 2013-2017 dapat dilihat pada Gambar 2.4 di bawah ini.

Gambar 2.4
Grafik perbandingan pertumbuhan ekonomi
Kab. Tulang Bawang Barat dengan Provinsi Lampung,
Tahun 2013 - 2017



Sumber : Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2018

Struktur ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat tercermin dari besarnya kontribusi PDRB masing-masing sektor ekonomi terhadap total PDRB. Dengan mengetahui struktur ekonomi wilayah, maka upaya pembangunan ekonomi dapat diarahkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan potensi wilayah. Struktur ekonomi juga dapat dijadikan acuan untuk merencanakan upaya perbaikan struktur, maupun penciptaan struktur ekonomi wilayah yang ideal dalam jangka panjang. Perkembangan PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha disajikan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7
Perkembangan PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha (Juta Rp),
Tahun 2013-2017

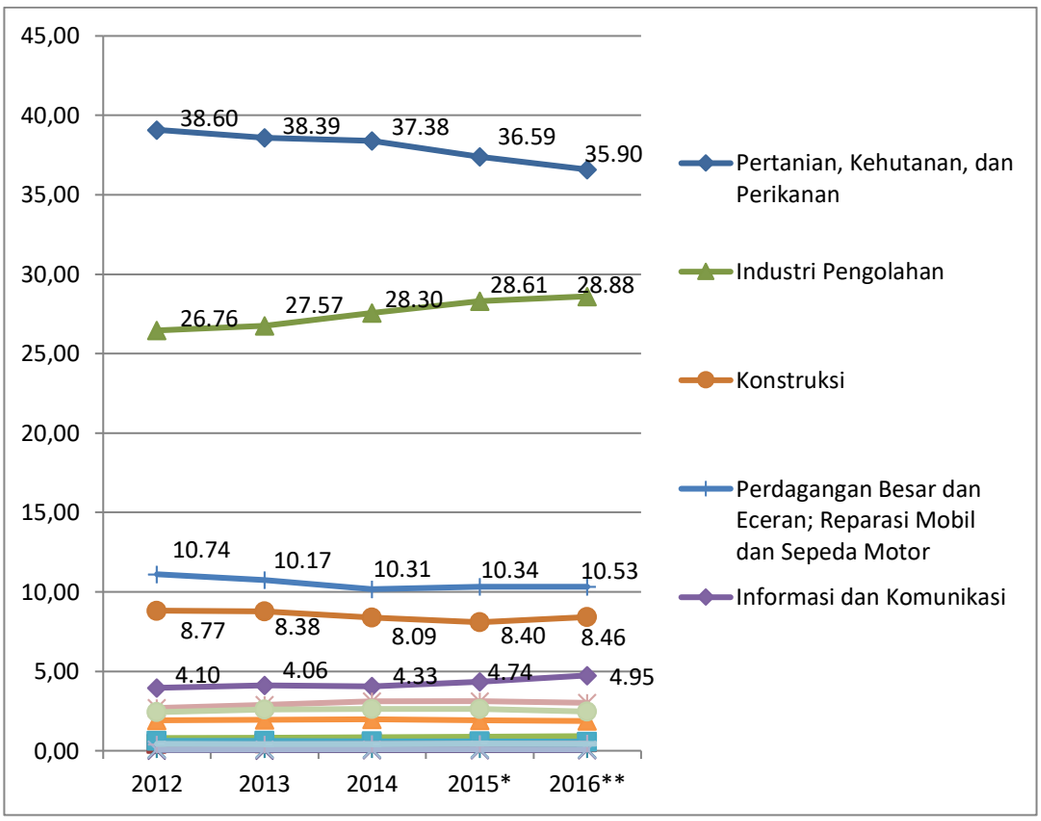
Lapangan Usaha	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.218,09	2.294,65	2.373,84	2.438,19	2.536,12

2. Pertambangan dan Penggalian	26,51	28,59	30,65	33.37	35,85
3. Industri Pengolahan	1.515,22	1.631,34	1.758,60	1.851,34	1.987,02
4. Listrik dan Gas	1,96	2,59	2,72	2.96	3,13
5. Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,72	6,00	6,12	6,37	6,61
6. Konstruksi	486,40	517,13	532,13	589,34	625,86
7. Perdagangan Besar dan Eceran	675,25	705,34	736,90	782,95	820,20
8. Transportasi dan Pergudangan	41,98	45,46	51,38	55,58	59,26
9. Akomodasi dan Makan Minum	42,21	44,79	49,82	54,,31	58,85
10. Informasi dan Komunikasi	230,60	249,97	270,64	310,08	341,47
11. Jasa Keuangan	34,56	35,63	36,18	37,62	39,01
12. Real Estate	119,19	128,18	136,27	145,70	154,20
13. Jasa Perusahaan	3,87	4,39	4,72	4,85	5,12
14. Adm. Pemerintahan, Pertahanan, dan Jasa Sosial Wajib	150,24	159,70	169,89	159,80	166,83
15. Jasa Pendidikan	131,14	143,05	154,18	159,80	166,83
16. Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	23,79	25,76	27,69	29,40	30,79
17. Jasa Lainnya	24,82	26,11	28,27	29,20	31,12
	119,19	128,18	136,27	145,70	154,20
PDRB	**5.731,56**	**6.046,68**	**6.370,00**	**6.705,64**	**7.083,60**

Sumber: Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Angka, 2018.

Dari Tabel 2.7. terlihat bahwa selama periode 2013 - 2017, kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan untuk PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat sangat dominan. Namun demikian, perkembangan kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan cenderung menurun setiap tahunnya terhadap distribusi PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kondisi tersebut dapat disebabkan adanya aktivitas sektoral yang memungkinkan terjadinya pengaruh dan saling ketergantungan antara satu atau lebih sektor dengan sektor lainnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan distribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat secara signifikan setiap tahunnya

Gambar 2.5
Perkembangan Distribusi Persentase PDRB Seri 2010
Kab. Tulang Bawang Barat menurut lapangan usaha (Juta Rp), Tahun 2013-2017



Sumber: Tulang Bawang Barat Dalam Angka, 2018

Jika dilihat dari perkembangan distribusi PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha periode tahun 2013-2017 pada grafik di atas, menunjukkan adanya perubahan struktural dari sektor pertanian ke sektor industri pengolahan. Hal ini ditandai dengan semakin menurunnya distribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dari 38,60% pada tahun 2013, menurun menjadi 35.90% pada tahun 2017. Di sisi lain, sektor industri pengolahan mengalami peningkatan, dari 26,76% di tahun 2013, meningkat menjadi 28,88% pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat perubahan struktural dan sektoral yang tinggi, berkaitan dengan proses pertumbuhan ekonomi di kabupaten Tulang Bawang Barat. Beberapa komponen utama perubahan struktural tersebut mencakup pergeseran yang berangsur-angsur dari aktifitas pertanian ke sektor non petanian dan dari sektor industri ke jasa.

2) Laju Inflasi

Dalam konteks ilmu ekonomi makro, inflasi adalah proses meningkatnya harga dari sekelompok barang dan jasa secara terus menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi diukur sebagai persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu), deflektor Produk Domestik Bruto (menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, atau indeks-indeks lain dalam tingkat harga keseluruhan). Inflasi dapat disebabkan antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, serta akibat adanya ketidaklancaran suplai dan distribusi barang.

Dikarenakan untuk laju inflasi Kabupaten Tulang Bawang Barat belum memiliki data, maka sebagai acuan untuk nilai inflasi memakai data inflasi di Provinsi Lampung (Kota Bandar Lampung) dan Nasional yang disajikan pada Tabel;

Tabel 2.8.
Laju Inflasi di Kota Bandar Lampung dan Nasional
Tahun 2013-2017

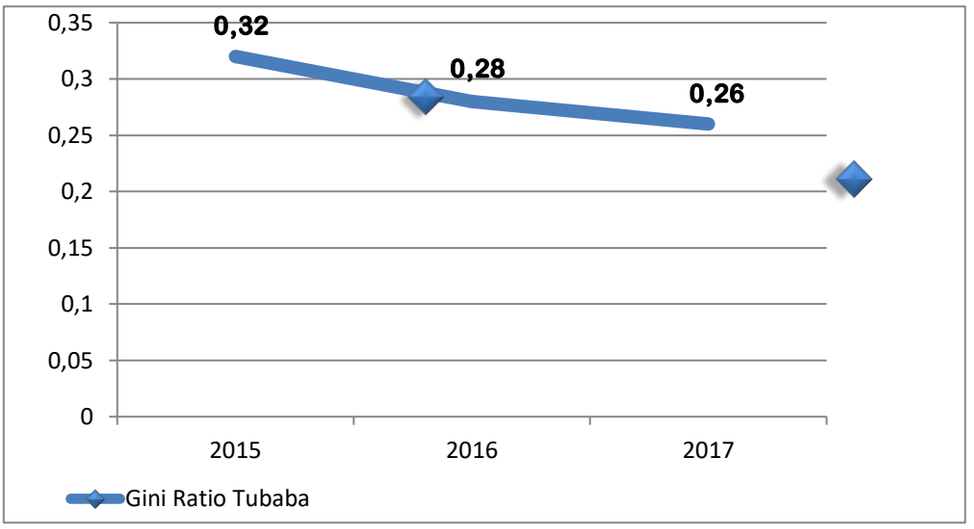
Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Inflasi Kota Bandar Lampung	7,56	8,36	4,65	2,75	3,14
Inflasi Nasional	8,38	8,36	3,35	3,02	3,61

Sumber : Statistik Harga Konsumen Kota Bandar Lampung 2018

3) Indeks Gini (Gini Ratio)

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah *Gini Ratio*. Nilai *Gini Ratio* berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai *Gini Ratio* menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Perkembangan *Gini Ratio* Kabupaten Tulang Bawang Barat 2015 – 2017 disajikan sebagai berikut

Gambar 2.6
Perkembangan Indeks Gini (Gini Ratio)
Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2015 – 2017



Sumber : BPS, Pola Konsumsi Penduduk Provinsi Lampung 2017
(Kab. Tulang Bawang Barat - Data Diolah).

4) Persentase Penduduk diatas Garis kemiskinan

Jumlah persentase penduduk miskin di Kabupaten Tulang Bawang Barat diketahui berdasarkan data dari Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Kota 2013-2017, sehingga dapat dihitung persentase penduduk diatas garis kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tabel 2.9.), yaitu sebesar 93,69% pada tahun 2013 dan mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 93,66%. Jumlah persentase penduduk diatas garis kemiskinan tertinggi pada tahun 2013 sebesar 93,69%.

Tabel 2.9.
Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan
Tahun 2013 s.d. 2017 Kabupaten Tulang Bawang Barat

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Penduduk miskin (%)	6,31	7,12	8,23	8,40	8,11
Penduduk diatas garis kemiskinan (%)	93,69	92,88	91,77	91,60	93,66
Jumlah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Kota 2011-2018

B. Fokus Kesejahteraan Sosial

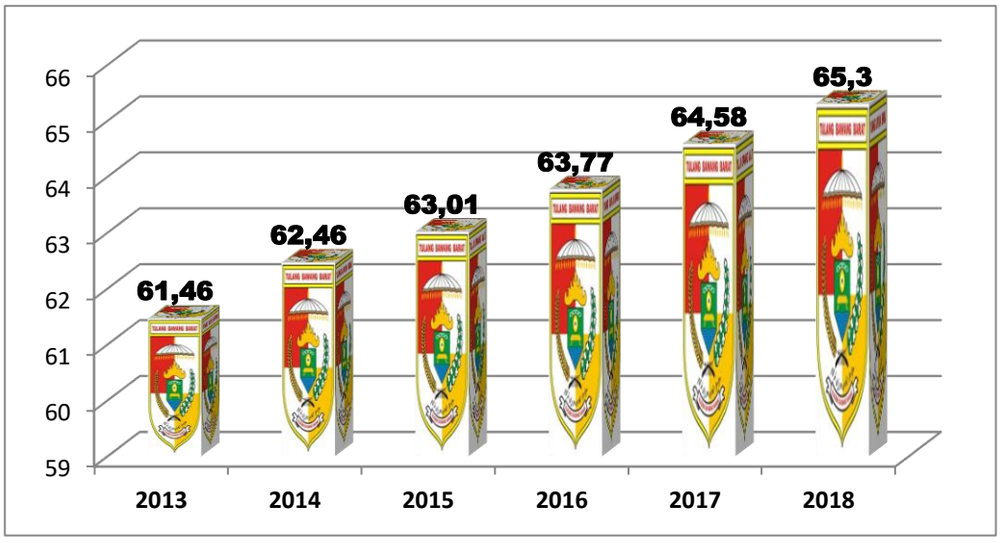
1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Selain dari perkembangan perekonomian, untuk melihat kondisi pembangunan daerah dapat dianalisis melalui IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) adalah variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk sebagai akibat dari perluasan akses layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Hal ini menunjukkan tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya. IPM ini meliputi tiga komponen dasar yang digunakan untuk merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen dasar tersebut adalah pengetahuan (pendidikan), peluang hidup (kesehatan), dan hidup layak (kemampuan daya beli/*purchasing power parity*). Kesehatan dan kemampuan daya beli dapat mencerminkan kondisi fisik manusia, sedangkan pendidikan dapat mencerminkan kondisi non fisik manusia. Dengan demikian untuk menentukan keberhasilan pembangunan di suatu daerah haruslah menggunakan indicator yang secara resmi sudah digunakan oleh badan dunia, yaitu The United Nations Development Programme (UNDP).

Program pembangunan yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat merupakan program utama yang masuk kedalam misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sumberdaya manusia merupakan unsur utama dalam perkembangan kemajuan suatu daerah. Untuk memajukan suatu wilayah memerlukan SDM yang produktif yaitu mampu bekerja dan menghasilkan suatu produk yang unggul. Selain itu mempunyai jiwa keingintahuan yang tinggi dan mampu memecahkan suatu permasalahan dengan baik. Serta memiliki jiwa inovasi.

Gambar 2.7
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2013 – 2018



Sumber : Website BPS Prop. Lampung (data IPM Kabupaten Kota)

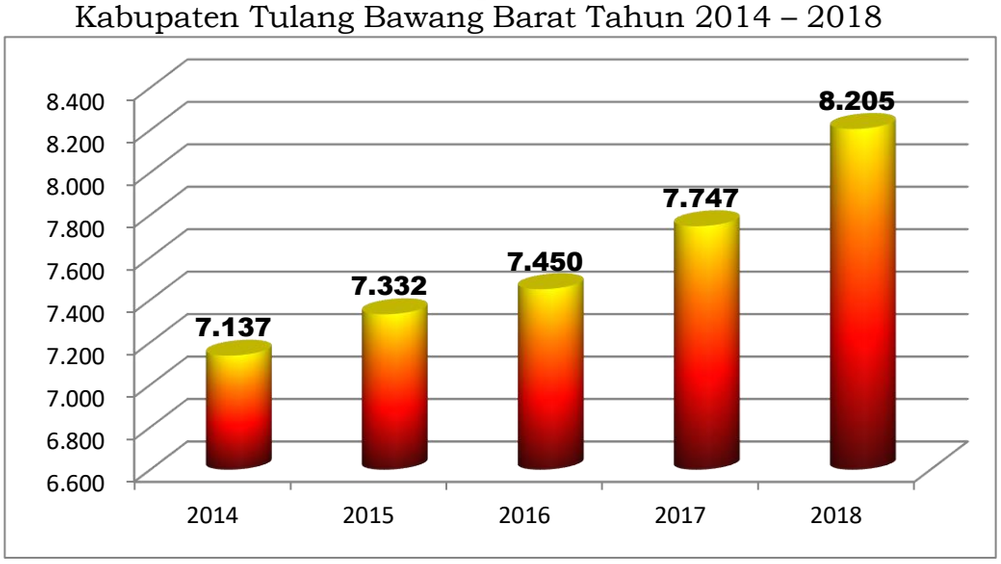
Berdasarkan data IPM Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2013 – 2018 tersebut diatas yang terus menunjukkan peningkatan sehingga dapat dikatakan untuk pembangunan dari sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan perbaikan.

2) Pengeluaran Per-Kapita

Pengeluaran perkapita merupakan salah satu indikasi dari focus kesejahteraan sosial, dimana jika ada peningkatan pada pengeluaran per-kapita atau belanja rumah tangga maka adaindikasi perekonomian ke arah lebih baik sehingga faktor kesejahteraan juga dapat dikatan meningkat.

Adapun pengeluaran per-kapita Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2014 – 2018 terus mengalami peningkatan yang signifikan, seperti tergambar pada grafik dibawah ini

Gambar 2.8
Perkembangan Pengeluaran Per-Kapita
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 – 2018



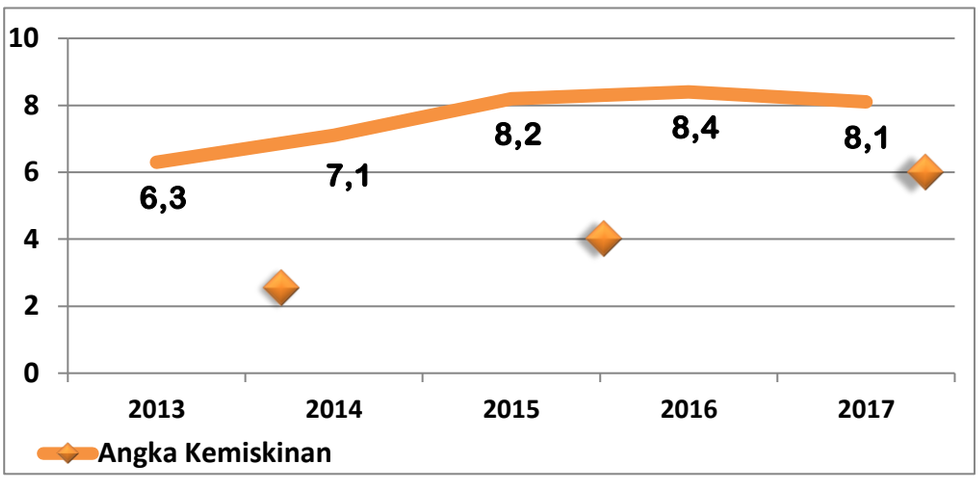
Sumber : Wibsite BPS Kabupaten Tulang Bawang Barat 2018

3) Kemiskinan

Kemiskinan untuk beberapa daerah dan lingkup Pemerintah menjadi sebuah momok yang memiliki pandangan negatif dalam pencapaian pembangunan daerah. Kemiskinan menjadi beban sekaligus tanggung jawab yang harus diemban oleh segenap

Pemerintah daerah di Indonesia beserta semua aspek yang mempengaruhinya. Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki trend peningkatan pada tahun 2013-2017 akan tetapi pada tahun 2017 terjadi penurunan tingkat kemiskinan. Penjabarannya lebih lengkap dengan gambar grafik angka kemiskinan berikut ini :

Gambar 2.9
Perkembangan Angka Kemiskinan
Kabupaten Tulang Bawang Barat 2013 – 2017



Sumber : Website BPS Provinsi Lampung 2018 (Data Per Kabupaten/Kota)

C. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Tulang Bawang Barat ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah ditengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global.

Sementara dewasa ini para pemuda cenderung melupakan nilai-nilai budaya dan falsafah yang menjadi jati diri warga lampung dan khususnya warga Kabupaten Tulang Bawang Barat.Nilai-nilai budaya dan falsafah lampung ini tidak hanya meliputi pemahaman terhadap nilai budaya dan kesenian lampung serta penggunaan bahasa daerah lampung.

Namun upaya peningkatan jati diri masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat seperti hal nya solidaritas sosial, kekeluargaan, budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong-royong, serta penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. Kebersamaan dan

kemandirian merupakan salah satu nilai yang dirasakan makin memudar. Halini menunjukkan perlunya mengembalikan dan menggali kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.

Sementara itu bidang olahraga dinilai perlu mendapat perhatian khusus juga. Kebiasaan berolahraga akan menghasilkan masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani, dimana selain menyehatkan tubuh kegiatan berolahraga juga dapat menyegarkan pikiran. Namun kenyataannya, anak muda masakini cenderung tidak memprioritaskan olahraga.

Halini dapat menimbulkan masalah di masa yang akan datang dimana generasi muda yang akan menjadi ujung tombak pembangunan akan menjadi generasi yang lemah. Oleh karenanya diperlukan upaya lebih dari pemerintah untuk memasyarakatkan kembali kebiasaan olahraga.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus seni budaya dan olahraga di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Perkembangan seni, budaya dan olahraga Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 secara umum mengalami peningkatan pada jumlah grup kesenian menjadi 154 grup kesenian dibandingkan pada tahun 2015 yaitu sebanyak 142 grup kesenian, namun terjadi penurunan pada jumlah klub olah raga sebanyak 10,89% menjadi 465 klub olah raga tahun 2017 dibandingkan tahun 2015 sejumlah 505 klub olahraga (Tabel2.27). Perkembangan seni, budaya dan olahraga menurut Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel berikut;

Tabel 2.10.
Capaian Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Tahun 2013 s.d. 2017 Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Capaian Pembangunan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah grup kesenian	82	141	142	150	154
2	Jumlah klub olahraga	415	466	505	450	465
3	Jumlah gedung olahraga	33	33	40	80	80

Sumber :Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Tabel 2.11.
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Menurut Kecamatan

Tahun 2015 dan 2017 Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Kecamatan	Jumlah grup kesenian			Jumlah klub olahraga		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	Tulang Bawang Udik	6	6	6	77	110	61
2	Tumijajar	17	17	17	74	79	74
3	Tulang Bawang Tengah	54	55	65	TAD	TAD	TAD
4	Pagar Dewa	11	9	9	TAD	TAD	TAD
5	Lambu Kibang	13	15	17	69	70	69
6	Gunung Terang	17	17	17	88	88	88
7	Gunung Agung	13	13	13	97	97	97
8	Way Kenanga	10	10	10	61	61	61
	Jumlah	**141**	**142**	**154**	**466**	**505**	**450**

Keterangan : TAD = Tidak Ada Data
Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum dapat dilihat dari empat fokus layanan yaitu layanan urusan pemerintahan wajib (wajib pelayanan dasar dan wajib non pelayanan dasar), urusan pemerintahan pilihan dan layanan urusan pemerintahan penunjang.

A. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Sedangkan pengertian urusan wajib merupakan urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warganegara.

1) Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar

a. Bidang Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu faktor utama dalam menentukan kualitas sumberdaya manusia dalam kaitannya untuk pembangunan daerah. Pelayanan pendidikan pemerintah daerah dinilai melalui ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan

dasar dan menengah yang memadai. Indikator keberhasilan pelayanan pemerintah di bidang pendidikan meliputi:

a) Angka Rata – Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Angka rata-rata lama sekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Lamanya sekolah merupakan ukur anak umulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut.

Angka rata-rata lama sekolah meningkat tiap tahunnya. Bila angka ini dikonversikan kejenjang pendidikan, maka dapat disimpulkan bahwasannya secara rata–rata penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah lulus sekolah dasar. Data angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel 2.12

Tabel 2.12.
Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Kriteria	2013	2014	2015	2016	2017
Rata-Rata Lama Sekolah	6,48	6,81	6,82	6,83	6.83

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2018

b) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK untuk jenjang SD pada tahun 2013 sebesar 122,05 berarti bahwa untuk jenjang SD jumlah siswa yang sekolah melebihi jumlah penduduk usia sekolah SD dimana hal ini disebabkan pada sekolah SD siswa ada yang berusia kurang dari 7 tahun tetapi ada pula yang melebihi 12 tahun.

Pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 114,74. Demikian pula bagi SMP, dapat dilihat bahwa APK pada tahun

2013 sebesar 71,02 naik pada tahun 2014 menjadi 88,73. APK SMA pada tahun 2013 sebesar 59,02 dan pada tahun 2014 kemudian nilai APK SMA menjadi 64,78 atau meningkat sebesar 5,76 dari tahun 2013. Hal ini bisa terjadi karena pada penduduk usia SMA justru mengalami penurunan. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Tulang Bawang Barat 2013-2018 disajikan dalam Tabel 2.13.

Tabel 2.13.
Angka Partisipasi Kasar Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD	122,05	114,74	113,66	111,69	108,84
2	SMP	71,02	88,73	85,06	109	92,65
3	SMA	59,02	64,78	75,58	84	71,61

*Keterangan : *data hasil proyeksi*
Sumber : Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2018

c) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM ini merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Murni berbagai jenjang pendidikan menurut jenis kelamin disajikan dalam Tabel 2.22, SD dan Perguruan Tinggi mengalami perkembangan yang selalu meningkat tiap tahunnya, namun jenjang pendidikan SMP menurun di tahun 2014 kemudian mengalami peningkatan di tahun 2015, sedangkan jenjang pendidikan SMA menurun hingga tahun 2015. Secara umum APM di Kabupaten Tulang Bawang Barat meningkat hingga tahun 2015 disajikan pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14.
Angka Partisipasi Murni dengan Jenjang Pendidikan
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 s.d. 2018

(dalam persen)

Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
SD / MI	96,56	97,95	98,39	99,12	99,24

SMP	66,57	64,29	67,08	87,16	84,35
SMA	57,27	56,06	56,05	57,44	55,24
APM	**73,46**	**72,76**	**73,84**	**81,24**	**79,61**

*Keterangan : *data hasil proyeksi*
Sumber : Tulang Bawang Barat Dalam Angka, 2018

d) Rasio Guru dan Murid

Rasio murid terhadap guru adalah angka yang merupakan hasil pembagian antara jumlah murid dengan jumlah guru. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar dan untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Semakin kecil rasio guru terhadap murid menunjukkan hasil yang semakin baik. Rincian informasi rasio guru terhadap murid disajikan dalam Tabel 2.15.

Tabel 2.15.
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Kecamatan	SD			SMP			Pendidikan Dasar
	Jmlh Guru	Jmlh Murid	Rasio	Jmlh Guru	Jmlh Murid	Rasio	Rasio
Tulang Bawang Udik	218	3336	15,30	98	1258	12,84	14,07
Tumijajar	310	4611	14,87	136	2183	16,05	15,46
Tulang Bawang Tengah	531	9158	17,25	224	3676	16,41	16.83
Pagar Dewa	40	409	10,23	20	143	7,15	8,69
Lambu Kibang	137	2578	18,82	39	798	20,46	19,64
Gunung Terang	112	1808	16,14	51	681	13,35	14,74
Batu Putih	84	1703	20,27	15	254	16,93	18,6
Gunung Agung	201	3802	18,92	71	1283	18,07	18,49
Way Kenanga	132	2331	17,66	48	710	14,79	16,22
Jumlah	**1765**	**29736**	**16,85**	**702**	**10986**	**15,65**	**15,86**

Sumber : Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Angka 2018

b. Kesehatan

Analisis kinerja atas fokus layanan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan dilakukan terhadap indikator ketersediaan puskesmas, poliklinik, puskesmas pembantu, rasio tenaga medis per satuan penduduk, angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian neonatal.

a) Ketersediaan Puskesmas, Polikilinik dan Puskesmas Pembantu

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting di Indonesia. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja (Depkes, 2011).

Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia. Data yang menunjukkan ketersediaan jumlah puskesmas, pustu, dan poliklinik disajikan dalam Tabel 2.16.

Tabel 2.16.
Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Poliklinik
Menurut Kecamatan Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Puskesmas	9	9	10	13	16
2	Jumlah Poliklinik	8	10	11	9	9
3	Jumlah Pustu	39	41	42	42	37
	Jumlah 1-3	**56**	**60**	**63**	**64**	**62**
4	Jumlah Penduduk	259.731	262.696	264.712	266.973	269.162
	Rasio	**0,216**	**0,228**	**0,238**	**0,239**	**0,230**

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2018

Data menunjukkan ketersediaan fasilitas kesehatan yang berupa puskesmas dan pustu di Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah memadai dimana disetiap kecamatan telah memiliki ketersediaan pusat kesehatan masyarakat demi melayani kebutuhan masyarakat.

b) Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan

polamortalitas menurut umur. AHH Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2011 sebesar 68,41 tahun, mengalami kenaikan menjadi 69,08 tahun pada tahun 2015. Angka tersebut masih dibawah rata-rata provinsi yaitu 74 tahun dannasional 70,6 tahun. Tetapi AHH Kabupaten Tulang Bawang Barat meningkat tiap tahunnya, berarti bahwa tingkat kesejahteraan dan kesehatan penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat semakin tinggi. Berikut adalah data Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2013-2018 disajikan dalam Tabel 2.17.

Tabel 2.17.
Angka Harapan Hidup Tahun 2013 s.d. 2018
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Kriteria	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Harapan Hidup	68,72	68,98	69,08	69,21	69.35

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

c) Rasio Ketersediaan Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Rasio tenaga medis persatuan penduduk adalah jumlah tenaga medis per 1.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga medis. Jumlah tenaga medis pada tahun 2015 mengalami penurunan sebanyak 18,55% dari tahun 2014. Diharapkan jumlah tenaga medis untuk tahun mendatang dapat diperbanyak agar pelayanan terhadap pasien dapat lebih memuaskan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat. Jumlah tenaga medis di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2013 hingga 2017 disajikan pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18.
Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Penduduk	259.675	262.316	264.712	266.973	269.162
2	Jumlah Tenaga Medis	421	415	338	326	271
	Rasio	**1,621**	**1,582**	**1.276**	**1,221**	**1,007**

Sumber : Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Angka 2018

d) Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) menurut definisi WHO adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera. AKI merupakan salah satu indikator yang peka dalam menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Penyebab kematian ibu menurut Data Direktorat Kesehatan Ibu yaitu pendarahan, hipertensi, infeksi, partus lama, abortus, dan lain-lain.

Faktor menunjang pencegahan AKI yaitu pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas mulai dari saat hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih dan perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, serta akses terhadap keluarga berencana. Jumlah kasus kematian ibu maternal di Kabupaten Tulang Bawang Barat terbesar pada tahun 2015 dan kembali menurun pada tahun selanjutnya disajikan dalam Tabel 2.19.

Tabel 2.19.
Kasus Kematian Ibu Maternal Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kasus	4	5	9	5	1

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat 2018

e) Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi (AKB) adalah jumlah penduduk yang meninggal pada saat bayi yang dinyatakan per 1.000 kelahiran hidup (KH). AKB merupakan salah satu indikator status kesehatan masyarakat yang terkait dengan berbagai indikator kesehatan dan indikator pembangunan lainnya. AKB tidak hanya menggambarkan keberhasilan pembangunan sektor kesehatan, tetapi juga terkait langsung dengan angka rata-rata harapan hidup penduduk di suatu daerah. AKB mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir (disajikan dalam Tabel 2.20, hal ini menggambarkan

keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam pembangunan di sektor kesehatan.

Tabel 2.20.
Kasus Kematian Bayi Tahun 2013 s.d. 2018
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kasus	38	41	29	20	35
AKB per 1000 KH	7,8	8,1	6,9	5,3	6,7

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat 2018

f) Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun per 1000 kelahiran. AKHB digunakan untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat. Dilihat dari persentase AKHB dari tahun 2013 meningkat hingga tahun 2017. Peningkatan AKHB mencerminkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat semakin baik. Secara lebih rinci informasi jumlah kelahiran, AKB, dan AKHB disajikan dalam Tabel 2.21.

Tabel 2.21.
Angka Kelangsungan Hidup Bayi Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Kelahiran Hidup	5.688	5.089	4.968	5.056	5.054
2	Jumlah Kelahiran Mati	30	25	18	20	35
3	Angka Kematian Bayi (%)	7.8	8.1	6.9	5.3	6.7
4	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (%)	94.73	95.09	96.38	96,05	95.28

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat 2018

g) Angka Kematian Neonatal

Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah jumlah penduduk yang meninggal satu bulan pertama setelah kelahiran (28 hari) yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Pada masa tersebut terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan di dalam rahim dan terjadi pematangan organ hampir

pada semua sistem. Bayi hingga usia kurang satu bulan merupakan golongan umur yang memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi dan berbagai masalah kesehatan bisa muncul. Sehingga tanpa penanganan yang tepat, bisa berakibat fatal. Beberapa upaya kesehatan dapat dilakukan untuk mengendalikan risiko dengan mengupayakan agar persalinan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru lahir.

Kasus kematian neonatal di Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami penurunan dalam waktu lima tahun terakhir (disajikan dalam Tabel 2.22). Jumlah kasus terendah pada tahun 2016, hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat berhasil dalam menekan Angka Kematian Neonatal.

Tabel 2.22.
Kasus Kematian Neonatal Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kasus	36	40	27	20	35

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang Barat 2018

h) Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satu Balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Jumlah Posyandu di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2015 sebanyak 188 posyandu dan jumlah balita sebanyak 26.682 jiwa. Dengan demikian rasio Posyandu terhadap Balita mencapai 1:141. Hal ini berarti bahwa dari 1 posyandu di Kabupaten Tulang Bawang Barat melayani 146 balita. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kondisirasio Posyandu di

Kabupaten Tulang Bawang Barat selama kurun waktu tahun 2013-2017 disajikan dalam Tabel berikut;

Tabel 2.23.
Jumlah Posyandu dan Balita
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah posyandu	187	188	188	196	191
2	Jumlah Balita	23.814	23.111	26.682	24.856	48.478
3	Rasio	1:127	1:128	1:141	1:126	1:253

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang Barat

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kondisi Kabupaten Tulang Bawang Barat terkait dengan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

a) Jaringan Jalan

Data panjang jalan Kabupaten Tulang Bawang Barat sepanjang 1.650,80 Km berdasarkan SK Bupati Tulang Bawang Barat Nomor : B/179/II.03/HK/Tubabar/2018, dengan rincian kondisi jalan adalah keadaan baik 631.32 Km, keadaan sedang 297,6 Km, keadaan rusak 127,06 Km, dan 591,11 Km rusak berat.

Panjang dan kondisi jalan Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan kondisi jalan per-Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.24.

Tabel 2.24.
Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan dan Kecamatan
Tahun 2018 Kabupaten Tulang Bawang Barat

Kecamatan	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	Jumlah
Tulang Bawang Udik	95,55	43,81	38,98	101,89	280,23
Tumijajar	103,99	25,92	22,15	78,43	230,49
Tulang Bawang Tengah	164,87	65,56	32,67	145,38	408,48
Pagar Dewa	20,41	20,52	7,72	36,47	85,12
Lambu Kibang	73,47	17,47	9,18	66,31	166,43
Gunung Terang	35,08	27,83	3,8	44,62	114,33
Batu Putih	48,06	32,80	2,27	34,40	117,53
Gunung Agung	35,07	27,82	3,78	44,62	111,29
Way Kenanga	54,82	35,85	6,51	38,99	136,17
Jumlah	**631,32**	**297,6**	**127,06**	**591,11**	**1.650,18**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2018

b) Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Luas RTH hanya dihitung dari RTH Perkotaan dengan pertimbangan pernah dilakukan studi tentang RTH kawasan perkotaan. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah dalam rangka mendorong implementasi RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu terwujudnya RTH sesuai dengan Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Berdasarkan hasil survei untuk penataan ruang di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang pelaksanaannya dilaksanakan pada wilayah yang di rencanakan akan menjadi pusat perkotaan Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tumijajar dan Kecamatan Lambu Kibang. Didapati persentase kebutuhan akan ketersediaan ruang terbuka hijau Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada Tabel 2.25.

Tabel 2.25.
Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Perkotaan	Luas RTH (Ha)	Kebutuhan RTH (Ha)
1	Tulang Bawang Tengah	7.322,17	8.247,90
2	Tumijajar (PKLp)	4.841,36	3.996,60
3	Lambu Kibang (PKLp)	11,94	3.294,60
TOTAL		**12.175,47**	**15.539,10**
Persentase RTH		**47,12**	**100**
RTH Publik = 47,02			
RTH Privat = 0,10			

Sumber : Buku Identifikasi RTH Tulang Bawang Barat, 2015

Secara umum Kabupaten Tulang Bawang Barat masih kekurangan RTH sebesar 52,88% atau seluas 8.216,93 Ha, dengan rincian RTH Publik sebesar 19,65 atau seluas 3.052,84 Hadan RTH Privat sebesar 33,23 atau seluas 5.052,84 Ha. Jika dirinci perwilyah, maka untuk nilai RTH yang masih sangat kekurangan

ada diwilayah Lambu Kibang dimana kebutuhan mencapai 3.294,60 Ha dan yang tersedia baru mencapai 11,94 Ha. Hal ini masih ada kekurangan seluas 3.282,66 Ha.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tingkat hunian di Kabupaten Tulang Bawang Barat saat ini secara umum tingkat kepadatannya masih sangat normal terkecuali di daerah kota-kota kecamatan tertentu yang memang menjadi pusat pertumbuhan dan pelayanan, yaitu Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Tumijajar. Sedangkan kawasan pemukiman pedesaan tersebar di 6 wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat, terutama wilayah dengan kepadatan penduduk yang relatif rendah, antara lain Kecamatan Pagar Dewa dan Kecamatan Tulang Bawang Udik.

Secara umum kondisi pengembangan permukiman di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada saat ini menunjukkan perkembangan secara blok (pola grid). Kawasan perumahan cenderung berkelompok pada kawasan yang mempunyai kemudahan akses dan juga dekat dengan sarana dan prasarana yang ada.

Jika dilihat dari kondisi bangunan rumah di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dikelompokan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. *Rumah permanen*

Merupakan rumah yang menggunakan batu dan beton sebagai bahan konstruksinya. Bangunan rumah permanen banyaknya terdapat pada wilayah perumahan/pemukiman perkotaan, pusat pendidikan, perkantoran dan perumahan yang berada di sepanjang jalan utama.

2. *Rumah Sederhana*

Rumah yang sebagian menggunakan konstruksi batu, sementara sisanya menggunakan kayu atau bahan sejenisnya serta bangunan yang sifatnya sementara dan bahan bangunannya menggunakan kayu atau bambu.

Kabupaten Tulang Bawang Barat 2017 sebagai berikut Berikut ini data tentang persentase keadaan perumahan (pemukiman) disajikan dalam Tabel 2.26.

Tabel 2.26.
Persentase Keadaan Rumah Tangga
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017

No	Persentase Keadaan Rumah Tangga	Tahun 2017
1.	Setatus kepemilikan bangunan	
	a. Milik sendiri	90,64
	b. Kontrak / sewa	1,23
	c. Bebas Sewa	8,13
	d. Dinas / Lainnya	0,00
2	Luas lantai tempat tinggal (M^2)	
	a. < 19	0,14
	b. 20-40	24,27
	c. 50-99	58,93
	d. 100-149	13,55
	e. 150+	3,12
3	Bahan bangunan utama atap rumah terluas	
	a. Beton	1,32
	b. Genteng	88,82
	c. Asbes	9,34
	d. Seng	0,51
	e. Bambu, Kayu / Sirap	0,00
	f. Jerami, Ijuk, Daun, dan Rumbia	0,00
4	Bahan dinding rumah terluas	
	a. Tembok	0,14
	b. Plesteran anyaman bambu / kawat	0,00
	c. Kayu / Batang Kayu	23,92
	d. Bambu / Anyaman Bambu	5,33
	e. Lainnya	0,14
5	Banguan utama lantai rumah terluas	
	a. Mamer / Granit	0,15
	b. Kramik	18,44
	c. Parket / Vinil / Permadani / Ubin / Tegel / Teraso	2,59
	d. Kayu / Papan	1,02
	e. Semen / Bata Merah	71,39
	f. Bambu	0,00
	g. Tanah	6,44
6	Fasilitas buang air besar	
	a. Milik Sediri	86,79
	b. Bersama	11,60

	c. Komunal / Umum	0,22
	d. Tidak ada / Tidak punya	1,39
7	Sumber air utama untuk minum	
	a. Air kemasan / Isi ulang	3,44
	b. Ledeng	0,00
	c. Sumur bor / pompa	3,30
	d. Sumur terlindung	34,32
	e. Sumur tak terlindung	57,31
	f. Mata air	0,00
	g. Air hujan	0,00
	h. Lainnya	0,00

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2018

e. Ketentraman, Ketertipan Umum dan Perlindungan Masyarakat

a) Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten dan Tingkat Waktu Tanggap (ResponseTime) Penanggulangan Kebakaran.

Jumlah mobil pemadam kebakaran yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 tidak mengalami penambahan armada mobil pemadam yakni berjumlah sebanyak 2(dua) unit.

Adapun luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah 120.175 Ha, dengan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017 jumlah penduduk sebesar 269.149 jiwa. Jumlah peristiwa kebakaran yang terjadi sepanjang tahun 2013 – 2017 sebanyak 39 kali. Dari data ini dapat diketahui rasio mobil pemadam kebakaran terhadap luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat, yaitu 1:600,58 Ini arti nya bahwa satu mobil pemadam kebakaran harus melayani area Kabupaten Tulang Bawang Barat seluas 600,58 Ha.

Aspek penilaian pelayanan penanggulangan bencana kebakaran ditetapkan dalam standar pelayanan minimal (SPM) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang

Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota yang mengacu pada 2 aspek penilaianya itu cakupan pelayanan bencana kebakaran, tingkat waktu tanggap (responsetimerate), persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi, jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK.

Dengan kondisi jumlah mobil pemadam kebakaran dan jumlah wilayah manajemen kebakaran (WMK) serta jumlah Pos Damkar saat ini, maka cakupan pelayanan kebakaran di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2013-2017 baru mencapai 30% dengan tingkat waktu tanggap (response time) penanggulangan kebakaran rata-rata di atas 30 menit sedangkan standar yang ditetapkan dalam Permendagri No. 69 Tahun 2012 adalah 15 menit. Tingkat cakupan pelayanan kebakaran didefinisikan sebagai presentase kondisi eksisting wilayah manajemen kebakaran (WMK) atau Pos Damkar dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terlayani.

Nilai presentase cakupan pelayanan kebakaran akan tetap/konstan apabila jumlah WMK atau Pos Damkar berjumlah tetap/tidak ada penambahan (standar persentase cakupan pelayanan kebakaran yang ditetap kan dalam Permendagri No. 69 Tahun 2012 adalah mencapai 75%). Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai cakupan pelayanan bencana kebakaran dan Tingkat Waktu Tanggap di Kabupaten Tulang Bawang Barat selama kurun waktu tahun 2013-2018 disajikan dalam Tabel 2.27.

Tabel 2.27.
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran & Tingkat Waktu Tanggap
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah MobilPemadam Kebakaran(unit)	1	1	1	2	2
2.	JumlahPenduduk (jiwa)	255.833	259.675	262.316	264.712	269.149
3.	LuasWilayah Kab. Tubaba (ha)	1.201,15 Km^2	1.201,15 Km^2	1.201,15 Km^2	1.201,15 Km^2	1.201,15 Km^2
4.	Jumlah Kejadian Kebakaran(kali)	13	7	9	6	4

5.	RasioMobil Pemadam Kebakaran thd LuasWil Kab Tubaba	1:1.201,15 Km^2	1:1.201,15 Km^2	1:1.201,15 Km^2	1:1.201,15 Km^2	1:600,58 Km^2
6.	PersentaseTingkat CakupanPelayanan Kebakarandi KabupatenTubaba	20%	30%	40%	50%	50%
7.	Jumlah Kasus KebakarandiWMK yangTertanganidalam WaktuTanggap	7	6	7	6	2
8.	Jumlah Kasus Kebakarandalam JangkaWaktu WMK	20 – 30 menit	20 – 30 menit	20 – 30 menit	20 – 30 menit	20 – 30 menit
9.	TingkatWaktuTanggap (ResponTimeRate) daerahlayananWMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)	1 – 2 Jam	30-60 Menit	30 – 60 menit	30 – 60 menit	30 – 60 menit
10.	JumlahLuasWilayah ManajemenKebakaran (Km^2)	20 – 40 Km^2	20 – 40 Km^2	20 – 40 Km^2	20 – 40 Km^2	20 – 40 Km^2
11.	JumlahLuasPotensi Kebakaran(Km^2)	101,97 Km^2	101,97 Km^2	101,97 Km^2	101,97 Km^2	101,97 Km^2
12.	CakupanPelayanan BencanaKebakaran(%)	10 – 20 %	10 – 20 %	10 – 20 %	10 – 20 %	10 – 20 %

Sumber : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

b) Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk.

Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Jumlah polisi pamong praja dihitung dari jumlah aparatur pada satuan polisi pamong praja yang ditetapkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Satuan polisi pamong praja merupakan perangkat daerah yang dapat berbentuk dinas daerah atau lembaga teknis daerah disajikan dalam Tabel 2.28.

Tabel 2.28.
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013-2018

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah polisi pamong praja	165	165	188	200	237
Jumlah penduduk	255.833	259.675	262.316	264.712	269.149
Rasio jumlah polisi pamong praja per10.000 penduduk	6	6	7	8	9

Sumber:Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan

Kepala Daerah. Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

c) Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk.

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas disajikan dalam Tabel 2.29.

Tabel 2.29.
Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
JumlahLinmas	1005	1005	1005	1005	1005
Jumlahpenduduk	255.833	259.675	262.316	264.712	269.149
Rasiojumlahlinmasper10.000 penduduk	39	39	38	38	38

Sumber :Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

Rasio jumlah linmas menggambarkan kapasitas pemda untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratif sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Semakin besar rasio jumlah linmas maka akan semakin besar ketersediaan linmas yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

f. Sosial

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial diamanatkan bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan. Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Tahun 2017 disajikan dalam Tabel 2.30.

Tabel 2.30.
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Tahun 2017 Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Jenis Masalah	2017
1	Anak Balita Terlantar	10
2	Anak Terlantar	30
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	-
4	Anak Jalanan	-
5	Anak Dengan Kedisabilitas	5
6	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	3
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	7
8	Lanjut Usia Terlantar	0
9	Penyandang Disabilitas	391
10	Tuna Sosial	1126
11	Gelandangan	-
12	Pengemis	-
13	Pelumung	-
14	Kelompok Minoritas	-
15	Ex Napi	-
16	Penyandang HIV	-
17	Korban NAPZA	-
18	Korban Traficking	-
19	Korban Tindak Kekerasan	27
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	-
21	Korban Bencana Alam	-
22	Korban Bencana Sosial	-
23	Wanita Rawan Sosial	585
24	Keluarga Fakir Miskin	16.313
25	Keluarga Masalah Sosial Psikologis	-
26	Komunitas Adat Terpencil	-

Sumber : Dinas Sosial Tulang Bawang Barat

Berbagai PMKS diatas menjadi prioritas yang ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Barat karena merupakan urusan wajib layanan dasar. Selama ini program yang diterapkan untuk mengatasi masalah ini adalah Program Pemberdayaan Sosial, Program Pemeliharaan anak terlantar, Program Pendataan PMKS dan Program Program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan Sosial.

2) Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Pembangunan bidang ketenagakerjaan dewasa ini masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain tingginya pencarikerja (penganggur), terbatasnya penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, serta rendahnya produktivitas kerja. Pelaksanaan urusan ketenaga kerjaan diarahkan sebagai upaya pengurangan pengangguran dan melindungi tenaga kerja maupun perusahaan. Angka pengangguran adalah salah satu indikator penting untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat, sehingga menjadi ukuran kinerja pemerintah.

a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

Untuk mengetahui banyaknya jumlah angkatan kerja yang dapat diserap oleh pasar kerja, dipakai suatu ukuran yang dinamakan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). TPAK dari tahun 2011 mengalami peningkatan hingga tahun 2015, hal ini berarti terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja yang dapat diserap oleh pasar kerja. Perkembangan TPAK tahun 2013-2017 dapat dilihat dalam Tabel 2.31.

Tabel 2.31.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	66,98	65,53	67,95	69,61	67,83

Sumber : Indikator Tenaga Kerja Provinsi Lampung 2013,2014,2015,2016, 2017

b) Pengangguran.

Pengangguran terbuka adalah penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan saat ini sedang aktif mencari pekerjaan, termasuk mereka juga yang pernah bekerja atau sekarang sedang dibebas tugaskan sehingga menganggur dan sedang mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka adalah ukuran yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan (disajikan dalam Tabel 2.32.). Tingkat pengangguran terbuka dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, tetapi data tahun 2014-2015 menunjukkan tingkat pengangguran yang menurun.

Tabel 2.32.
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2012 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Uraian	2013	2014	2015	201	2017
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,61	5,13	2,60	2.60	1,72

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

c) Tingkat Kesempatan Kerja

Tingkat kesempatan kerja adalah peluang seseorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Tingkat kesempatan kerja menggambarkan kesempatan seseorang untuk terserap pada pasar kerja. Tingkat kesempatan kerja dari tahun 2013 hingga tahun 2017 mengalami perkembangan yang fluktuatif (disajikan dalam Tabel 2.33).

Tabel 2.33.
Tingkat Kesempatan Kerja Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Bekerja	120.544	117.621	126.712	126.712	139.818
Angkatan Kerja	125.055	123.978	130.111	130.111	142.264
Tingkat Kesempatan Kerja	**96,39%**	**94,87%**	**97,39%**	**97,39%**	**98,28%**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Terkait dengan pemberdayaan perempuan dan anak, pemerintah berupaya untuk memberikan hak yang sama dalam pembangunan melalui upaya kesetaraan gender. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang kemudian ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Permendagri 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 mengamanatkan pengintegrasian isu gender dalam berbagai bidang pembangunan, pembentukan kelembagaan PUG serta dukungan

pembiayaan pembangunan yang *responsive gender*. Selain itu juga telah diamanatkan Standar Pelayanan Minimal urusan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak. Pelaksanaan SPM tersebut merupakan konsekuensi pelaksanaan program pembangunan yang responsif gender dan responsif anak.

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan *responsive* gender dengan menggunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau *Gender Development Index* (GDI) dengan nilai minimal 40 dan terbesar 80. IPG merupakan IPM yang terpilah antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG, berdasarkan BPS (2016) pada tahun 2013 IPG Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 64,23 dan di peringkat 275 se Kabupaten/Kota di Indonesia. Selanjutnya tingkat sumbangan pendapatan terhadap keluarga sebesar 69.01 : 30.93 (laki-laki : perempuan).

c. Pangan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhi nya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yangc ukup,baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan di suatu daerah mencakup empat komponen, yaitu: (1) kecukupan ketersediaan pangan; (2) stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun; (3) aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan; dan (4) kualitas/keamanan pangan. Pencapaian kinerja urusan pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2015-2018 disajikan pada Tabel 2.34

Tabel 2.34.
Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2014 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Ketersediaan pangan utama	Kg/kap	133.470	324.539	428,157	240	142
2	Ketersediaan Energi Per Kapita	Kkal/kap / hari	450	950	950	2650	2550
3	Ketersediaan Protein Per Kapita	gram/kap / hari	35	50	55	46,6	47
4	Skor PPH	-	2	5	7	82,6	84
5	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	80	85	90	80	85
6	Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	75	80	90	80	90

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2018

d. Pertanahan

Sesuai pasal 2 ayat 2 Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam bidang pertanahan sebagai berikut:

a) Pemberian izin lokasi yang meliputi: (a) izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal; (b) perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku; dan (c) penanaman modal adalah yang menggunakan maupun tidak menggunakan fasilitas penanaman asing maupun penanaman modal dalamnegeri.
b) Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan. Pengadaan tanah adalah kegiatan untuk memperoleh tanahbaik dengan cara memberikan ganti kerugian maupun tanpa memberikan ganti kerugian (secarasukarela).
c) Penyelesaian sengketa tanah garapan. Sengketa tanah garapan adalah pertikaian ataupun perbedaan kepentingan dari dua pihak atau lebih atas tanah garapan.
d) Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Ganti kerugian adalah penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain

yang terkait dengantanah akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian tersebut atau bentuk lain.

e) Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* yang menjadi tanah *objeklandreform*.

f) Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong. Tanah kosong adalah tanah yang dikuasai hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai tanah, hak pengelolaan, atau tanah yang sudah diperoleh dasar penguasaannya tetapi belum diperoleh hak atas tanahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebagainya, yang belum dipergunakan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya atau Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku.

g) Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong. Tanah kosong adalah tanah yang di kuasai hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai tanah, hak pengelolaan, atau tanah yang sudah diperoleh dasar penguasaannya tetapi belum diperoleh hak atas tanahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebagainya, yang belum dipergunakan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya atau Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku.

h) Pemberian izin membuka tanah. Diartikan sebagai izin yang diberikan kepada seseorang untuk mengambil manfaat dan mempergunakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

i) Perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Hal ini diartikan merupakan pelaksanaan dan penetapan letak tepat rencana kegiatan yang telah jelas anggarannya baik dari pemerintah, swasta maupun perorangan yang akan membutuhkan tanah di wilayah Kabupaten/Kota tersebut berdasarkan data informasi pola penatagunaan tanah yang sesuai dengan kawasan rencana tata ruang wilayah. Adapun pola penatagunaan tanah adalah informasi mengenai keadaan

penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan kawasan yang disiapkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Pembangunan dan penataan pertanahan menjadi sesuatu hal yang penting untuk dikembangkan menjadi lebih baik karena mempunyai peranan sosial dan ekonomi yang penting. Oleh karena itu, untuk dapat menguatkan dan membuktikan kepemilikan akan tanah perlu dibuatkan alat bukti berupa sertifikat tanah. Sertifikat tanah terdiri atas Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP), Hak Pengelolaan, dan Wakaf.

e. Lingkungan Hidup

Kinerja urusan lingkungan hidup Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat dari kinerja pengelolaan persampahan, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dalam pengelolaan sampah kegiatan yang dilakukan terdiri atas pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan dan daur ulang. Indikator kinerja yang ditunjukkan dalam penanganan sampah di Kabupaten Tulang Bawang Barat ditunjukkan melalui pengelolaan persampahan. Sampai pada tahun 2014, kinerja penanganan sampah di Kabupaten Tulang Bawang Barat baru mencapai 10,39% (Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang Barat, 2014).

Berdasarkan analisa daya dukung wilayah, konsep untuk penanganan persampahan adalah pengelolaan sampah secara terpadu, meliputi: (1) Proyeksi kebutuhan prasarana persampahan; (2) *Sanitary landfill* dan *open dumping* di Tempat Pembuangan Akhir (TPA); (3) *Zero waste* atau program 3R, selengkapnya diuraikan pada Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Penanganan sampah di KabupatenTulang Bawang Barat dilakukan oleh dinas lingkungan hidup. Pengelolaan fasilitas Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) harus yang layak, baik

secara teknis maupun non teknis .Keberadaan TPSA selain dapat menampung timbulan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah tersebut.

Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki satu buah TPSA yaitu TPSA Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terletak di Tiyuh Penumangan di Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Jumlah total timbunan sampah yang dihasilkan adalah sebanyak 4.475 m^3 per hari. Dari jumlah tersebut, yang tertangani/terangkut ke TPSA hanya sebesar 979 m^3 per hari (21,87%). Dengan demikian masih tersisa sampah sebanyak 78,13% yang belum terangkut/terbuang ke TPSA. Berikut adalah kinerja pengelolaan persampahan di KabupatenTulang Bawang Barat dalam kurun waktu tahun 2015-2017 disajikan dalam Tabel 2.35.

Tabel 2.35.
Kinerja Pengelolaan Persampahan
Tahun 2015 s.d. 2017 Kab. Tulang Bawang Barat

No	Indikator	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Persentase penanganan sampah (%)	21,88	32,87	33,51
2	Rasio Ketersediaan Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk (%)	0,06	0,07	0,08

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tulang Bawang Barat

Berdasarkan analisa daya dukung wilayah, rekomendasi yang dapat diusulkan untuk penanganan limbah dan sanitasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah dengan konsep Sanitasi berbasis Masyarakat (Sanimas) yaitu pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Sanimas dapat meliputi kegiatan: (1) Sosialisasi kegiatan dan persiapan-persiapan; (2) Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan; (3) Pemantauan dan evaluasi di tingkat masyarakat; (4) Pemanfaatan/penggunaan; (5) Pemeliharaan fasilitas sanitasi; dan (6) Instansi Pengolah Air Limbah (IPAL).

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan administrasi kependudukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang pemerintahan dalam negeri meliputi (1) Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga; (2) Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk; (3) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran; dan (4) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian.

Berkut data tentang kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2017 yaitu pada tabel dibawah ini 2.46 :

Tabel 2.36.
Persentase Penduduk Yang Memilik Catatan Sipil
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017

No	***Penduduk Memiliki Catatan Sipil***	***2017 (%)***
1	Penduduk usia 0 – 17 dengan kepemilikan akte kelahiran	
	a. Ya, Dapat ditunjukkan	74,85
	b. Ya, Tidak dapat ditunjukkan	16,79
	c. Tidak Memilika	8,36
	d. Tidak Tahu	0,00
2	Penduduk 5 tahun keatas yang mempunyai nomor induk kependudukan berdasarkan jenis kelamin	
	a. Laki – laki	99,8
	b. Perempuan	98,29
3	Penduduk 5 tahun keatas yang mempunyai KTP dan KK	
	a. KTP	47,92
	b. KK	50,86

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2018

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh (Desa)

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Suatu usahanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek. Di sini subjek merupakan motor penggerak, dan bukan

penerima manfaat atau objek saja. Rukun Warga atau Rukun Tetangga (RW/RT) sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat hendaknya didorong untuk lebih berperan dalam penyelenggaraan proses pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasinya. Selain RT/RW, PKK menjadi aktor lain yang juga perlu mendapat perhatian. Hasil kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan tiyuh tahun 2012-2017 disajikan pada Tabel 2.37.

Tabel 2.37.
Hasil Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan TiyuhTahun 2013 s.d. 2018 Kab. Tulang Bawang Barat

No	Indikator	Capaian				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Persentase PKK aktif(%)	85	100	100	100	100
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (kelompok)	93	93	93	103	4391
3.	Persentase Posyanduaktif (%)	65	75	80	95	100
4.	Persentase LPMBerprestasi (%)	15	25	25	25	35
5.	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	1,5	2	3,5	4	6
6.	Persentase Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (%)	80	87	89	90	93

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh Kabupaten Tulang Bawang Barat

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja pengendalian penduduk dan keluarga bencana Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat diukur dengan beberapa indikator pencapaian kinerja dengan ketersediaan data yang dapat dilihat dari tahun 2012 hingga 2017, disajikan pada Tabel 2.38.

Tabel 2.38.
Pencapaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2014 s.d. 2018 Kab. Tulang Bawang Barat

No	Indikator	Capaian				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Rata-rata jumlah anak per Keluarga	1,62	1,69	1,63	1,63	1,62
2.	Rasio akseptor KB	65,26	69,29	68,29	73,8	76,08

No	Indikator	Capaian				
		2014	2015	2016	2017	2018
3.	Cakupan peserta KB aktif(%)	68,89	64,02	71,20	73,87	76,08
4.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinyadibawah usia 20 tahun (%)	15,49	15,38	15,34	15,33	15,28
5.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidakterpenuhi (*UnmetNeed*) (%)	19,30	17,49	18,33	15,72	12,28
6.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun	51,00	76,00	74,00	73,01	72,00
7.	Angka pemakaiankontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (semua cara dan caramodern) (%)	68,80	60,02	67,98	73,87	76,08
8.	Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%)	55,67	56,09	54,99	55,01	55,1
9.	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yangber-KB (%)	70,55	70,69	70,81	80,89	85,47
10.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	82,88	83,09	83,12	83,3	83,4

Sumber : Dinas Kependudukan Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2019

i. Perhubungan

Pembangunan infrastruktur jaringan transportasi mempunyai peran penting. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat dukungan antarwilayah maupun pemerataan pembangunan wilayah. Transportasi mendukung perkembangan kota dan wilayah sebagai sarana penghubung maupun titik simpul distribusi. Rencana tata guna lahan kota dan wilayah harus didukung secara langsung oleh rencana pola jaringan jalan yang merupakan rincian tata guna lahan yang direncanakan. Pola jaringan jalan yang baik akan mempengaruhi perkembangan kota dan wilayah yang direncanakan sesuai dengan rencana tata guna lahan. Hal ini berarti transportasi mendukung penuh perkembangan fisik suatu

kota atau wilayah. Fasilitas perlengkapan jalan yang tersedia di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2013-2017 disajkan dalam Tabel 2.39.

Tabel 2.39.
Perlengkapan Jalan yang Tersedia Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No.	Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rambu	Unit	250	185	226	109	
2	*Guardrail*	Unit	200	136	TAD	TAD	
3	Penerangan Jalan Umum	Unit	88	100	117	400	

Keterangan : TAD = Tidak Ada Data
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2018

j. Komunikasi dan Informasi

Pembangunan dalam urusan komunikasi dan informasi selama tahun 2011 hingga 2017 terus mengalami kemajuan yang ditandai oleh indikator pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi, serta kerjasama informasi dan media massa. Jumlah jaringan komunikasi hingga tahun 2016 terus meningkat baik dalam jumlah maupun kualitas pelayanannya. Sebagian besar masyarakat telah menikmati layanan jaringan komunikasi baik milik pemerintah maupun milik swasta.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah memiliki *website* dengan alamat http://www. Tulang bawang barat kab.go.id/. *Website* tersebut dapat dikunjungi oleh semua pihak. Adapun Web tersebut berisi tentang profil Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Visi dan Misi, Sejarah, Arah Kebijakan, Isu Strategis, Peta Wilayah, Lambang Wilayah, Demografis dan Geografis, Keperintahan, Pendidikan, Pariwisata, Pelayanan Umum, Badan Kepegawaian Daerah, LPSE, SKPD, Info Lelang, dll. Namun demikian informasi pada beberapa hal pokok tidak tersedia data secara lengkap dan *update* sehingga belum mencerminkan gambaran umum wilayah secara lengkap dan terkini sedangkan belum semua organisasi perangkat daerah memiliki *website*.

Surat kabar yang terbit di Tulang Bawang Barat yaitu Lampung

Post, Radar, dan Tribun serta beberapa surat kabar nasional. Mayoritas masyarakat telah memiliki radio dan TV. Jumlah wartawan media cetak dan elektronik cukup tersedia dan hubungan antara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan institusi media cetak dan elektronik cukup baik, terbukti dengan seringnya liputan berita yang dilakukan oleh media cetak dan elektronik terutama tentang program pembangunan di wilayah tersebut. Indikator kinerja pengembangan komunikasi, Informasi dan media massa tahun 2012- 2017 disajikan pada Tabel 2.40.

Tabel 2.40.
Kinerja Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Tahun 2013 s.d. 2017 Kab. Tulang Bawang Barat

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah jaringan komunikasi	Jaringan	TAD	TAD	50	60	
2	Website milik pemerintahdaerah	Web	TAD	1	1	1	
3	Rasio wartel/warnet	%	TAD	TAD	13	15	
4	Jumlah surat kabar nasional/lokal	Buah	80	89	92	111	
5	Jumlah penyiaran radio/TV	Siaran	TAD	TAD	5	5	
6	Jumlah Wartawan Media Cetak & Elektronik (L/P)	Orang	TAD	TAD	TAD	130	
7	Jumlah Penyediaan Informasi bagi tamu	Buah	TAD	TAD	4	4	

Keterangan : TAD = Tidak Ada Data
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. TBB, 2018

k. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Peran koperasi, usaha mikro dan kecil sangat penting dalam pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Belum semua koperasi yang ada beroperasi secara aktif. Permasalahan pengembangan usaha masih mewarnai dinamika organisasi koperasi. Usaha mikro dan kecil masih perlu ditingkatkan secara signifikan, hal ini perlu ditunjang dengan upaya peningkatan jumlah enterpreneur. Jumlah usaha mikro dan kecil dengan katagori sehat perlu ditingkatkan demikian juga dengan jumlah

koperasi yang sehat perlu ditingkatkan. Indikator kinerja yang memiliki persentase peningkatan terbesar dari tahun 2011 sejumlah hingga 2015 yaitu indikator kinerja jumlah UMKM dengan jumlah peningkatan sebesar 38,40%. Indikator pencapaian kinerja urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel 2.41.

Tabel 2.41.
Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Tahun 2013 s.d. 2017 Kab. Tulang Bawang Barat

No	Indikator	Capaian				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Koperasi aktif (%)	41	40	38	39	44,3
2	Usaha Mikro dan Kecil Kategori Sehat (%)	48	43	40	38	32,2
3	Jumlah UMKM (Unit)	2.876	3.028	3.290	3.438	3.603
4	Koperasi yang ada(Unit)	143	142	141	141	124
5	Koperasi sehat (Unit)	26	24	24	22	27

Sumber : Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan
Kab. Tulang Bawang Barat, 2018

l. Penanaman Modal

Ketersediaan modal merupakan salah satu faktor penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Peningkatan modal sangat ditentukan oleh tersedianya informasi peluang usaha terutama usaha unggulan, kegiatan promosi peluang penanaman modal, sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha, peningkatan jumlah investor berskala nasional dan internasional, tersedianya sistem perizinan yang efisien dan efektif serta modern.Pola investasi PMDN belum nyata terlihat mampu menggerakkan perekonomian lokal masyarakat daerah, hal ini ditunjukkan dengan jenis investasi PMDN yang terkonsentrasi pada sektor perkebunan dan olahan awal hasil perkebunan belum kepada capaian produk industri hilir.

Untuk meningkatkan daya tarik investor, Pemerintah Daerah perlu melakukan promosi tentang potensi daerah serta kemudahan-kemudahan yang akan diberikan kepada investor. Peningkatan jumlah investor dan nilai investasi berarti akan meningkatkan

aktifitas ekonomi di wilayah Kabupaten tulang Bawang Barat yang dapat berdampak kepada peningkatan daya serap lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Capaian indikator penanaman modal tahun 2013-2017 Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada Tabel 2.42.

Tabel 2.42.
Capaian Indikator Penanaman Modal Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	Investor	92*	8	14	4	27
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	Rp (juta)	94.496.	36.753	38.407	2.138	12.675

Sumber Dinas PMPPTSP

m. Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan dan olahraga merupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang diserahkan oleh pemerintah pusat. Ketentuan yang disebutkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 menyebutkan bahwa yang dimaksud pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan dan bertujuan untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi

kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka pembangunan kepemudaan memiliki peran strategis dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan tinggi rasa nasionalismenya. Kegiatan dalam rangka pembinaan kepada pemuda dan kegiatan kepemudaan secara langsung dapat meningkatkan daya kreatif dan inovatif pemuda dan membiasakan kepada pemuda untuk selalu peka terhadap perkembangan jaman dan perkembangan lingkungannya.

Kegiatan kepemudaan diarahkan untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun diri, masyarakat, bangsa, dan negara. Jenis kegiatan kepemudaan yangtelah dilaksanakan antara lain, terkait dengan bidang pendidikan politik dan demokratisasi; sumberdaya ekonomi; kepedulian terhadap masyarakat; ilmu pengetahuan dan teknologi; olahraga, seni, dan budaya; kepedulian terhadap lingkungan hidup; pendidikan kewirausahaan; dan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.Jumlah sarana olahraga di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 hingga 2017 disajikan pada Tabel 2.43.

Tabel 2.43.
Jumlah Sarana Olahraga Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Gedung Olahraga (unit)	33	33	40	80	80
2.	Lapangan olahraga (unit)	210	210	225	240	254

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kab. Tulang Bawang Barat, 2018

n. Statistik

Perencanaan pembangunan yang terkait dengan statistik dapat diukur dengan 2(dua) indikator, yaitu Buku "Tulang Bawang Dalam Angka" dan "PDRB Tulang Bawang Dalam Angka". Data yang digunakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2010-2015. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah

Tulang Bawang Barat dalam menyediakan suatu dokumen perencanaan sudah baik. Akan tetapi, beberapa data masih belum tersedia dan waktu penyusunan perlu mendapatkan perhatian yang lebih karena terlambat nya waktu penyusunan penerbitan dapat berimplikasi pada proses perencanaan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

Analisis data sekunder untuk formulasi kebijakan pembangunan daerah sangat diperlukan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan pembangunan. Melalui kajian ilmiah berbasis analisis data diharapkan implementasi kebijakan tidak akan jauh hasilnya dari yang diharapkan dan simulasi anternatif kebijakan dapat disusun dengan tepat.

o. Persandian

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa urusan persandian adalah urusan pemerintahan yang bersifat wajib bagi seluruh pemerintah daerah ditingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 fungsi persandian bukan hanya sebatas kirim terima surat/berita sandi, akan tetapi diperluas sebagai pengamanan informasi.

Dalam RPJMD periode sebelumnya sebagaimana pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, persandian bukan menjadi urusan tersendiri melainkan menjadi bagian dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

p. Kebudayaan

Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan salah wilayah transmigrasi yang penduduknya didominasi dari daerah Jawa, Sunda dan Bali, sehingga Tulang Bawang Barat memiliki beberapa kebudayaan Lampung, Jawa dan Bali. Berbagai bentuk kesenian tradisi baik Lampung, Jawa dan Bali termasuk didalamnya kesenian daerah atau kesenian rakyat, dan kesenian klasik yang hingga kini eksistensinya masih diakui oleh masyarakat luas.

Nuansa Budaya Lampung, Jawa dan Bali dalam kehidupan masyarakat masih terasa sangat kental hingga saat ini. Oleh karena itu, sangat beralasan jika seni pertunjukan dan tradisi Jawa yang melekat dimasyarakat Tulang Bawang Barat perlu dilestarikan dan dikembangkan. Terlebih kesenian tradisi yang merupakan aset potensial bagi pengembangan pariwisata budaya di Tulang Bawang Barat.

Upaya memelihara dan mengembangkan kesenian tradisi yang sudah merakyat merupakan kontribusi besar dalam pembangunan budaya nasional. Halini sekaligus merupakan salah satu upaya untuk mengurangi masuk dan berkembangnya budaya asing yang sering bertentangan dengan nilai-nilai moral bangsa. Beberapa seni pertunjukan tradisi Lampung dan Jawa di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang hingga saat ini masih eksis dan berkembang di masyarakat diantaranya yaitu begawi, tari sembah, dan tari kuda lumping. Kinerja urusan kebudayaan di Kabupaten Tulang Bawang Barat bisa dilihat dari beberapa indikator, diantaranya yaitu dibangunnya pusat budaya "Balai Adat Sesat Agung". Capaian KinerjaUrusanKebudayaan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 hingga 2017 disajikan pada Tabel 2.44.

Tabel 2.44.
Capaian KinerjaUrusanKebudayaan Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Perpustakaan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Penyelenggaraan kegiatan seni (kali)	4	5	5	5	6
2.	Cakupan kajian seni (%)	65	65	70	70	80
3.	Cakupan Fasilitas Seni (%)	75	75	80	80	80

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tulang Bawang Barat, 2018

q. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan wadah dimana di dalam nya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistim tertentu dan bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam disebutkan bahwa salah satu tujuan perpustakaan adalah menyediakan wadah bagi pelestarian hasil budaya bangsa, baik berupa karya cetak, maupun karya rekam, melalui program wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan Undang-Undang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Kewajiban serah-simpan karya cetak dan karya rekam yang diatur dalam Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan "Koleksi Deposit" dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai SKPD yang baru terbentuk harus terus berupaya untuk menjalankan amanat dari undang-undang ini. Jenis koleksi karya rekam dan cetak yang disimpan dikumpulkan dari berbagai lembaga dan media, sehingga jumlah koleksi deposit yang dikumpulkan diharapakan mengalami peningkatan setiap tahunnya baik dari sisi jumlah judul maupun eksemplarnya.Agar mempermudah pengunjung dalam mencari buku dan sinopsi, maka Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah harus menotomasikan bahan pustaka dan dokumentasi yang telah dikoleksi.

Kinerja pembangunan urusan perpustakaan menurut Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu jumlah perpustakaan, tingkat kunjungan perpustakaan per tahun, dankoleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Kabupaten Tulang Bawang Barat belum memiliki perpustakaan daerah yang dapat di akses oleh masyarakat.

r. Kearsipan

Kearsipan sangat memegang peranan penting terkait dengan kelancaran sistem organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan sumber ingatan bagiorganisasi. Dengan adanya sistem kearsipan yang tertata dengan baik,maka akan memudahkan pemimpin untuk menentukan kebijakan. Kearsipan itu sendiri dapat

dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui sistem sentralisasi dimana semua arsip yang ada dari berbagai bidang (unit) disimpan dan dikelola pada satu ruangan tersendiri dan melalui sistem desentralisasi dimana arsip-arsipdibagi menurut bidangnya (unitnya) untuk kemudian disimpan dan dikelola oleh masing-masing unit pada ruangan khusus di tiap unit.

Menurut Undang-undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain arsip merupakan suatu bukti pertanggung jawaban dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga arsip perlu di kelola dan dimanfaatkan dengan baik agar keselamatan dan keamanan arsip tersebut bisa terjamin. Pemanfatan arsip yang opimal dapat dicapai melalui tahapan manajemen arsip modern yaitu perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat serta pengawasan yang ketat.

Kabupaten Tulang Bawang Barat terdapat 1 (satu) Pusat Informasi Arsip Daerah yang berfungsi menyediakan informasi tertentu bagi instansi yang membutuhkan. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan kearsipan yang lebih baik, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat berusaha untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga pengarsipan. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan arsip adalah rotasi pegawai yang telah mengikuti pelatihan SIMARDI sehingga Perangkat Daerah dan BUMD yang ditinggal kembali menerapkan proses pengelolaan arsip secara manual.

3) Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelengaraan urusan pilihan

pemerintahan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, yaitu bidang urusan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, perdagangan , perindustrian dan transmigrasi.

a. Kelauatan dan Perikanan

Kawasan yang diperuntukan untuk pengembangan usaha pembibitan dan pemeliharaan ikan air tawar dalam satu wadah (akukultur). Jenis usaha perikanan yang dikembangkan masyarakat berupa budidaya tambak rakyat dan perikanan tangkap sungai dan rawa. Jumlah rumah tangga dengan mata pencarian menangkap ikan di sungai sebesar 1.184 rumah tangga,

dengan rincian sejumlah 351 rumah tangga di rawa, 697 rumah tangga di sungai dan 121 rumah tangga di genangan air lainnya dengan sentra lokasi pengembangan di Kecamatan Tulang Bawang Udik, Tulang Bawang Tengah, Tumijajar, Pagar Dewa dan Gunung Terang.

Produksi perikanan budidaya di Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami peningkatan tajam dari tahun 2011 hingga 2017 mencapai 155%. Potensi produksi perikanan budidaya dapat menjadi alternatif mata pencaharian utama bagi penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat. Capaian produksi ini sebaiknya diimbangi dengan keberadaan pameran dan promosi produk-produk perikanan dari Kabupaten Tulang Bawang Barat. Capaian kinerja urusan perikanan tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel 2.45.

Tabel 2.45.
Capaian Kinerja Urusan Perikanan Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Produksi perikanan Budidaya	Ton	528,0	623,40	850,0	1263,62	1371,80
2.	Tingkat Konsumsi Ikan Penduduk	Kg/tahun	26,0	26,5	27,0	28,0	29,17

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2018

b. Pariwisata

Kabupaten Tulang Bawang Barat belum banyak meyediakan fasilitas penginapan yang mumpuni seperti hotel berbintang. Penginapan yang tersedia di Kabupaten Tulang Bawang Barat masih berupa hotel melati dan penginapan lainnya. Hotel melati hanya terdapat di Kecamatan Tumijajar dan Tulang Bawang Tengah pada tahun 2016 terdata hanya terdapat 10 penginapan dengan jumlah kamar sebanyak 132 unit. Jumlah rumah makan semakin tahun meningkat dan tersebar di 8 kecamatan, terdata pada tahun 2016 sebanyak 108 unit dengan jumlah tenaga kerja 553 orang (Tulang Bawang Barat dalam Angka 2017).

Dalam hal pariwisata, jumlah objek wisata terdiri dari objek wisata sejarah, alam dan budaya. Sampai tahun 2016 jumlah objek pariwisata Berikut jenis dan lokasi objek wisata di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Objek wisata Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada Tabel 2.46.

Tabel 2.46.
Objek wisata Kabupaten Tulang Bawang Barat

No.	Jenis Objek Wisata	Objek Wisata	Kecamatan
1.	Wisata Budaya	Benteng Karang Talang Benteng Sabuk	TBU
2.	Wisata Buatan	Water Boom	Tumijajar
3.	Wisata Buatan	Pemancing	
	Wisata Budaya	Makam Minak Indah/ Tuan Rio Sanak	TBT
4.	Wisata Alam	Bawang Lambu Way Tulang Bawang	
5.	Wisata Budaya	Makam Tuan Rio mangku Bumi(Raja Tulang Bawang) Makan Tuan Rio Cikai Dilangek (Hulubalang kerajaan Tulang Bawang) Makam Prajurit Hidayatullah (Putra Mahkota) Makam Tubagus Buang Makam Tubagus Minak Saleh	Pagar Dewa

Sumber : RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat

Selanjutnya capaian kinerja urusan pariwisata Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2013 hingga 2017 disajikan pada Tabel 2.47.

Tabel 2.47.
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Indikator	Satuan	Capaian

			2013	2014	2015	2016	2017
1	Kunjungan wisatawan domestik	Orang	236	325	415	506	1975
2	Persentase objek wisata yang dipromosikan	%	13	26	39	47	90
3	Jumlah Objek wisata unggulan	Objek	4	5	6	8	13
4	Jenis kelas dan jumlah restoran	Unit	18	19	25	36	48

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2018

Berdasarkan tabel diatas, Jumlah kunjungan wisatawan domestik di Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2013 hingga 2017 meningkat tiap tahunnya, dari 236 orang pada tahun 2013 meningkat hingga 1975 orang pada tahun 2017. Hal ini sejalan dengan peningkatan promosi objek yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Promosi yang dilakukan dari hanya 13% pada tahun 2013 meningkat menjadi 90% pada tahun 2017. Berdasarkan hal ini terbukti bahwa promosi objek wisata menjadi hal paling penting dalam meningkatkan kinerja urusan pariwisata di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Peningkatan jumlah objek wisata unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadi 13 lokasi objek wisata pada tahun 2017 juga menjadi indikator dalam peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang didukung oleh peningkatan keberadaan jumlah restoran

c. Pertanian

Urusan sektor pertanian mencakup sub sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan hortikultura. Luas lahan lahan sawah (sawah irigasi dan tadah hujan) di Tulang Bawang Barat sebesar 12.178 Ha. Menurut data Dinas Pertanian melalui Sensus Pertanian Lahan, Perkebunan dan Kehutanan, areal tanaman perkebunan rakyat di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2016 seluas 41.664 Ha. Karet merupakan komoditi hasil perkebunan yang mendominasi luas areal tersebut seluas 42.274 Ha dari total luas lahan perkebunan rakyat.

Potensi sub sektor tanaman pangan khususnya tanaman padi di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2017 cukup tinggi jika dilihat dari total luas lahan sawah baik yang beririgasi (8.127 Ha) maupun yang non irigasi (4.051 Ha) mencapai 12.178 Ha. Lahan sawah beririgasi terutama di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Tumijajar (4.211 Ha), Tulang Bawang Tengah (2.884 Ha), dan Tulang Bawang Udik (1.032 Ha). Sementara lahan sawah non irigasi tersebar di 7 kecamatan (kecuali Kecamatan Way Kenanga), terutama di Kecamatan Tulang Bawang Udik (1.558 Ha). Luas panen padi sawah tahun 2017 mencapai 61.630 Ha, sedangkan luas panen padi ladang hanya 848 Ha. Potensi sub sektor tanaman pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2017 disajikan pada Tabel 2.48.

Tabel 2.48.
Potensi Sub Sektor Tanaman Pangan Tahun 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Kriteria	Padi sawah	Padi ladang	Jagung	Ubi Kayu
1	Luas Panen (Hektar)	61.630	848	6.688	28.453
2	Produksi (Ton)	111.228	2.348	30.448	682.708
3	Produktivitas (Kuintal/Hektar)	51,45	27,69	45,58	239,94

Sumber : Lampung Dalam Angka, 2018

Luas lahan tegal/kebun di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2016 mencapai 39.210 Ha, tersebar di 8 kecamatan, terutama di Kecamatan Tulang Bawang Udik (12.932 Ha), Tulang Bawang Tengah (9.887 Ha), Gunung Terang (5.024 Ha) dan di Kecamatan Gunung Agung (3.430 Ha). Luas panen tanaman pangan lainnya didominasi oleh tanaman ubi kayu yang mencapai 29.288,5 Ha, sementara tanaman pangan seperti jagung, kacang tanah, ubi jalar dan kacang hijau, masing-masing sebesar 1.297,7 Ha, 142,9, Ha, 111,9 Ha dan 9,4 Ha tabel berikut ini :

Tabel 2.49.
Luas Panen Sub Sektor Tanaman Pangan Tahun 2016
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Kecamatan	Jagung	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Ubi Kayu	Ubi Jalar
1	Tulang Bawang Udik	149	22	3,4	7.766	21,9
2	Tumijajar	208	17	1	2.559	19,7

3	Tulang Bawang Tengah	286	33	-	8.987	43,3
4	Pagar Dewa	360	9	5	1.399	8,0
5	Lambu Kibang	-	-	-	1.789	-
6	Gunung Terang	266	55	-	4.974	10,0
7	Gunung Agung	29	6	-	1.143	9,0
8	Way Kenanga	-	1	-	670	-
	Jumlah	**1.297,7**	**142,9**	**9,4**	**29.288,5**	**111,9**

Sumber : Tulang Bawang Barat dalam Angka, 2018

Potensi sub sektor tanaman hortikultura di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2017 yang menonjol adalah tanaman cabai dengan luas tanaman mencapai 97 Ha dengan produksi 134,3 Ton yang tersebar di 6 kecamatan, dengan sentra produksi di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tumijajar, dan Pagar Dewa.

Sementara potensi produksi tanaman buah-buahan didominasi oleh pisang (29.320 Ha), mangga (8.988 Ha), pepaya (4.440 Ha), dan jeruk (1.044 Ha). Potensi sub sektor tanaman perkebunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2015 terutama didominasi oleh tanaman karet (42.274 Ha) dengan produksi 27.824 Ton, diikuti tanaman kelapa sawit (6.057 Ha) dengan produksi 14.642 Ton, kelapa dalam (416 Ha) dengan produksi 3.235 Ton, dan kopi (133 Ha) dengan produksi 414 Ton. (Tulang Bawang Barat dalam Angka, 2016). Potensi Sub Sektor Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan tahun 2017 Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada Tabel 2.50.

Tabel 2.50.
Potensi Sub Sektor Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018

No	Sub sector	2016
1	**Tanaman Hortikultura (Ton)**	
	a. Cabai	134
	b. Pisang	29.320
	c. Mangga	9.531
	d. Pepaya	4.454
	e. Jeruk	1.383
	f. Nanas	655
2	**Tanaman Perkebunan (Ton)**	
	a. Karet	27.428

No	Sub sector	2016
	b. Kelapa Sawit	4.152
	c. Kelapa Dalam	226
	d. Kopi	366
	e. Tebu	18.251

Sumber : Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Angka 2018

Potensi sub sektor peternakan di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2016 didominasi oleh kambing (61.925 ekor) dengan sentra di Kecamatan Gunung Terang dan Tulang Bawang Tengah. Sedangkan populasi sapi potong sebanyak (17.900 ekor) yang tersebar di 8 kecamatan, sebaran ternak kerbau hanya terdapat daerah rawa dan sepanjang sempadan sungai seperti di Kecamatan Tulang Bawang Udik dan Pagar Dewa.

Sementara populasi unggas didominasi oleh ayam buras (489.325 ekor) tersebar di 8 kecamatan, populasi terbesar kedua adalah ayam pedaging (647.144 ekor) tersebar di 4 kecamatan yaitu Tumijajar, Tulang Bawang Tengah, Lambu Kibang, dan Pagar Dewa. (Tulang Bawang Barat dalam Angka, 2017).

d. Perdagangan

Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki 156 unit perusahaan yang menjalankan usahanya. Sebanyak 12 perusahan berbentuk PT/CV dan 140 Koperasi. Jumlah koperasi sebanyak 140 yang terdiri atas 19 koperasi Unit Desa terutama di Kecamatan Tulang Bawang Tengah (7), 5 Koperasi karyawan terutama di Kecamatan Tulang Bawang Tengah (3) dan 116 bentuk lainnya (Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Angka, 2017).

Sarana perdagangan di Kabupaten Tulang Bawang Barat terdapat 23 pasar yang tersebar di setiap kecamatan, kecuali di Kecamatan Pagar Dewa dengan 4.768 pedagang yang terdaftar. Jumlah pasar tradisional dan persentase pasar yang memenuhi syarat di Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2012 hingga 2016 dengan jumlah yang sama yaitu 23 pasar dan persentase 30% pasar yang memenuhi syarat. Indikator pencapaian kinerja urusan perdagangan tahun 2012-2017 disajikan pada Tabel 2.51.

Tabel 2.51.
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Pasar Modern	Unit	0	0	0	0	0
2	Jumlah Pasar Tradisional	Unit	23	23	23	23	23
3	Cakupan bina kelompok pedagang	Kelompok	3	3	3	3	3
4	Persentase lokasi PKL yang tertata	%	0	0	0	0	0
5	Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	%	30	30	30	30	30
6	Tingkat terlindunginya konsumen	%	30	30	30	30	30

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2018

e. Perindustrian

Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki tujuh jenis industri pengolahan. Total Industri di Kabupaten Tulang Bawang Barat berjumlah 939 unit, sebagian besar merupakan industri makanan dan minuman sebanyak 295 unit atau sekitar 31 persen dari total industri dan di posisi kedua indutri kayu sebanyak 225 unit (23%). Letak unit usaha tersebut tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tulang Bawang Udik merupakan kecamatan yang memiliki jumlah unit industri terbanyak yaitu 294 unit dan kecamatan yang terendah jumlah unit usaha industri yaitu Pagardewa sebanyak 23 unit (Tulang Bawang Barat dalam Angka, 2018). Jumlah industri di Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada Tabel 2.52.

Tabel 2.52.
Jumlah Industri 2017 Kabupaten Tulang Bawang Barat

	Kecamatan/ District	Industri dari kulit *manufacture of leather*	industri dari kayu *manufacture of wood*	Industri dan Logam/ Logam mulia *manufacture of Metal/ Precious Metal*	Industri Anyaman *matting industri*	Industri Gerabah *Pottery Industry*	Industri dari kain/ Tenun *Manufacturing of Fabric/ Weaving*	Industri Makanan dan *Minuman Food & Beverage Industry*	**Jumlah / Total**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tulang Bawang Udik	-	57	8	148	13	18	50	294
2	Tumijajar	-	31	10	10	15	6	82	154
3	Tulang Bawang Tengah	2	36	15	5	21	5	80	164
4	Pagar Dewa	-	6	-	6	4	3	4	23
5	Lambu Kibang	-	45	12	4	10	7	20	98
6	Gunung Terang	-	35	9	5	34	18	12	113
7	Gunung Agung	-	6	2	4	-	4	30	46
8	Way Kenanga	1	9	3	4	8	5	17	47
	Jumlah/ Total	3	225	59	186	105	66	295	939

https://tulangbawangbaratkab.bps.go.id

Sumber : Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2018

Unit usaha industri kecil dan kerajinan rumah tangga menurut kecamatan dan jenis industri di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2018 didominasi industri makanan dan minuman (295) dan industri dari kayu (225) dari total industri kecil dan kerajinan sejumlah 939. Industri kecil yang berbahan baku dari kayu terutama di Kecamatan Lambu Kibang, Way Kenanga dan Gunung Terang. Sementara sentra industri kecil untuk makanan dan minuman terutama di Kecamatan Tumijajar, Way Kenanga, dan Gunung Agung. Pertumbuhan industri di Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada Tabel 2.65.

Tabel 2.53.
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian
Tahun 2014 s.d. 2018 Kabupaten Tulang Bawang Barat

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Pertumbuhan Industri (%)	7,41	7,66	7,80	5,27	7,33

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, 2018

4) Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Penunjang

b. Administrasi Pemerintahan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, diantaranya aspek kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan krusial yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat di dalam mengakses pelayanan dasar yaitu pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemampuan daya beli.

Selain dilihat berdasarkan tingkat kemiskinan, urusan ini juga dapat dinilai berdasarkan indikator berikut ini, Persentase

Penyelesaian Penegakan Perda. Peraturan Pemerintah RI nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP), khususnya yang tercantum pada pasal 3, menyatakan bahwa SatpolPP mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Berkaitan dengan peraturan tersebut petugas SatpolPP Kabupaten Tulang Bawang Barat telah melakukan penyelesaian atas masalah yang terkait dengan penegakan perda dan penegakan K3.

c. Perencanaan

Proses perencanaan merupakan bagian dari siklus kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan (*decision making*). Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi dalam hal ini pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Selanjutnya membuat strategi untuk mencapai tujuan, maka disusun dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Dokumen perencanaan daerah yang menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2005-2025. Pelaksanaan perencanaan tahunan RPJMD dijabarkan dalam RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setiap tahunnya. RKPD dimaksud merupakan implementasi target tahunan RPJMD. Ketersediaan dokumen tersebut dapat dilihat pada tabel 2.54. berikut ini :

Tabel 2.54.
Dokumen Perencanaan Pembangunan
Tahun 2013-2017 Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Indikator	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada

3.	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERBUB	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD (%)	100	100	100	100

Sumber : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tulang Bawang Barat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang 32 Tahun 2014 mengamanatkan untuk menyusun RPJMD bagi Kepala Daerah selambatnya 6 bulan setelah dilantik. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menetapkan RPJMD pertama tahun 2011-2016, yang telah habis masa berlakunya dan dalam proses penyusunan RPJMD yang kedua untuk tahun 2017 - 2022.

d. Keuangan

Dari sisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan beberapa kebijakan mengenai keungan yaitu kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

a) Sumber Pendapatan

Pendapatan daerah berasal dari 3 (tiga) sumber penerimaan yaitu : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan yang Sah.

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain PAD yang Sah.

2) Dana perimbangan

Dana perimbangan terdiri dari : Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus. Sedangkan, Lain-Lain Pendapatan yang Sah terdiri dari : hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lain, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Untuk pos pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi :

1. Dana darurat; merupakan dana yang diterima dari pemerintah dan bantuan uang dan barang dari badan atau lembaga tertentu untuk penanggulangan bencana alam yang disalurkan melalui pemerintah daerah dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Hibah; uang maupun barang dan/atau jasa yang dianggarkan dalam APBD dan didasarkan atas naskah perjanjian hibah daerah. Sumbangan pihak ketiga; merupakan sumbangan yang diterima dari organisasi/lembaga tertentu/perorangan atau pihak ketiga yang tidak mempunyai konsekuensi pegeluaran maupun pengurangan kewajiban pihak ketiga/pemberi sumbangan.
3. Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah; termasuk dana penyesuaian dan dana otonomi khusus.

b) Target Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
    1. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

2. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing sektor penyumbang pendapatan serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2018 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

Untuk itu, pemerintah daerah harus terus melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat tren peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 secara nasional meningkat.

Untuk Kabupaten Tulang Bawang Barat, peningkatan yang bersumber dari pajak daerah mulai dari Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 rata-rata sebesar 20,38 % data disajikan pada Tabel 2.55.

Tabel 2.55.
Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Daerah
Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2014 s/d 2018

No	TAHUN	TARGET PAJAK DAERAH (Rp)	REALISASI PAJAK DAERAH (Rp)	PERKEMBANGAN REALISASI	
				(Rp)	(%)
1	2014	6.463.163.450,00	6.788.944.967,00		
2	2015	7.295.000.000,00	7.309.449.591,00	520.504.624,00	7,67
3	2016	7.858.500.000,00	8.168.766.399,00	859.316.808,00	11,75
4	2017	9.666.000.000,00	10.351.767.923,50	2.183.001.524,50	26,72
5	2018	12.106.000.000,00	14.017.374.388,50	3.665.606.465,00	35,41

Selanjutnya, tren komposisi realisasi PAD pada Tahun 2014 sampai dengan 2018 dilihat dalam tabel dibawah ini

Tabel 2.56
Komposisi Realisasi PAD Tahun 2014 - 2018

No	TAHUN	TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH (Rp)	REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (Rp)	PERKEMBANGAN REALISASI	
				(Rp)	(%)
1	2014	19.812.247.500,00	15.436.104.690,50		
2	2015	22.208.000.000,00	23.890.048.760,26	8.453.944.069,76	54,76%

3	2016	29.235.329.180,00	21.857.024.136,63	-2.033.024.623,63	-8,51%
4	2017	61.931.599.221,00	56.213.354.797,15	34.356.330.660,52	157,2%
5	2018	32.359.786.824,37	27.611.116.135,77	-28.602.238.661,38	-50,88%

b. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :

Memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

Untuk perolehan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang belum menunjukkan kinerja yang memadai *(performance based)*, karena tidak memberikan bagian laba atas penyertaan modal tersebut, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus melakukan antara lain langkah-langkah penyehatan perusahaan daerah tersebut, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi.

c. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

1. Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
2. Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya
3. Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

2) Dana Perimbangan

Dana perimbangan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum. Dan penetapan target Dana Perimbangan ditetapkan atas indikator yang terukur, seperti data yang disajikan dibawah ini terkait dengan target dan realisasi Dana perimbangan Tahun 2013 s/d 2018 data disajikan dalam Tabel .

Gambar. 2.57
Target dan Realisasi Dana Perimbangan
Tahun 2013 s.d. 2018

TAHUN	TARGET	REALISASI
2014	512,800,259,417.00	509,035,368,273.00
2015	641,043,619,000.00	639,676,600,218.00
2016	818,719,968,834.00	715,404,583,663.00
2017	670,354,955,317.00	674,301,172,719.09
2018	727.232.130.000,00	725.406.877.464,00

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):
    a. Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN dan dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH Pajak selama 3 (tiga) tahun terakhir.
    b. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota dan dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH-CHT selama 3 (tiga) tahun terakhir.
    c. Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi,

DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA.

d. Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai Alokasi Transfer ke Daerah dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):

Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN, berikut adalah gambaran DAU Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Tabel 2.58.
Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)
Tahun 2014 s.d. 2018

TAHUN	TARGET	REALISASI
2014	424,389,404,000.00	424,389,404,000.00
2015	442,703,859,000.00	442,703,859,000.00
2016	464,431,679,000.00	464,431,679,000.00
2017	461,031,611,000.00	459,231,176,000.00
2018	463.478.442.000,00	463.478.442.000,00

3. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):

DAK dan/atau DAK Tambahan dianggarkan sesuai Peraturan Presiden yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan, setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI.

Tabel 2.59
Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)
Tahun 2014 s.d. 2018

TAHUN	TARGET	REALISASI
2014	50,444,530,000.00	50,444,530,000.00
2015	175,081,630,000.00	175,081,630,000.00
2016	334,968,747,000.00	231,757,814,915.00
2017	182,579,332,441.00	178,477,408,444.00

2018	239.852.920.000,00	237.255.143.339,00

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah.
2. Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.Penganggaran Dana Otonomi Khusus dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khs.

2.1.4. Aspek Daya Saing

Aspek Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasandan keunggulan daerah. Daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Daya saing daerah didefinisikan oleh *Centrefor Regionaland Urban Studies* (CURDS), Inggris sebagai kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya. Daya saing daerah menilai kemampuan suatu daerah untuk bersaing dengan daerah lain dalam memproduksidan memasarkan barang dan jasanya.

Daya saing daerah menjadi salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah yang disesuaikan dengan potensi, kekhasan, dan unggulan dari daerah itu sendiri. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Sejalan denga paradigma baru di era globalisasi, iptek menjadi faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas hidup suatu bangsa. Implikasi paradigma ini adalah terjadinya proses transisi perekonomian dunia yang semula berbasiskan pada sumber daya alam menjadi perekonomian yang berbasiskan pengetahuan (*Knowledge BasedEconomy*/KBE). Pada KBE, kekuatan bangsa diukur dari kemampuan iptek sebagai faktor primer ekonomi menggantikan modal, lahan dan energi untuk peningkatan daya saing.

Salah satu cara untuk meningkatkan daya saing adalah dengan memperkuat sistem inovasi daerah (SIDa). Sistem ini diharapkanakan mampu membangkitkan kreatifitas dan inovasi yang diperlukan, agar produk-produk Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat bersaing secara langsung dengan produk daerah/negara lain,baik di pasar domestik maupun internasional.

A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) per Kapita adalah salah satu komponen utama dalam penghitungan Produk Domestik Bruto. Pada tahun 2014, PKRT menyumbang lebih dari separuh dalam PDB Indonesia yaitu sebesar 56,07 persen. Pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan (ekonomi) penduduk, dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan atau semakin tinggi persentase pengeluaran untuk bukan makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Persentase pengeluaran rumah tangga untuk kelompok bukan makanan dari tahun 2017 sebesar 44,90%, selanjutnya persentase pengeluaran bukan makanan dari tahun 2013 sebesar 45,19%,

sehingga dapat dilihat bahwa terjadi penurunan persentase dari tahun 2013 hingga ke 2017 sebesar 0,29%. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa tingkat kesejahteraan (ekonomi) penduduk semakin tinggi.

PKRT per kapita diketahui dengan membagi jumlah pengeluaran konsumsi RT dengan jumlah RT. PKRT per kapita di Provinsi Lampung tahun 2013 hingga 2017 dengan rasio mencapai 10,43 pada tahun 2017, selengkapnya disajikan pada Tabel 2.66.

Tabel 2.60.
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita
Tahun 2013 s.d. 2017 Provinsi Lampung

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Total Pengeluaran RT	573.634	628.509	741.206	789.061	849.293
2	Kelompok Makanan	314.408	340.844	382.368	412.617	467.940
3	Kelompok Bukan Makanan	259.226	287.665	358.838	376.444	381.353
4	Jumlah RT	69.801	71.121	72.409	73.863	75.621
	Rasio	**8,22**	**8,84**	**10,24**	**10,68**	**10,43**

Sumber : Lampung dalam Angka 2014-2018

2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Secara konsepsional NTP mengukur kemampuan tukar komoditas produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga petani dan keperluan mereka dalam menghasilkan produk pertanian. Jika nilai NTP pada waktu tertentu lebih besar dari 100 persen, berarti kesejahteraan petani pada saat itu lebih baik dibandingkan dengan tahun dasar dan sebaliknya. Nilai Tukar Petani di Provinsi Lampung disajikan pada Tabel 2.67, dapat dilihat bahwa NTP Provinsi Lampung pada tahun 2013 berada diatas 100 sehingga dapat diartikan bahwa kesejahteraan petani lebih baik.

Tabel 2.61.
Nilai Tukar Petani Tahun 2013 s.d. 2015
Provinsi Lampung

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Indeks yang diterima Petani (It)	106,7	115,62	121,35	130,32	136,06
2	Indeks yang dibayar Petani (Ib)	104,82	110,98	117,59	123,97	126,74
	Rasio	**102**	**104**	**103**	**105**	**107**

Sumber : Lampung dalam Angka, 2014-2018

3. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; transportasi dan komunikasi; restoran dan hotel serta lainnya. Persentase konsumsi rumah tangga non pangan di Provinsi Lampung Tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel 2.68.

Tabel 2.62.
Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan per Kapita Tahun 2013 s.d. 2017 Provinsi Lampung

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Total pengeluaran RT non pangan	259.226	287.665	358.838	376.444	381.353
Total pengeluaran	573.634	628.509	741.206	789.061	849.293
Pengeluaran RT non pangan (%)	**45,19**	**45,77**	**48,41**	**47,71**	**44,90**

Sumber : Lampung dalam Angka 2014-2018

B. Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

1) Kawasan Rawan Bencana

Secara geografis, bencana alam yang berpotensi terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah banjir. Berdasarkan kapasitas drainasenya, Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri atas tiga kelompok, yaitu kawasan yang tidak pernah tergenang, kadang-kadang tergenang, dan terus menerus tergenang. Kawasan yang tergolong sering tergenang, adalah daerah dengan topografi rawa dan bantaran sungai.

Potensi banjir dapat terlihat dari sistem lahan yang terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu sistem lahan rawa dan bantaran sungai Tulang Bawang. Sungai Way Kanan dan Way Kiri terdapat di Kecamatan Gunung Terang, Pagar Dewa, Tulang Bawang Tengah dan Kecamatan Tulang Bawang Udik.

2) Bank

Jasa perbankan di Kabupaten Tulang Bawang Barat hanya dilayani oleh 7 bank. Bank tersebut terdiri atas bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional.

3) Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

Kondisi rumah tangga di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang memiliki akses terhadap air minum baku pada tahun 2017 hanya mencapai 28,1%.

4) Rumah tangga yang menggunakan listrik

Jaringan listrik di kabupaten rulang bawang barat semakin tahun semakin meningkat, pada tahun 2014 terdata sebanyak 50.407 sambungan listrik dengan persentase pelanggan listrik sebanyak 74,43% dan pada tahun 2017 jumlah pelanggan listrik meningkat menjadi 65.033 dengan persentase RT pengguna listrik sebesar 94,35%.

C. Fokus Iklim Investasi

Kondisi yang kondusif (aman dan tertib) suatu wilayahmerupakan salah satu syarat untuk menarik investasi disampingprosedur dan proses perijinan yang tepat waktu. Menurunnya angkakriminalitas dan jumlah demo serta lebih singkatnya waktupenyelesaian perijinan diharapkan dapat mendukung iklim investasidi Kabupaten Tulang Bawang Barat

Angka kriminalitas diketahui dari jumlah tindak pidana yang dilaporkan tiap 10.000 penduduk dibagi jumlah penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Angka kriminalitas di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2016 sebesar 4,27 yang merupakan angka paling tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, angka kriminalitas di Kabupaten Tulang Bawang Barat cenderung berfluktuatif. Tindak kriminal yang sering terjadi adalah pencurian dan penyalahgunaan narkoba. Namun tingkat persentase angka kriminalitas yang ditangani atau diselesaikan selama 4 tahun terakhir sebesar 100% (Tabel 2.74.).

Angka kriminalitas perlu dikendalikan agar tidak mengganggu iklim investasi. Peningkatan lapangan kerja dan meningkatkan kesadaran dan ketaan hukum untuk masyarakat sangat diperlukan. Pengembangan sistem keamanan dan ketertiban berbasis masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga iklim berinvestasi yang positif.

Tabel 2.17.
Angka Kriminalitas Berdasarkan Jumlah Tindak Pidana
Menurut Kepolisian Sektor Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Kepolisian Sektor	2013	2014	2015	2016	2017
Tulang Bawang Udik	25	20	13	24	
Tumijajar	-	-	-	-	
Tulang Bawang Tengah	15	9	12	27	
Pagar Dewa	-	-	-	-	
Lambu Kibang	12	8	5	17	
Gunung Terang	4	6	4	46	
Batu Putih	-	-	-	-	
Gunung Agung	-	-	-	-	
Way Kenanga	-	-	-	-	
Total	56	43	34	114	

Sumber : Tulang Bawang Barat dalam Angka 2018

Tabel 2.74.
Angka Kriminalitas Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah tindak pidana	56	43	34	114	
2	Jumlah penduduk	259.675	262.316	264.712	266.973	
3	Jumlah penyelesaian tindak pidana	56	43	34	114	
	Angka Kriminalitas	**2,16**	**1,64**	**1,28**	**4,27**	
	Penyelesaian Tindak Pidana (%)	**100**	**100**	**100**	**100**	

Sumber : Tulang Bawang Barat dalam Angka, 2018

Faktor yang dominan menjadi sumber konfik dan materi demonstrasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat berupa konflik agraria baik itu antara masyarakat/masyarakat adat dengan pihak perusahaan maupun antar individu pemilik lahan.

D. Fokus Sumber Daya Manusia

1) Kualitas Tenaga Kerja

Salah satu faktor penting penentu daya saing daerah adalah ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas dan kreatif. Jumlah SDM yang kreatif dalam membentuk daya saing daerah sebesar 45%. Dikarenakan ketersediaan SDM kreatif sangatlah penting. Kualitas tenaga kerja di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat dari rasio jumlah penduduk yang dapat mencapai jenjang kelulusan hingga tingkat pendidikan diploma, sarjana dan pascasarjana. Karena data SDM menurut tingkat pendidikan tidak tersedia maka didekati dengan data SDM seProvinsi Lampung.

Jumlah lulusan sarjana dan pascasarjana Universitas Lampung di Provinsi Lampung terus meningkat hingga tahun 2014, sedangkan jumlah lulusan diploma mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2012 terhadap tahun 2013 dan 2014, sehingga hal ini mempengaruhi penurunan rasio lulusan diploma. Rasio lulusan sarjana paling tinggi pada tahun 2011 yaitu 5,36 dan pada tahun 2014 menurun hingga 4,78 sejalan dengan

peningkatan jumlah penduduk. Rasio lulusan pascasarjana meningkat pada tahun 2014.

Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan Daerah Otonomi Baru yang baru berusia 8 tahun maka ketersediaan SDM terdidik, berkualitas dan kreatif masih terbatas. Oleh karena itu pengembangan lembaga pendidikan tinggi baik akademik maupun pendidikan vokasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat sangat diperlukan.

2) Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)

Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan) diketahui dari ketergantungan penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 tahun) dibagi penduduk usia produktif (penduduk yang berumur antara 15 hingga 64 tahun) dikalikan 100. Rasio ketergantungan pada tahun 2013 adalah 32 meningkat pada tahun 2017 hingga 21. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah penduduk usia tidak produktif berbanding terbalik dengan penurunan jumlah penduduk usia produktif. Tingkat ketergantungan di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel 2.76.

Tabel 2.76.
Tingkat Ketergantungan Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Penduduk Usia Tidak Produktif (<15, >64 tahun)	62.917	62.823	64.024	87.781	79.740
Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun)	192.916	194.557	198.039	176.931	170.436
Rasio	**32**	**33**	**32**	**32**	**21**

Sumber : Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Angka 2018

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan RKPD Sampai Dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2.1. Evaluasi Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah

Salah satu pengendalian dan evaluasi yang wajib untuk dilaksanakan oleh daerah adalah pengendalian dan evaluasi terhadap hasil dari pelaksanaan RPJMD. Hal ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana tingkat capaian dari pelaksanaan RPJMD tersebut dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan rencana pembangunan yang diaktualisasikan dalam kebijakan dan program tahunan dengan memanfaatkan seluruh sumberdaya pembangunan di daerah dan tetap memperhatikan konsistensi perencanaan jangka menengah dan jangka panjang. Penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang diimplementasikan dalam RKPD dilakukan melalui proses evaluasi kinerja pembangunan daerah. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien dan efektif disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas.

Pada pelaksanaan RKPD dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan per Triwulan. Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RKPD Triwulan IV akan menjadi *feedback*/ umpan balik bagi perencanaan daerah yaitu Bappeda untuk evaluasi anggaran dan capaian kinerja kegiatan SKPD sampai dengan bulan Desember 2018. Selanjutnya hasil pengendalian dan evaluasi akan menjadi salah satu input bagi penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Adapun faktor – faktor pendorong untuk keberhasilan pelaksanaan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat antara lain adalah :

a. komitmen dari masing-masing OPD untuk bisa segeramelaksanakan kegiatannya tepat waktu.
b. penjadwalan kegiatan yang sudah dilakukan sejak awal tahun oleh OPD.
c. anggaran tepat waktu.
d. SDM yang cukup memadai dan memiliki kompetensi yang tinggi.
e. mekanisme pelaporan hasil pelaksanaan tugas telah berjalan baik.
f. beberapa kegiatan yang dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga, telah selesai administrasinya.

Sedangakan untuk faktor yang kemungkinan besar dapat menjadi penghambat keberhasilan pelaksanaan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat antara lain :

a. petunjuk teknis pelaksanaan dana pusat yang terlambat
b. kegiatan pengadaan melalui pelelangan yang belum selesai dilaksanakan/ gagal lelang / membutuhkan waktu lama
c. pelaksanaan anggaran perubahan yang efektifnya hanya satu bulan
d. peraturan perundang-undangan sebagai dasar suatu kegiatan yang terkadang terlambat turun atau terjadi perubahan ditengah pelaksanaan kegiatan.

Selajutnya untuk jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh OPD (40 OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun anggaran 2018, sebagai bentuk dukungan terhadap lima prioritas pembangunan pemerintah daerah :

1. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Wilayah
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan
3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
4. Pemberdayaan Ekonomi Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Adapun evaluasi tahun 2018 yang dituangkan adalah berdasarkan realisasi anggaran yang dianggarkan untuk program dan kegiatan pada masing – masing OPD yang melaksanakan urusan yaitu sebagai berikut :

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.

Didalam proses perencanaan, perumusan masalah merupakan salah satu tahapan awal yang harus dilakukan. Pemahaman akan permasalahan yang terjadi didalam proses pembangunan daerah menjadi hal yang sangat lah vital karena melalui rumusan masalah ini kita dapat mengidentifikasi isu strategis yang akan menjadi titik tolak perencanaan pembangunan. Isu strategis ini kemudian akan berkembang menjadi prioritas pembangunan yang akan menjadi koridor dalam penyusunan program kerja daerah.

2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Adapun untuk permasalahan daerah yang berkenaan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2018 adalah sebagai berikut :

A. Prioritas dan Sasaran 1 :

Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah

Permasalahan yang ada :

1. Penataan wajah kota yang sedang dalam proses
2. Terbatasnya penyediaan kelengkapan jalan untuk daerah pedalaman / perbatasan
3. Pertumbuhan kendaraan yang tidak sebanding dengan prasana jalan
4. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap yang belum terlalu optimal
5. Akses wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah khususnya daerah pinggiran/terisolir.

B. Prioritas dan Sasaran 2 :

Peningkatan Kualitas Pendidikan

Permasalahan yang ada :

1. Kualitas sarana dan prasarana sekolah masih belum merata, kondisi fisik ruang kelas untuk kegiatan belajar terutama Sekolah-Sekolah diwilayah pengembangan masih ada yang

perlu untuk diperhatikan.

2. Kualifikasi Pendidik PAUD Non Formal yang terlatih masih belum mencapai target, karena belum terpadu.
3. Masih adanya kesenjangan mutu dan pelayanan pendidikan diantara sekolah sekolah.
4. Relevansi Pendidikan belum mengarah pada kebutuhan pasar kerja

C. Prioritas dan Sasaran 3 :

Peningkatan Pelayanan Kesahatan Masyarakat

Permasalahan yang ada :

1. Masih adanya kasus AKI
2. Persiapan Puskesmas terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional.
3. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin yang cukup tinggi.
4. Masih belum optimalnya SDM Kesehatan serta distribusi yang tidak merata di daerah.
5. Akses pelayanan kesehatan khususnya bagimasyarakat yang kurang mampu sebagian tidak mengenai sasaran yang tepat

D. Prioritas dan Sasaran 4 :

Pemberdayaan Ekonomi Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat

Permasalahan yang ada :

1. Dalam Pengembangan investasi masih sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian makro nasional;
2. Meski sudah dilakukan, namun promosi investasi masih perlu ditingkatkan (jar.Komunikasi & web).
3. Masih rendahnya kualitas pengurusan perijinan di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang ditandai dengan belum optimalnya integritas dantransparansi serta akuntabilitas pengurusan perijinan. Diperlukan adanya perbaikan tatakelola perijinan dan peningkatan budayaaparatur.

4. Belum adanya BUMD yang dimiliki Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang dapat memberikan kontribusi terhadap PAD.

E. Prioritas dan Sasaran 5 :

Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Permasalahan yang ada :

1. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan pengawasan serta pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
2. Masih terbatasnya kemampuan masyarakat dalam penggunaan teknologi tepat guna.
3. Harus segera dilakukan penyelesaian atas keterbatasan kapasitas dan kuantitas PNS, serta distribusi pegawai yang tidak merata. Hal ini justru terutama dirasakan di kelurahan dan kecamatan yang merupakan ujung tombak pelayanan ke pada masyarakat.
4. Perlu ditingkatkannya kemampuan SDM aparatur dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat bauk secara langsung maupun secara sistem;
5. Pemanfaatan teknologi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, optimalisasi Pusat Informasi Pembangunan serta transparansi pelaporan keuangan daerah;
6. Tuntutan masyarakat untuk keterbukaan publik dalam penyelenggaraan pemerintahanakan semakin besar (UU no.14 ttg keterbukaan informasi publik);
7. Meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana pemerintahan dalam menunjang teknologi informasi menuntut pengelolaan manajemen yang lebih baik;
8. Belum terkoordinasinya e-goverment dengan sempurna di seluruh SKPD.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Dengan berkaca pada kondisi daerah dan evaluasi RKPD tahun lalu, kita dapat melihat persoalan-persoalan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat khususnya pada tahun 2018. Persoalan-persoalan ini harus menjadi perhatian pemerintah terutama dalam merencanakan program kerja selanjutnya. Berikut ini merupakan persoalan pembangunan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2018 berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Bidang Pendidikan
    a. Belum optimalnya penggunaan Teknologi Informasi dalam pelayanan pendidikan;
    b. Kualitas sumber daya manusia pendidikan yang belum memadai dan merata;
    c. Belum optimalnya sistem pengelolaan lembaga pendidikan;
    d. Masih terjadinya disparitas kualitas pendidikan antara perkotaan dan perdesaaan.

2. Bidang Kesehatan
    a. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dibidang kesehatan
    b. masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan
    c. masih belum optimalnya pelayanan kesehatan dan pengaduannya
    d. masih terkendalanya pembangunan Puskesmas
    e. masih ditemukannya makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya dan obat keras yang dijual tanpa resep dokter
    f. masih tingginya kasus yang tidak dapat ditangani di RSUD
    g. masih terkendalanya pengadaan obat melalui sistem elektronik
    h. Proporsi Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan cakupan layanan belum ideal;
    i. Rendahnya PHBS masyarakat;

j. Masih rendahnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan kesehatan;
k. Belum optimalnya pelayanan kesehatan rujukan;

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   a. Minimnya Kualitas Sumber Daya Manusia (aparatur) dalam pemanfaatan teknologi informasi (TI);
   b. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang operasional urusan kebina margaan;
   c. Luasnya coverage wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
   d. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor tidak sebanding dengan penyediaan infrastruktur jalan.

4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
   a. Minimnya sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
   b. Minimnya penyediaan utilitas lingkungan pemukiman.

5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
   a. Masih adanya gejolak yang sering timbul dimasyarakat, akibat informasi yang kurang jelas yang dapat memicu timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
   b. Minimnya alat transportasi yang belum dimiliki kantor BPBD, sehingga berakibat pada kelancaran distribusi bantuan kepada masyarakat yang terganggu karena menunggu kendaraan untuk penyaluran bantuan bencana;
   c. Minimnya sumber daya yang dimiliki sementara tugas penanggulangan bencana kadang tidak dapat diprediksi belum lagi perlunya staf untuk selalu bersiaga di posko yang ada;

   d. Masih kurangnya tingkat pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan tentang kebencanaan.

6. Bidang Sosial
   a. Program dan kegiatan masih belum bias mengcover seluruh

masalah-masalah social yang terjadi. Update data PMKS belum maksimal;

b. Perlu dibangun Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memberikan wadah ketrampilan bagi pencari kerja untuk hidup lebih mandiri.

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Bidang Ketenaga Kerjaan
   a. Para Pencari Kerja masih banyak yang menunggu lowongan kerja pada sektorinformal, artinya ketertarikan pada sector wirausaha masih menjadi minim;
   b. Kurangnya animo perusahaan dalam memberikan informasi bursa tenaga kerja perusahaannya;
   c. Pelaksanaan masih relatif kurang karena hanya bulan sehingga sasaran kurang memadai.

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   a. Belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai bentuk permasalahan berbasis gender, eksploitasi dan diskriminasi;
   b. Masih tingginya ketimpangan gender dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang undang undang nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT dan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;
   c. Keterlibatan peran organisasi perempuan dalam pengambilan kebijakan belum optimal sehingga peran organisasi perempuan dalam pembangunan belum terlaksana secara maksimal.

3. Bidang Pertanahan
   a. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus hak atas tanah;
   b. Rendahnya pengetahuan dalam proses ijin penggunaan pemanfaatan tanah;

c. Masih tingginya okupansi masyarakat terhadap tanah-tanah negara.

4. Bidang Lingkungan Hidup
   a. Masih kurang pedulinya masyarakat terhadap lingkungan hidup, terlihat banyaknya masyarakat yang berada di sekitar sungai yang membuang sampah dan material di sungai, begitu juga dengan lingkungan yang masih banyak terlihat kurang terawat dan tertata dengan baik;
   b. Masih adanya pemilik kegiatan/usaha yang belum peduli dalam pengelolaan lingkungan terutama yang menghasilkan limbah sehingga keadaan lingkungan masih banyak yang tercemar dan banyak pengaduan masyarakat adanya pencemaran lingkungan;
   c. Upaya pengelolaan lingkungan hidup semakin berat dan komplek, berbagai upaya yang telah dilakukan masih terasa belum sepenuhnya menunjukkan keberhasilan yang signifikan;
   d. Adanya perubahan terhadap kualitas lingkungan hidup akibat aktivitas masyarakat yang terus meningkat;
   e. Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup, terutama masyarakat dekat bantaran sungai;
   f. Dokumen pengelolaan lingkungan hidup masih belum dilaksanakan secara maksimal;
   g. Pengendalian dan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan masih lemah.

5. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
   a. masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dibidang kependudukan dan catatan sipil;
   b. masih rendahnya tingkat efektivitas dan efisiensi waktu dalam proses-proses pelaksanaan kegiatan terkait

kependudukan dan catatan sipil oleh seluruh *stakeholder;*

c. kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan.

7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   a. belum meratanya akomodasi anggaran Bantuan Operasional di tingkat RT, RW dan Lembaga Desa;
   b. belum meratanya kapasitas Lembaga Desa dan SDM-nya yang menyebabkan kurangnya partisipasi aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa serta tidak optimalnya pembagian tugas dan wewenang.

8. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
   a. kurangnya kualitas, kuantitas, dan pemerataan SDM di lapangan;
   b. kurangnya ketersediaan alkon Non-MKJP;
   c. kurangnya dukungan aparat desa / kecamatan dalam pengelolaan pembangunan keluarga;
   d. belum terkoordinasinya pelaksanaan program pembangunan keluarga diberbagai tingkat administrasi.

9. Bidang Perhubungan
   a. terbatasnya anggaran untuk memfasilitasi wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan perlengkapan jalan;
   b. masih kurangnya ketersediaan unit pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
   c. terkendalanya teknis operasional pembangunan halte / shelter;
   d. masih rendahnya ketersediaan PJU diwilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
10. Bidang Komunikasi dan Informasi
   a. belum optimalnya pemanfaatan jaringan komunikasi dan informasi oleh SKPD;
   b. belum optimalnya pemanfaatan media-media penyebaran informasi;

c. masih kurangnya kapasitas SDM aparatur dalam pemahaman dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan tugas;
d. belum optimalnya koordinasi dalam pemanfaatan jaringan komunikasi dan informasi yang menyebabkan kurangnya sinergitas program / kegiatan.

11. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
    a. kurangnya antusiasme pelaku KUMKM/IKM terhadap pelatihan, diantaranya disebabkan tidak adanya bantuan permodalan, bersifat monoton, dan mengganggu rutinitas usahanya;
    b. Tidak adanya monitoring dan evaluasi kemajuan KUMKM pasca pelatihan.

12. Bidang Penanaman Modal
    a. masih kurangnya ketertarikan calon investor untuk berinvestasi karena peluang investasi yang dipromosikan tidak sesuai dengan permintaan pasar;
    b. masih kurangnya dukungan dari pemerintah, baik Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat maupun pemerintah diatasnya, diantaranya regulasi yang tidak menentu, tidak adanya sistem insentif, dan perizinan yang menyulitkan;
    c. masih rendahnya pelaporan/LKPM dari investor;
    d. kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung terhadap perkembangan investasi.

13. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
    a. masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga;
    b. masih rendahnya keterlibatan pihak pengusaha dan masyarakat umum dalam pengembangan olahraga, salah satunya dengan menjadi orang tua angkat di bidang

olahraga.

14. Bidang Kebudayaan
    a. Sarana pengembangan seni, adat dan tradisi masih sangat terbatas;
    b. Pengelolaan lembaga-lembaga kesenian daerah masih lemah;
    c. Sarana pengembangan seni, budaya, adat/tradisi masih sangat terbatas;
    d. Masih terbatasnya tenaga ahli yang mumpuni dibidang Pengelolaan benda koleksi museum dan cagar budaya.

15. Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
    a. Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan yang memadai terutama kurang tersedianya depo penyimpanan arsip yang layak, sehingga arsip SKPD yang telah dikirim ke Depo Arsip tidak dapat diolah dan disimpan dengan baik;
    b. Kurangnya tenaga/staf yang mampu mengolah arsip;
    c. Belum adanya pejabat Arsiparis;
    d. Kurangnya SDM yang menangani pelayanan perpustakaan;
    e. Kurangnya jenis dan jumlah buku bacaan perpustakaan;
    f. Kurangnya pemanfaatan Teknologi Informasi (TI).

C. Urusan Pilihan

1. Bidang Perikanan dan Peternakan
    a. adanya ancaman alih fungsi lahan budidaya perikanan;
    b. belum optimalnya upaya pelestarian lingkungan perairan umum;
    c. adanya ancaman penyakitikan;
    d. masih rendahnya kapasitas SDM pelaku usaha budidaya perikanan;
    e. masih kurangnya kesadaran pelaku usaha pengolahan ikan akan pentingny asanitasi dan higienitas dalam proses usahanya.

2. Bidang Pariwisata
    a. masih terkendalanya proses pembangunan sarana dan prasarana di kawasan wisata akibat rendahnya aksesibilitas kekawasan wisata;
    b. masih kurangnya penataan di beberapa objek wisata;
    c. belum meratanya partisipasi dan antusiasme ditingkat kecamatan dalam upaya pelestarian budaya;
    d. belum optimalnya manajemen pelaksanaan kegiatan yang mendukung kepariwisataan daerah.

3. Bidang Pertanian dan Peternakan
    a. tingginya alih fungsi lahan pertanian;
    b. tingginya ancaman cuaca yang dapat menyebabkan kekeringan/banjir di sawah;
    c. belum optimalnya distribusi bahan pangan pertanian;
    d. belum terciptanya diversifikasi konsumsi pangan oleh penduduk;
    e. belum efektifnya Sistem Alih Teknologi;
    f. belum optimalnya pemanfaatan dan penyediaan sarana pengolahan, pengemasan serta pemasaran produk peternakan;
    g. tingginya ancaman keberlangsungan budidaya ternak di masyarakat akibat tidak terkontrolnya fluktuasi harga pasar produk peternakan oleh Disnakan;
    h. masih tingginya ancaman penyakit flu burung (dicurigai varian baru) dan brucellosis yang dapat mempengaruhi produktivas usaha peternakan;
    i. masih adanya ancaman peredaran produk peternakan yang tercemar oleh bahan berbahaya dan tidak halal di masyarakat;
    j. masih rendahnya pemanfaatan limbah peternakan;
    k. produk olahan peternakan yang dihasilkan belum memenuhi standar SSOP (***Sanitation Standard Operating Procedure***). Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

4. Perdagangan

a. diperlukannya kebijakan yang konkret untuk mengendalikan keberadaan toko modern di tiap kecamatan;
b. masih beredarnya barang dan jasa yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku dan barang yang netto-nya tidak sesuai dengan yang tercantum pada kemasan;
c. Belum terbentuk Unit / UPTD Kemetrologian yang bertugas untuk melakukan Tera Ulang;
d. belum tersedianya peralatan UTTP dan tenaga ahli.

5. Perindustrian
   a. masih terkendalanya pemasaran produk, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar;
   b. masih rendahnya kemampuan manajemen dan permodalan IKM;
   c. belum optimalnya penataan dan pengelolaan pasar tradisional.

D. Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang

1. Bidang Pengawasan
   a. Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pada SKPD dalam satu tahun belum bisa menjangkau secara keseluruhan SKPD yang ada mengingat jumlah aparatur pengawas /auditor terbatas.
   b. Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pada sekolah SMPN, SMAN / SMKN untuk prosentase cakupan pembinaan dalam satu tahun masih kecil mengingat keterbatasan aparatur pengawas yang ada.
   c. Keterbatasan anggaran dalam peningkatan profesionalisme tenaga pengawas/auditor dana paratur Pemerintah.
2. Bidang Perencanaan
   a. belum optimalnya pemahaman tentang mekanisme perencanaan baik ditingkat SKPD, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan;
   b. belum optimalnya penerapan hasil inventarisasi penelitian sebagai bahan perencanaan;

c. masih belum seragamnya pemahaman indikator kinerja.

3. Bidang Kepegawaian dan Diklat
   a. Masih kurangnya tingkat pemahaman penggunaan jasa pelayanan kepegawaian terhadap peraturan perundang-undangan kepegawaian;
   b. Sarana (teknologi informasi dan transportasi) yang kurang mencukupi mengingat kompleksnya tugas dan tanggung jawab pelayanan kepegawaian baik yang dilakukan dengan propinsi maupun pusat.

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian makro ekonomi dan sosial serta pencapaian sektoral bidang fisik, ekonomi dan sosial, dapat diidentifikasi berbagai masalah pokok yang dapat menjadi pertimbangan untuk perencanaan pembangunan tahun berikutnya, yang dapat dirumuskan.

Tabel2.96
Keterkaitan HasilEvaluasi danIsu Strategis
KabupatenTulang Bawang Barat

Evaluasi	Isu Strategis
Belum Optimalnya tingkat pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Menurunnya angka APM pada jenjang pendidikan SMP. Menurunya APK pada jenjang perguruan tinggi	Masihterbatasnya jaminanpendidikandan kesehatan bagimasyarakat dan Peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Tulang Bawang Barat
Tingginya angka kesakitan dan kematian penduduk akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular Belum optimalnya pengelolaan sistem jaminan kesehatan masyarakat bagi penduduk kemiskinan Ketersediaan sumber air bersih dan sanitasi dasar masih rendah	
Masih banyak ruas jalan kabupaten yang kondisinya belum mantap (rusak) Masih rendah (dibawah angka nasional) zonasi kawasan pemukiman dan cakupan rumah sehat Belum tersedianya sarana terminal dan terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilyah	Peningkatan sarana dan prasarana daerah yaitu infrastruktur yang mantap dan pemerataan pembangunan wilayah serta penguatan kenektivitas nasional

Masih rendahnya promosi investasi, baik di tingkat nasional maupun luar negri dan kurangnya data potensi unggulan daerah Lemahnya database koperasi dan UMKM yang koprehensip dan mutakhir Belum berkembangnya jaringan usaha atar desa dalam suatu kawasan terpadu Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan pemahaman aparatur pemerintahan, dalam memahami regulasi, pengelolaan pemerintahan dan pembangunan Masih tingginya jumlah PMKS dan belum optimalnya pelayanan rehabilitasi sosial PMKS Menurunya angka partisipasi angkatan kerja, terbatasnya peluang dan informasi lapangan pekerjaan	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan peluang kerja guna penaggulangan kemiskinan
Masih tingginya angka kriminalitas Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penguatan stabilitas keamanan Menurunnya jiwa solidaritas dan jiwa gotong royong Belum optimalnya capaian administrasi dokumen kependudukan dan belum memadainya sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan dokumen kependudukan Terbatasnya SDM ASN yang berintegaritas, Profesional, inovatif dan berkapasitas team work serta belum optimalnya pelaksanaan prinsip – prinsip govermance dalam penyelenggaraan pemerintahan.	Belum optimalnyakinerja pemerintahandankerjasama dalam penyelenggaraanketertiban umum dankeamanan

Sumber:Hasil AnalisisBAPPEDA,2018

Setelah mensintesiskan isu strategis ini, kemudian diolah dan dianalisis untuk menjadi prioritas pembangunan tahun 2020, dengan hasil seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.97
Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan
Masihterbatasnya jaminan pendidikan dan kesehatan bagimasyarakat dan Peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Tulang Bawang Barat	Pembangunan SDM Melalui Meningkatkan Aksebilitas dan Kualitas Pelayanan Dasar

Peningkatan sarana dan prasarana daerah yaitu infrastruktur yang mantap dan pemerataan pembangunan wilayah serta penguatan kenektivitas nasional	Pembangunan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan peluang kerja guna penaggulangan kemiskinan	Pemberdayaan Masyarakat melalui pengembangan ekonomi rakyat dan Peningkatan Nilai Tambah Sebagai Upaya Pengurangan Kemiskinan
	Peningkatan Investasi Melalui Kemudahan Berusaha
Belum optimalnya kinerja pemerintahan dan kerjasama dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan keamanan	Reformasi Birokrasi

Sumber:Hasil Analisis BAPPEDA

Prioritas pembangunan ini selanjutnya akan diurutkan berdasarkan kriteria, adapun kriterianya adalah seperti berikut.

Tabel 2.98
Kriteria Prioritas Pembangunan

No.	Kriteria
1	Mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional (NawaCita)
2	Kesesuaian dengan Prioritas Provinsi Lampung
3	Dampak bagi masyarakat umum
4	Tingkat kemungkinan dalam pelaksanaannya
5	Daya ungkit terhadap pembangunan daerah
6	Tingkat kemendesakan
7	Hasil konsultasi publik

Sumber : Permendagri No.54Tahun2010, denganmodifikasi

Setelah dilakukan pengurutan berdasarkan kriteria – kriteria diatas dan berdasarkan analisa data yang didapat maka terbentuk lah prioritas pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2020, sebagaimana yang ada didalam table dibwah ini :

Tabel2.99
Urutan Prioritas Pembangunan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020

Peringkat	Prioritas
1	Pembangunan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas
2	Pembangunan SDM Melalui Meningkatkan Aksebilitas dan Kualitas Pelayanan Dasar
3	Pemberdayaan Masyarakat melalui pengembangan ekonomi rakyat dan Peningkatan Nilai Tambah Sebagai Upaya Pengurangan Kemiskinan
4	Reformasi Birokrasi
5	Peningkatan Investasi Melalui Kemudahan Berusaha

Sumber : Hasil Analisis BAPPEDA, 2018

Ke-lima prioritas pembangunan ini selanjutnya akan menjadi fokus pembangunan pada tahun 2020 dan akan memagari kebijakan dan program yang akan disusun selanjutnya.

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah merupakan suatu bagian yang penting dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk dapat melihat kondisi perekonomian dan kemampuan keuangan pemerintah dalam menjalankan program-program yang dirancang. Tahun 2020 merupakan tahun ke - tiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Barat, keberhasilan RPJMD merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan kepemerintahan, sehingga proyeksi tahun 2020 harus tepat pada sasaran yang diharapkan untuk dapat mendukung keberhasilan RPJMD.

Indikator - indikator yang digunakan dalam menentukan proyeksi ke depan diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi daerah, sumber - sumber pendapatan, dan kebijakan pemerintah daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah seperti pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Arah kebijakan ekonomi yang bersumber dari kebijakan ekonomi nasional, provinsi, dan kabupaten akan memengaruhi aspek pendanaan daerah.

Berdasarkan gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun prioritas pembangunan, dan pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2020 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah dari kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program, mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah serta isu strategis daerah, sebagai dasar untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

Stabilitas perekonomian daerah menjadi salah satu syarat untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini diperlukan peran serta Pemerintah Daerah yang bertugas sebagai fasilitator (*agent of development*) untuk memberikan jaminan kepastian berusaha. Pembangunan daerah diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan kinerja pemerintah daerah yang efektif, efisien, partisipatif, terbuka dan akuntabel kepada masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien dan berkelanjutan, maka diperlukan perencanaan pembangunan wilayah dengan tetap memperhatikan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dengan sedapat mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumberdaya, mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup, serta meningkatkan keselarasan perkembangan wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan pertumbuhan, memperkuat integrasi nasional dan meningkatkan daya dukung lingkungan.

Kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif, berkelanjutan dan berkeadilan, yang didukung oleh stabilitas ekonomi yang kokoh. Untuk itu, sasaran-sasaran terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi perlu diikuti dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kesenjangan antar kelompok dan antar wilayah, dengan tetap memperhatikan kelangsungan kualitas lingkungan tempat dimana masyarakat melakukan aktifitas ekonomi.

Namun demikian, perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan di tingkat daerah, seperti : kebijakan pemerintah yang menyangkut sektor moneter maupun kebijakan ekonomi sektor riil, serta pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, naik turunnya nilai tukar mata uang asing, maupun

pengaruh krisis keuangan global yang akan berdampak pada kelesuan pasar di dalam dan ke luar daerah.

Upaya memperkuat perekonomian Tulang Bawang Barat dilakukan dengan mengembangkan potensi dan keunggulan yang dimiliki dengan orientasi kepada ekonomi nasional dan global. Di lain sisi ekonomi berbasis agro juga akan terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa dengan dukungan teknologi. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya juga diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin.

Secara lebih rinci kondisi ini sejalan dengan target yang ingin dicapai melalui penetapan kebijakan ekonomi makro yang diambil oleh pemerintah daerah, antara lain :

1. menciptakan kesempatan kerja yang tinggi
2. meningkatkan kapasitas produksi
3. meningkatkan pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat
4. menciptakan kondisi perekonomian daerah yang stabil
5. pemerataan distribusi pendapatan

Adapun untuk arah kebijakan Ekonomi yang diambil oleh Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020, mengacu kepada Visi Daerah yang ada dalam RPJP dan visi Kepala Daerah yang ada dalam RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat 2017-2022, adapun untuk visi di RPJP yaitu sebagai berikut :

"Tulang Bawang Barat Kabupaten Agraris Yang Makmur Dan Sejahtera"

Sedangkan untuk visi Kepala daerah yang ada dalam RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

" Tulang Bawang Barat Maju, Sejahtera, Dan Berdaya Saing "

Hal ini dilakukan agar terjalin keterkaitan hubungan antar dokumen perencanaan dalam mewujudkan arah kebijakan dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibangun pada tahun tersebut. Selanjutnya arah kebijakan ekonomi daerah mengacu kepada proyeksi indicator makro ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi-strategi kebijakan fiskal dalam tahun 2017-2022 akan tetap diarahkan kepada hal-hal berikut : (1) Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber PAD dan Dana Perimbangan; (2) Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi belanja; (3) Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional; (4) Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan. Cara yang terakhir ini misalnya dilakukan melalui kerjasama melalui model kerjasama masyarakat, swasta, dan pemerintah (public-private patnership). Cara yang tekahir ini perlu dilakukan mengingat kemampuan pemerintah daerah di dalam menggerakkan kegiatan-kegiatan ekonomi dan pembangunan lainnya masih sangat terbatas.

A. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2018 dan Perkiraan Tahun 2019

Secara umum kondisi ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat dipengaruhi oleh indikator ekonomi makro Indonesia dan Provinsi Lampung. Perkembangan perekonomian Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat melalui pertumbuhan PDRB-nya. Dalam Pertumbuhannya terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, dan yang terakhir adalah pengaruh krisis keuangan global yang berdampak pada kelesuan pasar ekspor.

Rancangan Kerangka ekonomi daerah menggambarkan kondisi dari analisis statistik perekononomian daerah, sebagai gambaran urutan untuk situasi Perekonomian daerah, sebagai gambaran

umum untuk situasi Perekonomian Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2016-2017 disampaikan dalam karakteristik serta prospek pada tahun 2019 - 2020.

Tabel 3.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2016 - 2017 dan Proyeksi 2019 - 2020

No.	Indikator	Keadaan Tahun		Proyeksi Tahun	
		2016	2017	2019	2020
1.	PDRB				
	- ADH berlaku (dlm Jutaan)	9.042,01	9.886,35	11.557,03*	12.419,37*
2.	PDRB perkapita				
	- ADH berlaku (dlm Jutaan)	3,39	3,67	4,23*	4,51*
3.	LPE (%)	5,27	5,64	5,7	6,0
4.	Laju Inflasi	2,75**	3,14**	4,0	4,0

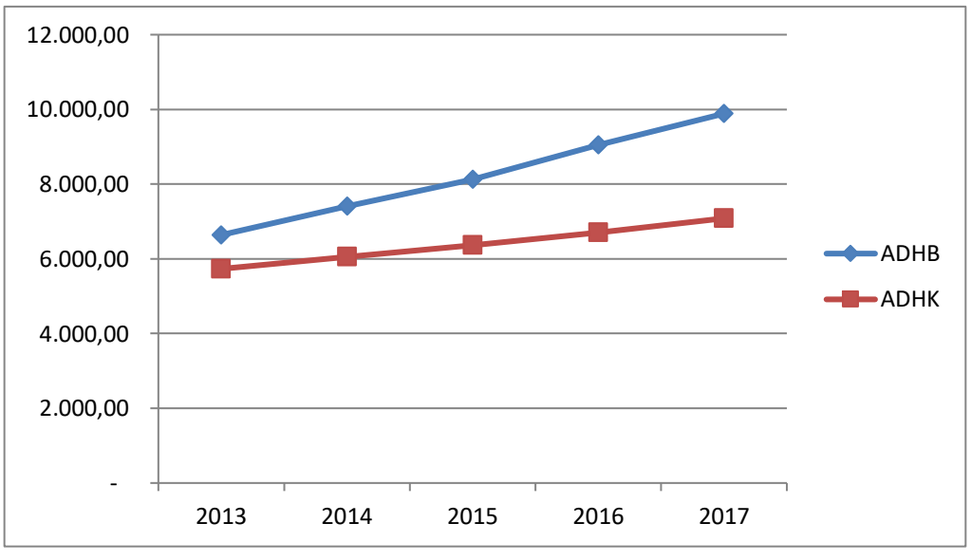
*Ket. *) = Data Proyeksi Perhitungan Manual*
***) = Data Ilflasi Kota Bandar Lampung*

Keberhasilan pembangunan ekonomi pada saat era otonomi ini, merupakan tolak ukur dalam menilai pencapaian keberhasilan pembangunan di tiap sektor yang dilakukan oleh kabupaten/kota, diantaranya tercermin dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi, berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran.

Kabupaten Tulang Bawang Barat yang merupakan Daerah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang yang terbentuk pada tahun 2008, dimana lima tahun belakangan ini telah berupaya dan bekerja keras guna meningkatan pembangunan di segala bidang, yaitu dengan meningkatkan pemerataan pembangunan di tiap sektor ekonomi, agar tidak tertinggal dengan kabupaten lainnya.Upaya pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan meratakan hasil-hasil pembangunan keseluruh kecamatan. Berbagai program dan kebijakan ekonomi yang telah dilaksanakan, perlu untuk dievaluasi baik dari sisi hasil maupun implikasinya. Hasil evaluasi tersebut dalam bentuk ukuran kuantitatif yang memberikan gambaran tentang keadaan masa lalu, masa kini, dan sasaran yang akan dicapai di masa mendatang.

Melihat sejauh mana gambaran keberhasilan pembangunan ekonomi yang telah dicapai oleh Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam lima tahun belakangan ini, dapat di lihat melalui beberapa kajian berikut ini, diantaranya pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan PDRB.

Gambar 3.1.
PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 - 2017



Kenaikan kinerja ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat tersebut juga ditunjukkan oleh kenaikan PDRB atas dasar harga konstan dengan tahun dasar 2000.

Pada dasarnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2013 hingga tahun 2017 menunjukkan pertumbuhan yang positif, seperti yang tersaji dalam table di bawah ini :

Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Tahun 2013-2017

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	6,37	5,48	5,35	5,27	5,64	5,62

Sumber : BPS Tulang Bawang Barat 2018 (Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tulang Bawang Barat Menurut Lapangan Usaha 2013 – 2017)

Indikator makro yang paling banyak digunakan untuk melihat kinerja perekonomian suatu daerah adalah laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang mencerminkan pergerakan kinerja ekonomi suatu daerah. Pada tingkat pertumbuhan yang tinggi diharapkan produktivitas dan pendapatan masyarakat akan meningkat sejalan dengan penciptaan

lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Akan tetapi, laju pertumbuhan yang tinggi tidak menjamin bahwa lapangan usaha berperan besar dalam pembentukan nilai PDRB, apabila dilihat dari sisi output.

Tabel 3.3
Nilai PDRB per Sektor Ekonomi
Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 (Juta Rupiah)

Sektor Ekonomi	PDRB ADHB	PDRB ADHK
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3 549,66	2 536,12
Pertambangan dan Penggalian	51,03	35,85
Industri Pengolahan	2 855,20	1 987,02
Listrik dan Gas	3,70	3,13
Pengadaan Air, Pengelolaan Samah, dan Limbah	9,35	6,61
Konstruksi	836,81	625,86
Perdagangan Besar dan Eceran	1 040,83	820,20
Transportasi dan pergudangan	83,16	59,26
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	90,09	58,85
Informasi dan Komunikasi	498,16	341,41
Jasa Keuangan dan Asuransi	55,61	39,01
Reasl Estate	193,67	154,20
Jasa Perusahaan	7,03	5,12
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan	296,81	182,14
Jasa Pendidikan	237,29	166,83
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	42,50	30,79
Jasa Lainnya	44,46	31,12
Total	**9 886,35**	**7 083,60**

Sumber : BPS Tulang Bawang Barat 2018 (Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tulang Bawang Barat Menurut Lapangan Usaha 2013 – 2017)

Melalui data PDRB diatas dapat diketahui industri pengolahan merupakan sektor dengan kontribusi terbesar bagi perekonomian Kabupaten Bandung. Petumbuhan ekonomi tercermin dari besaran persentase kenaikan/penurunan PDRB atas dasar harga konstan terhadap PDRB atas dasar harga konstan tahun sebelumnya. Ini dimaksudkan untuk menghilangkan pengaruh perubahan tingkat harga barang dan jasa. Karena itu, pertumbuhan ekonomi wilayah menggambarkan tingkat ekonomi riil di wilayah tertentu. Pembangunan ekonomi tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi, yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses

kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan regional atau nasional.

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat diukur melalui besaran pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dengan melihat laju pertumbuhan ekonomi akan dapat diketahui naik atau turunnya total produk yang dihasilkan suatu daerah. Sehingga dengan pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan turut atau meningkat.

B. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2021

Selain didasarkan pada kondisi ekonomi tahun 2017 dan tahun 2018, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk tahun 2020 akan sangat dipengaruhi juga oleh berbagai faktor eksternal yang berupa tantangan dan prospek kedepannya. Tantangan dan prospek perekonomian daerah ini dapat berupa kebijakan pemerintah baik kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten sendiri maupun wilayah diatasnya ataupun berupa fenomena-fenomena lainnya baik yang bersifat lokal, nasional, maupun global.

Kebijakan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat tentunya akan sangat berpengaruh terhadap laju perekonomiannya. Arah kebijakan yang kurang tepat dapat menghambat kemajuan perekonomian secara keseluruhan. Kebijakan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat bersumber pada RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2017- 2022, adapun untuk kebijakan ekonomi yang bersumber dari RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2005-2025 termasuk dalam periode Ke-empat yaitu meliputi :

1. meningkatkan kapasitas dan kualitas perekonomian daerah
    a. terwujudnya perkembangan industri dan UKM berbasis potensi local
    b. terciptanya produk pertanian yang berdaya saing
    c. deversifikasi pertanian
    d. terwujudnya ketahanan pangan

e. meningkatnya akses informasi dan kemudahan perizinan investasi.
f. terwujudnya lembaga ekonomi produktif yang mandiri dan maju
g. terkelolanya sumber daya alam dan energi yang berwawasan lingkungan
h. peningkatan iklim investasi
i. peningkatan dan stimulasi promosi investasi industri pengolahan produk – produk pertanian serta sentra – sentra produksi
j. diverikfikasi hasil produk – produk pertanian
k. pembangunan dan pengembangan Kawasan agropolitan dan agrominapolitan yang berbasis pada tanaman pertanian, perkebunan, dan perikanan

2. kesenjangan pembangunan ekonomi antara kecamatan dan desa semakin dikurangi. Dengan proses dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan pusat – pusat perdagangan baru.

Sedangkan untuk kebijakan ekonomi yang bersumber dari RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022, adapun tujuan dan sasaran serta setrategi dari perekonomian yang akan dicapai ataupun dilaksanakan yaitu :

1. Sasaran

   Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi berlandasakan struktur perekonomian yang kuat, distribusi pendapatan yang merata, dan berkelanjutan berlandasakan pada potensi daerah.

2. Tujuan

   Untuk tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

   a. meningkatnya kontribusi sektor pertanian, peternakan dan perikanan terhadap perekonomian daerah;
   b. meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan pengolahan terhadap perekonomian daerah;

c. meningkatnya kontribusi investasi / penanaman modal dalam pembangunan ekonomi daerah;
d. meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah;
e. meningkatkan kontibusi dan daya saing koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah;
f. meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah.

3. Startegi

Adapun strategi yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

a. penguatan pembangunan sektor pertanian, peternakan dan perikanan;
b. pengembangan sektor industri pengolahan hasil pertanian (agroindustri);
c. meningkatkan jaminan kepastian, keamanan, kerjasama dan promosi investasi, serta peningkatan pelayanan prima perizinan dan non perizinan;
d. peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana, utilitas pendukung perdagangan, peningkatan perlindungan keonsumendan pengamanan perdagangan di daerah;
e. peningkatan akses permodalan, teknologi, pemasaran, dan perlindungan usaha, penerpan peraktek berkoperasi yang baik dan benar, serta pemoderennisasian usaha koperasi;
f. peningkatan kuantitas dan kualitas destinasi dan objek pariwisata daerah serta pengembangan pemasaran pariwisata daerah.

Selain kebijakan diatas ada beberapa kebijakan tambahan untuk menstabilkan dan mengakselerasikan terhadap pencapaian, yang diharapkan dapat meningkatkan kondisi perekonomian daerah, yaitu sebagai berikut :

1. mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan, yang bertumpu pada peran ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

2. stabilitas ekonomi terjaga dengan baik, salah satunya tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang meningkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang semakin ditekan.
3. potensi ekonomi yang relatif besar di sektor pertanian, perindustrian dan perdagangan dengan mengedepankan ekonomi kerakyatan.
4. menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.
5. menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas.
6. meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private partnership*).
7. meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi seperti pasar dan kawasan khusus PKL secara memadai bagi pelaku ekonomi dan masyarakat luas.
8. memfasilitasi pengembangan koperasi di berbagai bidang dan lokasi usaha di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
9. membangun promosi bersama *(joint marketing)* dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat.

Sebagaimana gambaran diatas, agar pertumbuhan perekonomian daerah berjalan pada jalur yang benar perlu dijaga terciptanya kondisi keuangan yang mantap, yaitu dengan mengupayakan terciptanya pelaksanaan pembangunan yang aman secara politis dan layak secara ekonomis. Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Tulang Bawang Barat serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut :

a. diperkirakan perekonomian Kabupaten Tulang Bawang Barat masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan

komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup:

a) menyediakan infrastruktur yang memadai dan berkualitas;
b) meningkatkan daya saing produk dan sumber daya manusia agar dapat bersaing di pasar global;
c) menurunkan angka kemiskinan;
d) menurunkan angka pengangguran;
e) meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensi lokal dan strategis;
f) meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi antar wilayah;
g) meningkatkan iklim investasi yang lebih kondusif dan konstruktif;
h) meningkatkan peran pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi.

b. prospek perekonomian daerah dengan adanya situasi keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan diatas serta mendasarkan pada kondisi perekonomian tahun 2018 dan perkiraan tahun 2019 serta tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka usaha usaha yang harus dilakukan dalam pemantapan ekonomi daerah adalah:

a) meningkatkan aksesibilitas dan sinergitas antara masyarakat, dunia usaha dan lembaga pendidikan dengan pemerintah daerah;
b) menyediakan infrastruktur perekonomian yang memadai dan berkualitas untuk menunjang pertumbuhan dan distribusi ekonomi daerah;
c) meningkatkan kualitas pelayanan perizinan usaha;
d) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor ekonomi lokal dan strategis.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan salah satu bagian pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bagian dalam pengelolaan keuangan daerah adalah (1)kebijakan pendapatan daerah, (2)kebijakan belanja daerah, dan (3)kebijakan pembiayaan daerah.

Tiga kebijakan akan menjadi arahan pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Strategi dan kebijakan pendapatan Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam kebijakan pendanaan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. perlunya konsistensi penetapan angka proyeksi pendapatan sejak dalam dokumen perencanaan hingga dokumen anggaran, sehingga sinkronisasi belanja prioritas program dan kegiatan dapat terjaga mulai dari penyususnan RKPD sampai penetapan RAPBD.
b. belanja langsung OPD didorong untuk peningkatan penerimaan pendapatan daerah, khususnya penerimaan retribusi dan pajak daerah
c. optimalisasi sumber pendapatan dan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang berdampak nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah setiap tahunnya
d. penentuan Target Pendapatan Daerah, agar memperhitungkan potensi riil secara cermat, terukur, rasional serta memiliki kepastian hukum.
e. dalam menentukan Target PAD, agar mempertimbangkan kondisi perekonomian sebelumnya, target indikator makro ekonomi dan realisasi penerimaan PAD minimal 3 tahun sebelumnya, sehingga memiliki prosedur operasional baku dalam penetapan target proyeksi pendapatan.
f. meningkatkan pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
g. optimalisasi pendapatan PAD dari pajak dan retribusi melalui revisi Perda tentang penyesuaian dasar penetapan tarip pajak dan retribusi daerah.

h. meningkatkan koordinasi dan konsultasi kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam memacu pendapatan dari Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil Provinsi
i. meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah
j. mengoptimalkan kinerja BUMD untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2020 sebagai pelaksanaan agenda RPJPD tahun 2005-2025 dan RPJMD 2017-2022 Kabupaten Tulang Bawang Barat, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Resposibility (CSR).

A. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Keuangan daerah dan kerangka pendanaan meliputi beberapa komponen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan. Pada kelompok pendapatan, hanya Pendapatan Asli Daerah yang termasuk kedalam kewenangan Pemerintah Daerah Tingkat II. Oleh karenanya, proyeksi pendapatan yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Tulang Bawang Barat hanya meliputi proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab, serta azas tugas pembantuan

dan dekonsentrasi yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan hal di atas, maka setiap tahunnya diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan efektif dan efisien, selain itu untuk mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dalam mengefisienkan penggunaannya.

Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

B. Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Adapun sumber penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah), Dana Perimbangan (meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus), Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (meliputi Hibah, Dana Darurat, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya) dan Pembiayaan Daerah (meliputi penerimaan pembiayaan yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah).

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2020 disesuaikan dengan arah kebijakan pendapatan yang disesuaikan dengan kewenangannya, untuk struktur pendapatan daerah dan asal sumber penerimaannya dapat dibagi berdasarkan tiga kelompok, yaitu:

a. pendapatan asli daerah, yang merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Kenaikan PAD direncanakan diperoleh dari kenaikan penerimaan pajak daerah,komponen pajak daerah, dan kekayaan daerah yang dipisahkan.
b. dana perimbangan yaitu merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN berupa bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, DAU dan DAK yang bertujuan untuk menutup celah fiskal sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal. Kebijakan yang akan ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari dana perimbangan adalah dengan meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi dengan

pemerintah pusat.

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah penerimaan yang berasal dari dana hibah, dana darurat, bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Pencapaian target proyeksi Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2020 akan dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

a. meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi potensi pajak daerah dan Retribusi Daerah secara optimal;
b. intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan PAD dan pembenahan manajemen.
c. evaluasi/revisi Perda dan Perbup pajak daerah dan retribusi daerah
d. mengoptimalkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis.
e. target pendapatan harus cermat, terukur, rasional dan memiliki kepastian hukum.
f. meningkatkan pelayanan dan sosialisasi kepada obyek pajak
g. revisi dan evaluasi Perda /Perbup dalam penyesuaian dasar penetapan tarip daerah.
h. penyiapan data sistem, standar pengelolaan, keterampilan atas PBB perkotaan dan pedesaan yang akan berdampak nyata terhadap peningkatan pendapatan secara progresif.

Agar kebijakan pendapatan daerah tersebut dapat dicapai, maka ditetapkan beberapa strategi yaitu :

a. pemberdayaan semua aparat dengan cara meningkatkan motivasi, kompensasi, disiplin dan etos kerja dalam rangka meningkatkan kinerja.
b. meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi dan institusi dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah mulai dari tingkat Tiyuh/Kampung, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Pusat.

c. memperluas jangkauan pelayanan, dengan memperluas tempat-tempat pelayanan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya di kabupaten sepanjang dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.
d. melakukan pendekatan yang intensif dengan berbagai pihak, baik dalam rangka peningkatan sumbangan pihak ketiga maupun penerimaan yang bersumber dari bagi hasil dan Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK).

Adapun realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.4.
Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan
Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2017 s.d. Tahun 2021

NO URUT	URAIAN	JUMLAH				
		REALISASI 2017 * (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)	ANGGARAN 2019 (Rp)	PROYEKSI / TARGET 2020 (Rp)	PROYEKSI / TARGET 2021 (Rp)
1.	**PENDAPATAN TOTAL**	**861.441.937.485,14**	**943.924.559.732,65**	**931.384.538.651,00**	**931.384.538.651,00**	**1.024.126.992.516,00**
1.1.	***PENDAPATAN ASLI DAERAH***	**56.213.354.797,15**	**27.611.116.135,77**	**33.383.490.825,00**	**33.383.490.825,00**	**36.325.839.908,00**
1.1.1.	Pajak Daerah	10.351.767.923,50	14.017.374.388,50	12.571.000.000,00	12.571.000.000,00	13.328.100.000,00
1.1.2.	Retribusi Daerah	1.970.729.195,00	2.959.335.863,01	2.809.204.000,00	2.809.204.000,00	3.090.124.400,00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.558.804.221,50	1.632.351.654,32	2.154.286.825,00	2.154.286.825,00	2.369.715.508,00
1.1.4	Lain – lain pemdapatan Asli Daerah yang Sah	42.332.144.457,15	9.002.054.229,94	15.489.000.000,00	15.489.000.000,00	17.037.900.000,00
1.2.	***DANA PERIMBANGAN***	**674.301.172.719,09**	**725.406.877.464,00**	**687.570.522.000,00**	**687.570.522.000,00**	**756.327.574.200,00**
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	36.592.588.275,09	24.673.292.125,00	15.826.109.000,00	15.826.109.000,00	17.408.719.900,00
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	459.231.176.000,00	463.478.442.000,00	487.448.839.000,00	487.448.839.000,00	536.193.722.900,00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	178.477.408.444,00	237.255.143.339,00	184.295.574.000,00	184.295.574.000,00	202.725.131.400,00
1.3.	***LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH***	**130.927.409.968,90**	**190.906.566.132,88**	**210.430.525.826,00**	**210.430.525.826,00**	**231.473.578.409,00**
1.3.1.	Pendapatan Hibah	0,00	34.002.020.300,00	35.795.526.826,00	35.795.526.826,00	39.375.079.509,00
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	44.138.406.352,20	53.025.225.311,63	68.500.000.000,00	68.500.000.000,00	75.350.000.000,00
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.500.000.000,00	26.750.000.000,00	13.973.334.000,00	13.973.334.000,00	15.370.667.400,00
1.3.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.	Pendapatan Lainnya	3.910.013.616,70	2.421.164.521,25	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.300.000.000,00
1.3.7.	Dana Desa	75.378.990.000,00	74.708.156.000,00	89.161.665.000,00	89.161.665.000,00	98.077.831.500,00

C. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Namun demikian dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat mengambil langkah Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian target bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2020 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Belanja Tidak Langsung
   a. belanja pegawai dialokasikan secara cermat dan tepat;
   b. belanja hibah dan bansos sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   c. belanja bagi hasil kepada desa, guna memperkuat kapasitas fiskal desa;
   d. belanja bankeu dari daerah dan/atau pusat, untuk pemerataan dan/atau peningkatan pembangunan yang mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
   e. belanja tidak terduga dalam rangka antisipasi terjadinya kejadian luar biasa dan bencana.

2. Belanja Langsung

   Kebijakan belanja langsung terbagi ke dalam urusan pemerintah daerah (urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan pemerintah fungsi penunjang) dan menurut OPD Tahun 2020 yang diarahkan pada :

   a. belanja langsung menurut urusan:

Belanja langsung menurut urusan merupakan belanja program/kegiatan yang ada pada urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, dan urusan pemerintah funsi penunjang dengan kebijakan belanja langsung urusan sebagai berikut:

1) belanja pendidikan minimal 20%, dalam rangka penuntasan wajar dikdas 9 tahun dan perwujudan wajardikdas 12 tahun
2) belanja kesehatan minimal sebesar 10% dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan.
3) belanja peningkatan daya beli masyarakat, daya dukung dan daya tampung lingkungan
4) belanja untuk menurunkan jumlah angkatan kerja yang menganggur
5) belanja daerah yang mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, dan infrastruktur.
6) belanja daerah dalam pemenuhan standar pelayanan berbasis kinerja.
7) belanja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan dalam pemenuhan prioritas Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
8) belanja untuk menunjang efektivitas tupoksi OPD.

b. belanja langsung menurut OPD:

Belanja Langsung menurut OPD terdiri atas belanja langsung program setiap OPD yang menjadi kewenangannya. Kebijakan belanja langsung OPD sebagai berikut :

1) belanja yang diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan yang menjadi tanggung jawabnya;

2) kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), pemenuhan standar pelayanan berbasis kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pengalokasian anggaran Kabupaten Tulang Bawang Barat dilakukan dengan mempertimbangkan potensi yang ada, kondisi faktual, permasalahan dan tantangan yang dihadapi, serta kemampuan keuangan daerah untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun 2020. Sebagai daerah otonomi baru, Kabupaten Tulang Bawang Barat memerlukan anggaran untuk penataan kelembagaan pelayanan pemerintahan yang ditunjang dengan peningkatan kualitas aparatur. Pada sisi lainnya, pelaksanaan pembangunan diarahkan untuk menjamin peningkatan kualitas infrastruktur perekonomian, dan juga terselenggaranya pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya.

Adapun arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi Belanja
Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2017 s.d Tahun 2021

No Urut	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2017	Realisasi 2018	Anggaran 2019	Proyeksi / Terget 2020	Proyeksi / Terget 2021
2	**BELANJA**	**844.467.350.617,00**	**966.957.969.034,00**	**1.073.759.591.536,00**	**1.073.759.591.536,00**	**1.181.135.550.690,00**
2.1.	***BELANJA TIDAK LANGSUNG***	**369.099.250.092,00**	**381.917.131.813,00**	**498.275.901.710,00**	**498.275.901.710,00**	**548.103.491.881,00**
2.1.1.	Belanja Pegawai	264.620.347.087,00	273.346.501.636,00	329.476.641.910,00	329.476.641.910,00	362.424.306.101,00
2.1.2.	Belanja Bunga	0,00	1.285.710.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.700.000.000,00
2.1.4.	Belanja Hibah	15.620.569.907,00	10.396.978.070,00	10.486.155.000,00	10.486.155.000,00	11.534.770.500,00
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	22.500.000,00	107.000.000,00	8.100.000.000,00	8.100.000.000,00	8.910.000.000,00
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	907.667.018,00	1.230.913.743,00	1.540.000.000,00	1.540.000.000,00	1.694.000.000,00
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	87.928.166.080,00	95.550.028.364,00	140.673.104.800,00	140.673.104.800,00	154.740.415.280,00
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.100.000.000,00
2.2.	***BELANJA LANGSUNG***	**475.368.100.525,00**	**585.040.837.221,00**	**575.483.689.826,00**	**575.483.689.826,00**	**633.032.058.809,00**
2.2.1.	Belanja Pegawai	33.758.325.250,00	34.402.109.963,00	37.887.869.400,00	37.887.869.400,00	41.676.656.340,00
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	145.030.677.361,00	169.524.152.636,00	188.035.743.069,00	188.035.743.069,00	206.839.317.376,00
2.2.3.	Belanja Modal	296.579.097.914,00	381.114.574.622,00	349.560.077.357,00	349.560.077.357,00	384.516.085.093,00

D. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terbagi ke dalam dua komponen yaitu penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

1. Penerimaan Pembiayaan
   a. sisa lebih anggaran tahun sebelumnya (Silpa)
   b. pencairan dana cadangan
   c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
   d. penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.
   e. jika terjadi defisit anggaran akan diupayakan dengan pemanfaatan pinjaman daerah atau bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai program/kegiatan strategis.

2. Pengeluaran pembiayaan
   a. pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal (investasi), dialokasikan jika terjadi surplus anggaran.
   b. penyediaan fasilitas kredit bagi pelaku KUMKM

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Tahun 2020 di Kabupaten Tulang Bawang Barat antara lain diarahkan untuk :

a. menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran, dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu;
b. membentuk dana cadangan yang akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya strategis, misalnya belanja Pemilihan Kepala Daerah (pilkada), dan dana cadangan bencana alam;
c. mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian (prudential).

Adapun arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.6
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Tahun 2017 – 2019 dan Proyeksi 2021

No Urut	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2017	Realisasi 2018	Anggaran 2019	Proyeksi / Target 2020	Proyeksi / Terget 2021
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**					
3.1.	***PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH***	**8.831.502.766,40**	**42.775.876.657,70**	**153.375.052.885,00**	**153.375.052.885,00**	**168.712.558.174,00**
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	8.309.202.766,40	23.221.449.907,70	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00	25.300.000.000,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	18.855.612.750,00	124.720.352.885,00	124.720.352.885,00	137.192.388.174,00
3.1.5.	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman	522.300.000,00	698.814.000,00	5.654.700.000,00	5.654.700.000,00	6.220.170.000,00
3.2.	***PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH***	**2.000.000.000,00**	**0,00**	**11.000.000.000,00**	**11.000.000.000,00**	**12.100.000.000,00**
3.2.1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.200.000.000,00
3.2.2.	Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	9.900.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**6.831.502.766,40**	**42.775.876.657,70**	**142.375.052.885,00**	**142.375.052.885,00**	**156.612.558.174,00**

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan merupakan sekumpulan program yang secara khusus didesain untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan ini didasarkan pada isu strategis di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun berkenaan dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas, dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat juga mempertimbangkan kebijakan nasional dan Provinsi Lampung demi keselarasan dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan demi terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan untuk semua (*development for all*) dan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian di daerah, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan perekonomian secara nasional.

Dalam pelaksanaannya pembangunan memerlukan pula suatu filosofi yang memiliki cakrawala yang luas dan mampu menjadi pedoman bagi daerah untuk menentukan visi, misi, dan arah pembangunan. Adapun filosofi luhur nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu "**Gemah ripah loh jinawi tata titi tentrem karta raharja**" dengan pengertian sebagai berikut :

Gemah ripah : Perwujudan keadaan masyarakat yang tercukupi kebutuhan lahir dan batin;

Loh jinawi : Perwujudan keadaan lahan (tanah) berserta tanam-tanaman yang ada di atasnya sangat subur;

Tata tentrem : Suatu kondisi masyarakat yang taat pada aturan, disiplin, demokratis, bijak dalam bertindak, aman, tentram, dan damai;

Karta raharja : Tercapainya tingkat kemakmuran / kesejahteraan di masyarakat yang berpedoman pada keselamatan lahir dan batin;

Senada dengan filosofi leluhur nenek moyang bangsa Indonesia maka Provinsi Lampung Memiliki pedoman atau selogan pembangunan yang menggambarkan potensi daerah dan harapan masyarakatnya yaitu " ***Sai Bumi Rua Jurai*** ". yang berarti Satu Daerah Dua Golongan yang memiliki maksud yaitu :

- Sai Bumi : Satu Daerah yaitu Daerah Lampung
- Rua Jurai : Dua Golongan Yaitu Memiliki dau kebudayaan keturunan dan adat istiadat yang berbeda. Kebudayaan dibedakan menjadi dua golongan yaitu :
  - Ulun Pepadun yang berdialek Nyo (apa)
  - Ulun Peminggir / Pesisir berdialek Api (apa)

Sejalan dengan pedoman dan selogan pembangunan Provinsi Lampung maka Kabupaten Tulang Bawang Barat yang merupakan salah satu daerah keturunan dari ulun Pepadun juga memiliki selogan pembangunan dan pedoman yaitu "***Ragem Sai Mangei Wawai***" yang memiliki arti atau makna bahwasannya Kesuksesan yang diraih harus selalu berpedoman kepada keputusan bersama, dan dengan berpegangan kepada perinsip ***" Nemen, Nedes, Nerimo"*** yaitu masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat harus ***Nemen : Berusha Kerasa Tidak Putus Asa, Nedes : Bertahan Dalam Keadaan Apapun, Nerimo : Berlapang Dada Dengan Keberhasilan Yang Diberikan Oleh Yang Maha Kuasa,*** sehingga apa yang menjadi harapan yaitu Kabupaten Tulang Bawang Barat **TOP** ***(Terdepan Optimis Pasti Maju)*** dapat terwujud.

Berlandaskan pada filosofi tersebut diatas, maka ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan (RKPD). Suatu prioritas pembangunan merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioitas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh OPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun

sebelumnya. Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain :

a) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional seperti terhadap, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja.
b) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD.
c) Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
d) Korelasinya terhadap isu strategis daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2020 didasarkan pada arah kebijakan yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 – 2022.

Adapun Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 – 2022 adalah :

“ TULANG BAWANG BARAT MAJU, SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING ”

Selanjutnya pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka selanjutnya dirumuskan misi pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai berikut :

A. Misi pertama

a. Misi

“ Mengembangkan Sumberdaya Manusia (SDM) Yang Produktif, Kreatif, dan Inovatif ”

b. Tujuan dan sasaran

Tujuan	indikator tujuan	Target Tujuan						Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target Indikator Sasaran Strategis					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan kualitas hidup manusia (SDM) Kabupaten Tulang Bawang Barat.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	64,59	64,59	66,07	66,81	67,55	68.29	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat;	Harapan Lama Sekolah	11,98	12,08	12,15	12,23	12,32	12,51
									Angka rata rata lama sekolah (angka)	6,84	6,85	6,87	6,89	6,91	6,93
								Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;	Angka harapan hidup (AHH)	69,34	69,47	69,61	69,74	69,87	70,00
								Penurunan Pengangguran;	TPT (Tingkat Pengganggguran Terbuka) (%)	9,17	8,33	7,50	6,67	5,83	5,00
								Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan serta Terpenuhinya hak-hak anak;	IPG	60,04	60,82	61,61	62,39	63,17	63,95
									Nilai Skor Kab. Layak Anak	400	450	500	550	600	650

								Meningkatnya PMKS Yang Mandiri;	% Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi mandiri	13,08	13,47	13,85	4,23	14,62	15,00
								Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan.	Jumlah Pemuda Berprestasi	50	60	70	80	90	90
								Meningkatnya Prestasi Olahraga.	Jumlah Cabang Olahraga Yang Berprestasi	3	3	4	5	6	7

B. Misi Ke-Dua

a. Misi

“ Mengembangkan Perekonomian Daerah Yang Kokoh, Merata, dan Berkelanjutan ”

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan	indikator tujuan	Target Tujuan						Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target Indikator Sasaran Strategis					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Perekonomian Kab. Tulang Bawang Barat;	Rata- rata Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,44	5,54	5,65	5,75	6,00	6,30	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, dan perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	3,02	3,20	3,50	3,60	3,80	4,00
									PDRB sektor perikanan	3,07	3,15	3,20	3,25	3,30	3,32
									Nilai Tukar Petani (NTP)	101,67	103,33	105,00	106,67	108,33	110,00
								Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan	PDRB Sektor Industri Pengolahan	28.60	29.00	29.35	29.65	30.00	30.30
								Meningkatnya Investasi	Nilai Investasi	120.298. 500.000	137.798. 000.000	151.577. 800.000	166.735. 580.000	183.408. 500.000	201.749. 350.000
								Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	PDRB Sektor Perdagangan	10,61	10,89	11,17	11,44	11,72	12,00

								Meningkatnya kontribusi dan daya saing koperasi dan UMKM	jumlah aset koperasi	15.000	16.125	17.350	18.600	20.000	21.500
									Persentase kenaikan usaha mikro menjadi usaha kecil menengah	17	18	20	22	23	25
								Meningkatnya sektor pariwisata	Pendapatan sektor pariwisata	30 Juta	60 Juta	85 Juta	102 Juta	120 Juta	150 Juta
									Jumlah Kunjungan wisatawan domestik	2000	2000	3000	4000	5000	6000

C. Misi ke Tiga

a. Misi

“ Memperluas Cakupan Prasarana Sarana dan Utilitas Wilayah Yang Bersinergi dan Terintegrasi Antar Wilayah ”

b. Kebijakan dan Sasaran

Tujuan	indikator tujuan	Target Tujuan						Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target Indikator Sasaran Strategis					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Lingkunan Hidup;	Prosentase Infrastruktur dalam kondisi mantap	30	35	40	45	46	47.	Meningkatnya Ketersediaan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	% Panjang Jalan dengan Kondisi mantap	30	35	40	45	46	47
									% Jembatan dalam kondisi Mantap	30	35	40	45	50	55
								Meningkatnya ketersediaan jaringani irigasi dalam kondisi mantap dan berfungsi	% Jaringan irigasi yang baik	25%	30%	35%	37%	40%	45%
								Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana air minum;	Persentase Tiyuh yang dialiri air bersih	60	70	75	80	85	90

								Terwujudnya daya dukung infrastruktur komunikasi dan informasi yang handal dan merata.	Persntase Tiyuh yang tersambung jaringan telekomunikasi	60	72	75	85	88	90
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70	71	72	73	74	75	Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan lingkungan,	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70	71	72	73	74	75

D. Misi ke Empat

a. Misi

“ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Efektif ”

b. Kebijakan dan Sasaran

Tujuan	indikator tujuan	Target Tujuan						Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target Indikator Sasaran Strategis					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan;	Indeks Reformasi Birokrasi	60	65	70	75	80	85	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel dan Transparan	Indeks RB	60	65	70	75	80	85
									Nilai SAKIP	C	CC	CC	B	B	BB
									IKM	60	70	73	75	77	80

									Skor LPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
									Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

E. Misi ke Lima

a. Misi

“ Membangun Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Demokratis, Partisipatif, Taat Hukum dan Mentransformasi Budaya Daerah Sebagai Sumber Daya Energi Sosial Pembangunan “

b. Kebijakan dan Sasaran

Tujuan	indikator tujuan	Target Tujuan						Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target Indikator Sasaran Strategis					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, beradab dan bermartabat berlandaskan nilai agama dan budaya daerah yang transformatif.	Angka konflik / Kriminalitas	4,27	3,67	3,07	2,48	1,88	1,28	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan nyaman;	Persentase Tiyuh rawan Kriminal	4,30	4,25	4,15	4,10	4,05	4,00
									Indeks Desa membangun	0,580	0,590	0,595	0,600	0,605	0,610
	% warisan Budaya yang lestari	95	70	75	80	85	90	Meningkatnya pelestarian warisan Budaya	Jumlah aset budaya yang dilestarikan	4	4	5	5	6	6

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

Agenda prioritas pembangunan nasional berdasarkan RPJMN Tahun 2015 - 2019 atau disebut ***nawacita*** adalah sebagai berikut :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektorsektor strategis ekonomi Domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial indonesia

Berdasarkan kepada agenda prioritas dalam RPJM nasional diatas maka pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menetapkan prioritas nasional dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020, yaitu sebagai berikut :

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;
2. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan;
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja;
4. Pemantapan Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Berdasarkan prioritas tersebut diatas yang dituangkan pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 diambil

tema pembangunan **"Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas".**

Senada dengan tema RKP 2020 untuk tema pembangunan tahun 2020 Pemerintah Daerah Provinsi Lampung adalah **"Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Melanjutkan Pembangunan Ekonomi Untuk Mengurangi Kemiskinan".**

Arah pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022 untuk tahun 2020 yaitu :

1. Penjaminan layanan pendidikan dasar yang terjangkau dan bermutu bagi seluruh penduduk untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun;
2. Perluasan kesempatan menempuh dan menuntaskan pendidikan menengah dan tinggi kepada seluruh masyarakat secara adil dan merata;
3. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan PAUD dan pendidikan masyarakat kepada seluruh masyarakat secara adil dan merata;
4. Pengembangan budaya baca dan peningkatan akses perpustakaan bagi masyarakat;
5. Peningkatan pelayanan gizi masyarakat, kesehatan bayi, kesehatan anak dan remaja, serta kesehatan ibu dan reproduksi;
6. Peningkatan pembinaan upaya kesehatan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas dan terjangkau seluruh masyarakat;
7. Penurunan angka kesakitan dan kematian penduduk akibat penyakit menular, penyakit tidak menular melalui pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
8. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan;
9. Pemantapan implementasi system jaminan kesehatan masyarakat, khususnya penduduk miskin;
10. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu tenaga kesehatan;

11. Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja angkatan kerja sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha yang berdaya saing;
12. Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui pengembangan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta penegakkan hukum bidang ketenagakerjaan;
13. Peningkatan kualitas hidup, penurunan tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta peningkatan pemberdayaan perempuan dalam semua bidang pembangunan;
14. Penjaminan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya;
15. Peningkatan kualitas penyelenggaraan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan pada setiap aspek penghidupannya;
16. Fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup bagi pemuda;
17. Fasilitasi pengembangan kepemimpinan pemuda, kewirausahaan, kepeloporan;
18. Fasilitasi pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda;
19. Fasilitasi pengembangan tata kelola organisasi kepemudaan;
20. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam berolahraga untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani;
21. Peningkatan pembibitan dan pengembangan bakat olahragawan berprestasi secara terpadu dan berkelanjutan;
22. Pembangunan peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan (jalan dan jembatan) untuk mendukung konektivitas antar wilayah;
23. Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Prasarana Sarana (termasuk fasilitas) perhubungan untuk mendukung

keterjangkauan layanan transportasi dan menjamin keselamatan keamanan dan kenyamanan transportasi;

24. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan utilitas dasar permukiman yang berkualitas, layak, sehat dan terjangkau melalui pendekatan tanggab kebutuhan dan terpadu dengan sumber daya alam dan sumber daya air, serta dilaksanakan sesuai dengan tata bangunan dan ramah lingkungan;
25. Perluasan cakupan layanan infrastruktur jaringan telekomunikasi, informasi dan energi hingga menjangkau seluruh pusat – pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten;
26. Menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dilakukan secara terpadu lintas sektoral dan lintas wilayah, didukung oleh kebijakan dan kerangka regulasi penataan ruang, SDM dan Institusi berkualitas dalam keterlibatan partisipasi masyarakat;
27. Meningkatkan integritas dan kapasitas sumber daya aparatur publik;
28. Meningkatkan kepatuhan pemerintah daerah dalam pelaksanaan undang – undang pelayanan publik;
29. Pendayagunaan peraturan perundang – undangan secara lebih maksimal dan tata peraturan daerah lebih efektif;
30. Memantapkan kelembagaan, SDM pengelolaan keuangan, dana administrasi pemerintahan tiyuh;
31. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah berlandaskan prinsip *Good Govermance;*
32. Meningkatkan pengelolaan asset daerah secara tertib dan taat asas;
33. Mengembangkan system e-planning;
34. Meningkatkan kapasitas SDM;
35. Meningkatkan administrasi birokrasi;
36. Mempermudah alur perizinan melalui PTSP berbasis IT;
37. Implementasi *e-govermance;*
38. Peningkatan kualifikasi kompetensi, dan kinerja ASN secara adil dan wajar untuk menghasilkan pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
39. Peningkatan pembinaan jiwa KORPS dan Kode Etik ASN;

40. Penguatan pembangunan sektor pertanian, peternakan dan perikanan sebagai sektor basis daerah serta untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat melalui peningkatan kapasitas produksi, daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan;
41. Mengembangakan kawasan peruntukan industri sedang dan atau besar, serta mengembangkan sentra industri kecil dan menengah (SIKIM) untuk meningkatkan nilai tambah komoditi hasil pertanian dan menciptakan kesempatan kerja di daerah;
42. Peningkatan kapasitas industri kecil dan menengah (IKM) pengolahan berbasis agro (agroindustry) yang produktif, berdayasaing, tahan krisis, padat karya, serta berwawasan lingkungan;
43. Peningkatan iklim penanaman modal yang berdayasaing dan percepatan realisasi penanaman modal pada sektor yang menjadi prioritas daerah dan nasional;
44. Optimalisasi kerjasama investasi dan pelaksanaan kegiatan promosi secara terfokus dan terintegrasi untuk memasarkan sektor – sektor prioritas daerah dan nasional;
45. Pengembangan landasan udara M. Bun Yamin untuk mendukung perkembangan ekonomi daerah;
46. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas pendukung perdagangan barang dan jasa untuk menjamin efisiensi dan kelancaran dsitribusi barang dan jasa kebutuhan pokok dan penting;
47. Penguatan implementasi elemen perlindungan konsumen (*commercial fairness,* standar, kemetrologian, pengawasan barang beredar) untuk melindungi masyarakat dari produk – produk yang menyebabkan kerugian, membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan konsumen serta produsen dalam negeri terhindar dari praktek perdagangan tidak sehat;
48. Meningkatkan produktivitas, kelayakan dan nilai tambah Koperasi dan UMKM, sehingga mampu tumbuh kesekala yang lebih besar dan berdaya saing tinggi;
49. Peningkatan tatalaksana, penataan badan hukum, peningkatan kualitas dan kesehatan lembaga koperasi;

50. Pembangunan daya tarik wisata, fasilitas wisata, aksesibiltas pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan investasi pariwisata, khususnya wisata sejarah, budaya dan wisata alam;
51. Promosi yang terfokus dan optimalisasi pemanfaatan keragaman media promosi untuk memasarkan produk dan menumbuhkan minat wisatawan untuk berkunjung, dan melakukan perjalanan ke daerah;
52. Menjalin kemitraan antara Pemerintah, Polri, TNI dan Masyarakat dalam optimalisasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
53. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap resiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
54. Penguatan Sistem peringatan dini ditingkat hulu dan hilir;
55. Pengarustamaan pengurangan resiko bencana diseluruh sektor pembangunan;
56. Implementasi standar pelayanan minimum (SPM) penanggulangan bencana;
57. Peningkatan koordinasi pelaksanaan penanganan darurat dalam pemulihan pasca bencan, termasuk perencanaan, penganggaran dan monitoring;
58. Mewujudkan prilaku dan moral masyarakat yang baik dan berwawasan keagamaan;
59. Peningkatan kesadaran apresiasi, kreativitas dan pemahaman masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya;
60. Peningkatan kualitas perlindungan, pemgembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya;
61. Peningkatan keberdayaan masyarakat;
62. Peningkatan akses terhadap penyelenggaraan pemerintahaan;
63. Penguatan kebebasan masyarakat sipil;
64. Optimalisasi pemenuhan hak – hak politik masyarakat;
65. Memperkuat kelembagaan demokrasi;
66. Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap hukum;
67. Peningkatan kapasitas integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum.

Dengan mengacu agenda pembangunan Nasional, indikasi tema pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dan berpedoman pada arah pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat serta prioritas pembanguan tahun 2020, maka ditetapkan tema pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2020 adalah "**Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk Kesejahteraan Hidup Masyarakat**", penetapan tema ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam mendukung tema nasional dan indikasi tema Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

Berikut ini tabel hubungan antara Prioritas Pembangunan Nasional dan Propinsi dengan Prioritas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (RKPD) 2020.

Tabel.4.1.
Prioritas Pembangunan Nasional, Pemerintah Propinsi Lampung dan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

No	Nasional	Provinsi	Kabupaten
1.	Pembangunan Manusia dan pengentasan kemiskinan	Pembangunan SDM dengan pengarustamaan gender, pemberdayaan kaum difabel, dan perlindungan anak	Pembangunan SDM melalui meningkatkan aksesibiltas dan kualitas pelayanan dasar
		Meningkatkan nilai tambah produk unggulan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan	Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi rakyat dan peningkatan nilai tambah sebagai upaya pengurangan kemiskinan
2	Penguatan konektivitas dan pemerataan		
3	Penimgkatan Nilai Tambah Ekonomi dan kesempatan kerja	Infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pembangunan Infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
			Peningkatan investasi melalui kemudahan berusaha
		Reformasi birokrasi	Reformasi birokrasi
4	Pemantapan Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Pembangunan Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	
5	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.	Kehidupan religius, aman, berbudaya dan inofatif	

Keselarasan antar tema pembangunan dapat dilihat dengan kata kunci (***key word***) utama tema yaitu :

1. Memantapkan kondisi perekonomian daerah, di dukung dengan upaya :
   a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan
   b. Penurunan ketimpangan pendapatan
   c. Peningkatan infrastruktur
2. Menuju kemandirian, di dukung dengan upaya :
   a. Peningkatan daya saing daerah
   b. Peningkatan kualitas SDM
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, di dukung dengan upaya :
   a. Penurunan persentase KK Miskin
   b. Penurunan pengangguran
   c. Peningkatan perlindungan masyarakat (sosial, keamanan, ketertiban dan bencana).

Memantapkan kondisi perekonomian daerah merupakan upaya mendorong aktivitas perekonomian daerah sehingga tidak rentan terhadap perubahan-perubahan, peningkatan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi. Menuju Kemandirian merupakan upaya untuk mendorong masyarakat Tulang Bawang Barat menuju masyarakat mandiri melalui upaya peningkatan daya saing daerah dilakukan melalui upaya membangun, iklim investasi yang kondusif, menjaga stabilitas keamanan, dan menyiapkan SDM yang unggul.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan upaya untuk menurunkan persentase KK Miskin, menurunkan angka pengangguran, meningkatkan daya beli masyarakat dan meningkatkan perlindungan masyarakat dari permasalahan sosial, keamanan dan bencana.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja merupakan rencana teknis dari prioritas pembangunan yang dijabarkan kedalam beberapa sasaran, yang kemudia dibuat program dan dari program ini dideskripsikan lagi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menjadi alat utama dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan tersebut. Rencana program beserta kegiatan-kegiatannya ini berasal dari mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang melibatkan pendekatan *top down* berupa usulan dari OPD terkait, *bottom up* berupa partisipasi masyarakat, serta pendekatan teknokratik. Pendekatan *bottom up* berasal dari aspirasi masing-masing wilayah dengan melihat kebutuhan dan persoalan yang dihadapi. Pendekatan *top down* berasal dari OPD dengan melihat pada persoalan sektoral yang ditanganinya. Sementara pendekatan teknokratik berasal dari pemikiran dan perumusan prioritas pembangunan. Perencanaan program dan kegiatan prioritas ini juga meliputi target pencapaian beserta indikatornya dan penganggaran yang akan dibebankan pada APBD kabupaten serta waktu dan lokasi pelaksanaannya.

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh OPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.

Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada program prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 - 2022.

Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun OPD, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan.
2. menentukan keluaran/output setiap kegiatan.
3. menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program.
4. menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya.
5. menghitung alokasi OPD berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab OPD.

Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan OPD yang bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah. Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Selanjutnya, program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk rancangan awal RKPD, disampaikan ke OPD sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan OPD juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra OPD sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan OPD.

Rencana program dan kegiatan prioritas beserta deskripsinya akan dipaparkan secara terperinci dalam bentuk matriks tersendiri yang akan disajikan dengan rencana program dan kegiatan prioritas berdasarkan masing-masing OPD, adalah sebagai berikut :

OPD : DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml	Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					**928.750.000**				**1.245.000.000**
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran di Dinas Pendidikan	TUBABA	100%		554.025.000	APBD		100%	750.000.000
	Penyelenggaraan Pameran Daerah	Terlaksananya Dokumen yang dicapai Dinas Pendidikan 1 Tahun	TUBABA	Pameran 1 kali dalam 1 Tahun		50.000.000	APBD		Pameran 1 kali dalam 1 Tahun	50.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkala	Terlaksananya Dokumen yang dicapai Dinas Pendidikan 1 Tahun	TUBABA	6 dokumen (Lakip, LPPD,LKPJ,Renja,Renstra , RKA)	Dokumen	50.000.000	APBD		3 dokumen (Lakip, Renstra, RKA)	50.000.000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya pasilitas kantor	TUBABA	1 Laptop dan 1 Proyektor	Buah	25.000.000	APBD		Disdik TUBABA	125.000.000
	Jasa Publikasi	Terselenggaranya jasa publikasi Dinas Pendidikan	TUBABA	Disdik TUBABA		50.000.000	APBD		Disdik TUBABA	50.000.000
	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Tersedianya SPM pada Dinas Pendidikan	TUBABA	Disdik TUBABA		50.000.000	APBD		Disdik TUBABA	50.000.000
	Inventarisasi Aset Sekolah	Terdatamya aset sekolah	TUBABA	222	Sekolah	149.725.000	APBD		Disdik TUBABA	170.000.000
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur					**254.400.000**				**254.400.000**
	Pengadaaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	TUBABA	Sewa 2 Mobil	Buah	192.000.000	APBD		100%	192.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berakala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	TUBABA	BBM 2 Mobil	Buah	62.400.000	APBD		100%	62.400.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					**119.250.000**				**119.250.000**
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya	TUBABA	53	Orang	119.250.000	APBD		100%	119.250.000
	Program Pendidikan Anak Usia Dini					**527.600.000**				**527.600.000**
	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Negeri (DAK).	Jumlah PAUD Negeri	TUBABA	1 Paud Negeri	Sekolah	27.600.000	APBD		Disdik TUBABA	27.600.000

OPD : DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml	Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Monitoring Evaluasi Pelaporan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD.	Tercapainya Tujuan Penggunan BOP PAUD sesuai Juknis yang ditetapkan	TUBABA	100 Paud	Sekolah	50.000.000	APBD		Disdik TUBABA	50.000.000
	Apresiasi Bunda PAUD Berprestasi	penyelenggaraan Apresiasi Bunda PAUD	TUBABA	173 Paud	Sekolah	200.000.000	APBD		Disdik TUBABA	200.000.000
	Pelatihan Drumband Paud	Terselenggaranya Pelatihan Drumband Paud	TUBABA	1 Paud	Sekolah	100.000.000	APBD		100%	100.000.000
	Penyelenggaraan Gebyar PAUD Dikmas dan Hari Anak Nasional	penyelenggaraan Gebyar PAUD Dikmas dan Hari Anak Nasional	TUBABA	173 Paud	Sekolah	150.000.000	APBD		Disdik TUBABA	150.000.000
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun					**2.093.600.000**				**37.889.126.826**
	Festifal Lomba seni Siswa Nasional SD dan SMP.	terselenggaranya FLS2N SD & SMP yang baik	TUBABA	4 Cabang Olahraga	Siswa	250.000.000	APBD		4 Cabang Olahraga	250.000.000
	Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP.	Terselenggaranya Monitoring Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP di Tubaba	TUBABA	171 SD dan 51 SMP	Sekolah	100.000.000	APBD		SD dan SMP	100.000.000
	Penyelenggaraan UAS/ UN Tingkat SD/ MI/ SMP/ MTS Negeri/ Swasta	terselenggaranya Penyelenggaraan UAS/UN Tingkat SD/MI/SMP/MTS Negeri/Swasta yang baik	TUBABA	172 SD dan 51 SMP	Sekolah	450.600.000	APBD		SD dan SMP	450.600.000
	Lomba O2SN SD dan O2SN SMP dan Pengiriman Atlit Tingkat Provinsi.	terselenggaranya O2SN SD & SMP yang baik	TUBABA	4 Cabang Seni	Siswa	250.000.000	APBD		4 Cabang Seni	250.000.000
	Lomba OSN SD dan OSN SMP dan Pengiriman Atlit Tingkat Provinsi.	terselenggaranya OSN SD & SMP yang baik	TUBABA	3 Mapel	Siswa	175.000.000	APBD		3 Mapel	175.000.000
	Peningkatan sarana dan Prasarana Sekolah	Terelenggaranya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pendidikan	TUBABA	171 SD dan 51 SMP	Sekolah	150.000.000	APBD		Sekolah se-Kab TUBABA	100.000.000
	Pengembangan Penyusunan Standarisasi Penumbuhkembangan Karakter Siswa	Terlaksananya Pengembangan Penyusunan Standarisasi Penumbuhkembangan Karakter Siswa	TUBABA	171 SD dan 51 SMP	Sekolah	100.000.000	APBD		Sekolah se-Kab TUBABA	100.000.000
	Pentas Pendidikan Agama Islam (PAI)	Terlaksananya Pentas Pendidikan Agama Islam (PAI)	TUBABA	171 SD dan 51 SMP	Sekolah	150.000.000	APBD		SD dan SMP	150.000.000
	Pembinaan Pocil	Terlaksananya Pembinaan Pocil	TUBABA	2 Sekolah	Sekolah	100.000.000	APBD		SD dan SMP	150.000.000
	Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)SD dan SMP	terlaksananya Lomba Sekolah Sehat (UKS)	TUBABA	171 SD dan 51 SMP	Sekolah	68.000.000	APBD		Sekolah se-Kab TUBABA	50.000.000

OPD : DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml	Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Pembinaan Akreditasi Sekolah	Terlaksanannya Pembinaan Akreditasi Sekolah	TUBABA	171 SD dan 51 SMP	Sekolah	100.000.000	APBD		SD dan SMP	118.000.000
	Monitoring Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan	Terlaksanannya Monitoring Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan	TUBABA	171 SD dan 51 SMP	Sekolah	100.000.000	APBD		SD dan SMP	100.000.000
	Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP)	Terlaksananya Program Indonesia Pintar (PIP)	TUBABA	171 SD dan 51 SMP	Sekolah	100.000.000	APBD		SD dan SMP	100.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH					**35.795.526.826**	**APBD**			**35.795.526.826**
	Pengembangan Perpustakaan	Terselenggarannya Dana Operasional Sekolah	TUBABA	171 SD dan 51 SMP	Sekolah	8.097.143.600	APBN		171 SD dan 51 SMP	8.097.143.600
	Penerimaan Siswa Baru	Terselenggarannya Dana Operasional Sekolah	TUBABA	171 SD dan 51 SMP	Sekolah	478.470.300	APBN		171 SD dan 51 SMP	478.470.300
	Pembelajaran dan Ekstra Kulikuler	Terselenggarannya Dana Operasional Sekolah	TUBABA	171 SD dan 51 SMP	Sekolah	4.450.678.300	APBN		171 SD dan 51 SMP	4.450.678.300
	Ulangan dan Ujian	Terselenggarannya Dana Operasional Sekolah	TUBABA	171 SD dan 51 SMP	Sekolah	4.652.365.950	APBN		171 SD dan 51 SMP	4.652.365.950
	Langganan Daya dan Jasa	Terselenggarannya Dana Operasional Sekolah	TUBABA	171 SD dan 51 SMP	Sekolah	2.789.560.320	APBN		171 SD dan 51 SMP	2.789.560.320
	Perawatan Sekolah	Terselenggarannya Dana Operasional Sekolah	TUBABA	171 SD dan 51 SMP	Sekolah	2.959.640.100	APBN		171 SD dan 51 SMP	2.959.640.100
	Pembayaran Honorarium Bulanan	Terselenggarannya Dana Operasional Sekolah	TUBABA	171 SD dan 51 SMP	Sekolah	6.230.097.450	APBN		171 SD dan 51 SMP	6.230.097.450
	Pengembangan Prosesi GTK	Terselenggarannya Dana Operasional Sekolah	TUBABA	171 SD dan 51 SMP	Sekolah	2.118.176.894	APBN		171 SD dan 51 SMP	2.118.176.894
	Pembiayaan Pengelolaan Sekolah	Terselenggarannya Dana Operasional Sekolah	TUBABA	171 SD dan 51 SMP	Sekolah	2.426.404.812	APBN		171 SD dan 51 SMP	2.426.404.812
	Pembelian dan Perawatan Perangkat Komputer	Terselenggarannya Dana Operasional Sekolah	TUBABA	171 SD dan 51 SMP	Sekolah	1.278.440.550	APBN		171 SD dan 51 SMP	1.278.440.550
	Biaya Linnya	Terselenggarannya Dana Operasional Sekolah	TUBABA	171 SD dan 51 SMP	Sekolah	314.548.550	APBN		171 SD dan 51 SMP	314.548.550
	Program Peningkatan Mutu Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan					**950.000.000**				**900.000.000**

OPD : DINAS PENDIDIKAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Jml	Sat					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
				Pemilihan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi Serta Berdedikasi	Menyelenggarakan Pemilihan Pengawas Sekolah, Guru berprestasi dan berdedikasi	TUBABA	Pengawas dan Guru di TUBABA	Sekolah	250.000.000	APBD		Pengawas dan Guru di TUBABA	250.000.000
				Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik Melalui Regulasi Guru dan Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan	Terselenggaranya Olimpiade Sains Nasional (Guru).	TUBABA	Guru di TUBABA	Sekolah	200.000.000	APBD		Guru di TUBABA	200.000.000
				Peningkatan Mutu Dan Kwalitas Tenaga Kependidikan	Terselenggaranya Kampung Matematika	TUBABA	Guru Maemaika di Kab.Tubaba	Sekolah	250.000.000	APBD		Guru Maemaika di Kab.Tubaba	200.000.000
				Sosialisasi Penilaian Angka Kredit (PAK)	Terselenggaranya Sosialisasi Penilaian Angka Kredit (PAK)	TUBABA	SD dan SMP	Sekolah	125.000.000	APBD		SD dan SMP	125.000.000
				Sosialisasi dan Rekonsilisasi Percepatan Penyaluran Tunjangan Guru	Terselenggaranya dan Rekonsilisasi	TUBABA	Guru di TUBABA	Sekolah	125.000.000	APBD		Guru di TUBABA	125.000.000
				Program Manajemen Pelayanan Pendidikan					**750.000.000**				650.000.000
				Pembinaan Akreditas Sekolah	Pembinaan Akreditas Sekolah	TUBABA	1 Kegiatan	Sekolah	100.000.000	APBN		SD dan SMP	
				Sosialisasi Peningkatan Mutu Lembaga dan Tutor Paket A, B dan C	Terselenggaranya Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket B dan Monitoring.	TUBABA	Tutor Paket A,B dan C	Sekolah	50.000.000	APBD		Tutor Paket A,B dan C	
				Tubaba Eco Camp	terselenggaranya pengembangan pendidikan kecakapan hidup	TUBABA	SD dan SMP	Sekolah	250.000.000	APBD		SD dan SMP	250.000.000
				Penyelenggaraan Sosialisasi Monitoring Ujian Paket C	terselenggaranya ujian paket C yang baik	TUBABA	10 PKBM	Sekolah	100.000.000	APBD		10 PKBM	100.000.000
				Penyelenggaraan Sosialisasi Monitoring Ujian Paket B	terselenggaranya ujian paket B yang baik	TUBABA	10 PKBM	Sekolah	100.000.000	APBD		10 PKBM	100.000.000
				Sosialisasi Program Indonesia Pinter	Terselenggaranya program Indonesia Pintar	TUBABA	1 Kegiatan		100.000.000	APBD		1 Kegiatan	100.000.000
				Penyelenggaraan Sosialisasi Monitoring Ujian Paket A	terselenggaranya ujian paket A yang baik	TUBABA	10 PKBM	Sekolah	50.000.000	APBD		10 PKBM	50.000.000
				Program Membangun Tulang Bawang Barat Cerdas					**3.830.000.000**				**3.830.000.000**
				Membangun Tulang Bawang Barat Cerdas.	Terselenggaranya Membangun Tulang Bawang Barat Cerdas (TBBC)	TUBABA	12 anggota TBBC	Orang	1.100.000.000	APBD		15 anggota TBBC	1.100.000.000

OPD : DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml	Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Guru Penggerak Tulang Bawang Barat	terciptanya Pendidikan di Kabupaten TUBABA yang lebih maju dan berkarakter	TUBABA	222 Guru SD dan SMP	Orang	2.230.000.000	APBD		Guru SD dan SMP	2.230.000.000
	Tulang Bawang Barat Seni Budaya	Terselenggaranya Tulang Bawang Barat Seni Budaya	TUBABA	SD dan SMP	Orang	500.000.000	APBD		SD dan SMP	500.000.000
	Program Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan					**2.062.000.000**				**2.062.000.000**
	Penyelenggaraan Beasiswa Mahasiswa D3 Perkebunan.	Terselenggaranya Penyelenggaraan Beasiswa Mahasiswa D3 Perkebunan.	TUBABA	77 Mahasiswa D3 Perkebunan	Orang	375.000.000	APBD		77 Mahasiswa D3 Perkebunan	375.000.000
	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Terselenggaranya Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Sekolah	TUBABA	1 Dokumen SOP	Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen SOP	50.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Sekolah	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Siswa	TUBABA	9050 Siswa Baru SD dan SMP	Botol	500.000.000	APBD		Siswa SD dan SMP	500.000.000
	Pelaksanaan Seleksi dan Kuliah D3 Perkebunan CWE Kelapa Sawit	Tersedianya Beasiswa Politeknik Kelapa sawit Citra Widia Edukasi	TUBABA	40 Mahasiswa D3 Politeknik Kelapa Sawit CWE	Orang	867.000.000	APBD		40 Mahasiswa D3 Politeknik Kelapa Sawit CWE	867.000.000
	Makanan Sehat Di sekolah	Tersedianya Pangan Sehat Di sekolah	TUBABA	20 SD dan SMP	Sekolah	270.000.000	APBD		SD dan SMP	270.000.000
JUMLAH						**47.311.126.826**				**47.358.126.826**

OPD : DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				**8.164.665.000**				**8.981.131.500**
	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan berkala	Jumlah Dokumen LAKIP, Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	DINAS KESEHATAN	1 dokumen	50.870.000	APBD		1	55.957.000
	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya administrasi dan tatakelola keuangan	DINAS KESEHATAN	100 persen	7.996.005.000	APBD		100	8.795.605.500
	Pengawasan dan pengamanan aset daerah	Pembinaan peningkatan tata kelola administrasi dan rekonsiliasi data BMD	DINAS KESEHATAN	100 persen	35.360.000	APBD		100	38.896.000
	Pembinaan peningkatan tata kelola administrasi dan rekonsiliasi data Barang Milik Daerah			persen	82.430.000				90.673.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase peralatan kantor	DINAS KESEHATAN	100 persen	-	APBD		100	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				**351.000.000**				**351.000.000**
	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kebutuhan kendaraan Dinas	DINAS KESEHATAN	3 kendaraan	288.000.000	APBD		3	288.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas yang operasinal	DINAS KESEHATAN	12 kendaraan	63.000.000	APBD		12	63.000.000
	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				**278.760.000**	**APBD**			**278.760.000**
	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Tersusunnya profil kesehatan	DINAS KESEHATAN	2 dokumen	278.760.000	APBD		2	278.760.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				**363.905.000**	**APBD**			**363.905.000**
	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Rencana Pembanguan Daerah	Berjalannya evaluasi kinerja di lingkup dinas kesehatan dan jajarannya	DINAS KESEHATAN	4 kali	145.540.000	APBD		4	145.540.000

OPD : DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kesehatan	Jumlah dokumen perencanaan program yang dihasilkan	DINAS KESEHATAN	4 dokumen	218.365.000	APBD		4	218.365.000
	Program Gizi dan kesehatan Ibu dan Anak				**366.000.000**				**402.600.000**
	Perbaikan dan Penanggulangan Masalah Gizi Masyarakat	Persentase ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan	Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang Barat	100 Persen	178.995.000	APBD		100	196.894.500
		Persentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)		100 Persen				100	
		Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif		100 Persen				100	
		Persentase balita gizi kurang mendapatkan PMT		100 Persen				100	
		Persentase remaja puteri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)		100 Persen				100	
	Pelayanan kesehatan bayi, anak dan remaja	Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang Barat	100 Persen	34.395.000	APBD		100	37.834.500
		Balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100 Persen				100	
		Anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrening kesehatan sesuai standar		100 Persen				100	
	Pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi	Persentase Kunjungan ibu hamil K4	Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang Barat	100 Persen	120.390.000	APBD		100	132.429.000
		Persentase ibu hamil, bersalin dan nifas yang mendapat penanganan komplikasi kebidanan		100 Persen				100	
		Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh nakes terlatih		100 Persen				100	
		Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan		100 Persen				100	
		Persentase PUS yang menjadi peserta KB aktif		90 Persen				90	

OPD : DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml	Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Peningkatan pelayanan kesehatan usia lanjut	Persentase puskesmas melaksanakan posyandu lansia	Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang Barat	100/16	Persen/puskesmas	32.220.000	APBD		100/16	35.442.000
		Persentase puskesmas santun usia lanjut		100/16	Persen/puskesmas				100/16	
		Usila umur 60 tahun mendapatkan skrening kesehatan sesuai standar		70	Persen				70	
	Pengelolaan jaminan persalinan (Jampersal)	Persentasi keluarga miskin yang di tangggung persalinan yang tidak tertanggung oleh JKN di Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang Barat	100	Persen	-	DAK		100	-
	Program Upaya Kesehatan					**2.623.398.000**				**2.864.177.800**
	Peningkatan upaya pelayanan kesehatan dasar	Persentase cakupan rawat jalan di Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang Barat	100/7	Persen/puskesmas	1.267.418.000	APBD		100/7	1.394.159.800
		Persentase cakupan rawat inap di Puskesmas		100/2	Persen/puskesmas				100/2	
		Masyarakat umur 15-59 tahun mendapatkan skrening kesehatan sesuai standar		100	Persen				100	
	Upaya kesehatan tradisional dan komplementer	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional	Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang Barat	100/16	Persen/puskesmas	135.205.000	APBD		100/16	148.725.500
	Pengembangan pusat pengolahan pasca panen tanaman obat (P4TO)	Jumlah puskesmas yang wilayah kerjanya memanfaatkan tanaman obat untuk bahan jamu tradisional	Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang Barat	16	Puskesmas	19.600.000			16	
	Akreditasi fasilitas kesehatan	Jumlah pelayanan kesehatan yang terakreditasi pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang Barat	100	Persen	300.000.000	APBD		100	330.000.000
	Penyediaan operasional dan pemeliharaan puskesmas dan jaringannya	Persentase puskesmas yang mendapatkan operasional dan pemeliharaan	Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang Barat	100/16	Persen/puskesmas	181.200.000	APBD		100/16	199.320.000

OPD : DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml	Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Pengelolaan bantuan operasional kesehatan (BOK)	Terlaksananya pengelolaan kegiatan bantuan operasional kesehatan (BOK)	Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang Barat	100	Persen	-	APBD		100	-
	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	Persentase puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar	Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang Barat	100/16	Persen/puskesmas	100.000.000	APBD		100/16	110.000.000
	Peningkatan upaya dan mutu kesehatan rujukan	-	Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang Barat	100	Persen	361.600.000	APBD		100	397.760.000
	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit	Sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai standar		1	RS	-	APBD		1	-
	Penyediaan data dan informasi kesehatan	Jumlah Dokumen/ Data		4	dokumen	258.375.000	APBD		4	284.212.500
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat					**499.800.000**				**240.460.000**
	Pemberdayaan masyarakat dengan berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Persentase rumah tangga yang ber-PHBS	Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang Barat	100	Persen	218.600.000	APBD		100	240.460.000
	Peningkatan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	Persentase Desa Siaga Aktif		100	Persen	281.200.000			100	
		Persentase Posyandu Purnama-Mandiri		100	Persen				100	
		Persentase Desa yang memanfaatkan dana Desa 10% untuk UKBM		100	Persen				100	
	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan					**1.739.000.000**				**1.664.300.000**
	Pengendalian dan pemberantasan penyakit menular	terduga Penderita TBC Paru mendapatkan pelayanan sesuai standar (%)	Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang Barat	100	Persen	291.000.000	APBD		100	320.100.000
		Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk		100	Persen				100	
		Penemuan dan penanganan penderita pneumonia balita (%)		100	Persen				100	
		Setiap orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar		100	Persen				100	

OPD : DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml	Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Pelayanan imunisasi	Cakupan imunisasi dasar lengkap bayi umur 0-11 bulan	Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang Barat	100	Persen	36.200.000	APBD		100	39.820.000
	Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah	Accute Flacyd Paralyse (AFP) rate / 100.000 anak usia kurang 15 tahun	Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang Barat	100	Persen	54.800.000	APBD		100	60.280.000
		Desa/kelurahan yang mengalami KLB ditangani < 24 jam		103	tiyuh				103	
	Pengendalian dan pemberantasan penyakit tidak menular	Persentase penurunan prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun	Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang Barat	100	Persen	834.900.000	APBD		100	918.390.000
		Persentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu								
		Persentase tiyuh yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM		100	100				100	
		Presentase perempuan usia 30 - 50 tahun yang di deteksi dini kanker serviks dan payudara		100	100				100	
		Penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	100				100	
		Penderita Diabetes Militus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	100				100	
	Pelayanan kesehatan jiwa	Persentase pelayanan gangguan jiwa di Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang Barat	100	Persen	26.100.000	APBD		100	28.710.000
		Setiap orang dgn gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	Persen				100	
	Peningkatan kualitas sanitasi dasar masyarakat	Jumlah tiyuh/kelurahan yang melaksanakan STBM		103	tiyuh	270.000.000			103	297.000.000
		Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat		100	Persen				100	

OPD : DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml	Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
		Persentase penduduk yang memiliki akses air bersih	Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang Barat	100	Persen		APBD		100	
	Peningkatan sanitasi tempat pengelolaan makanan dan tempat-tempat umum	perentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan		100	Persen	186.000.000			100	
		perentase tempat-tempau umum yang memenuhi syarat kesehatan		100	Persen				100	
	Pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja	Persentase Puskesmas yang menyenggarakan kesehatan kerja dasar		100/16	Persen/puskesmas	20.000.000			100/16	
	Pelayanan kesehatan olah raga	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olah raga pada kelompok masyarakat di wilayah kerja		100/16	Persen/puskesmas	20.000.000			100/16	
	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan					**636.762.000**				**700.438.200**
	Peningkatan ketersediaan obat yang aman, bermutu dan berkhasiat	Persentase ketersedian obat dan vaksin di puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang Barat	100	Persen	636.762.000	APBD		100	700.438.200
	Pendistribusian obat/ peralatan kesehatan puskesmas dan jaringannya	-		100	Persen	-	APBD		100	-
	Pengadaan peralatan kesehatan puskesmas dan jaringannya	Persentase kelengkapan alat kesehatan di puskesmas		80	Persen	-	APBD		80	-
	Pengadaan peralatan kesehatan rumah sakit	Persentase kelengkapan alat kesehatan di rumah sakit		80	Persen	-	APBD		80	-
	Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional					**19.857.600.000**				**21.843.360.000**
	Pelayanan kapitasi dan non kapitasi	Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional (JKN)	Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang Barat	70	Persen	14.857.600.000	APBD		70	16.343.360.000
	Pengelolaan dan jaminan kesehatan daerah / penerima bantuan iuran daerah (PBID)	Jumlah penduduk yang menjadi peserta PBI Daerah		15000	jiwa	5.000.000.000	APBD		15000	5.500.000.000
	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM)					**379.110.000**				**417.021.000**
	Peningkatan pendayagunaan tenaga kesehatan	Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan		17	Puskesma	270.505.000			17	297.555.500

OPD : DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml	Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
		Jumlah SDM kesehatan yang mempunyai kompetensi dalam pemberian pelayanan Kesehatan dan peningkatan mutu SDM Keseshatan	Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang Barat		s dan Rumah Sakit		APBD			
	Penilaian tenaga kesehatan teladan	Jumlah tenaga kesehatan yang berprestasi		6	nakes	66.235.000	APBD		6	72.858.500
	Penilaian jabatan fungsional tenaga kesehatan	Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kreditnya		110	nakes	42.370.000	APBD		110	46.607.000
JUMLAH						**35.260.000.000**				**38.107.153.500**

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml	Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					**2.200.000.000,00**				**2.420.000.000,00**
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Kab.TuBaBa			1.450.000.000,00	APBD			1.595.000.000
	Penyedeiaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab.TuBaBa			750.000.000,00	APBD			825.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					**14.250.000.000,00**				**15.675.000.000**
	Pembangunan Gedung Kantor		Kab.TuBaBa			7.000.000.000,00	APBD			7.700.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor		Kab.TuBaBa			500.000.000,00	APBD			550.000.000
	Pemelihraan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Kab.TuBaBa			500.000.000,00	APBD			550.000.000
	Pembangunan Sarana Pendukung Gedung Perkantoran		Kab.TuBaBa			5.250.000.000,00	APBD			5.775.000.000
	Pembangunan Saranan Pendukung Rumah Dinas Jabatan		Kab.TuBaBa			1.000.000.000,00	APBD			1.100.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur					**200.000.000,00**				**220.000.000**
	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Kab.TuBaBa			200.000.000,00	APBD			220.000.000
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan					**47.700.000.000,00**				52.470.000.000
	Pembangunan Jembatan		Kab.TuBaBa			12.000.000.000,00	APBD			13.200.000.000
	Peningkatan Jalan 1		Kab.TuBaBa			23.000.000.000,00	APBD			25.300.000.000
	Peningkatan Jalan 2		Kab.TuBaBa			12.700.000.000,00	APBD			13.970.000.000
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja					**450.000.000,00**				**495.000.000**
	Pembinaan, Peningkatan dan Pengendalian Tenaga Kontruksi		Kab.TuBaBa			450.000.000,00	APBD			495.000.000
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong					**1.000.000.000,00**				**1.100.000.000**
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 1		Kab.TuBaBa			1.000.000.000,00	APBD			1.100.000.000
							APBD			
	Program Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan					**15.000.000.000,00**	APBD			**16.500.000.000**

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml	Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan		Kab.TuBaBa			15.000.000.000,00	APBD			16.500.000.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah					**10.350.000.000,00**				**11.385.000.000**
	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Cipta Karya		Kab.TuBaBa			4.100.000.000,00	APBD			4.510.000.000
	Perencanaan Pembangunan Darah Bidang Bina Marga		Kab.TuBaBa			4.000.000.000,00	APBD			4.400.000.000
	Perencanaan Pembangunan Darah Bidang Irigasi		Kab.TuBaBa			2.000.000.000,00	APBD			2.200.000.000
	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan		Kab.TuBaBa			250.000.000,00	APBD			275.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Kebinamargaan					**6.850.000.000,00**				**7.535.000.000**
	Pengadaan Alat-alat Berat		Kab.TuBaBa			5.850.000.000,00	APBD			6.435.000.000
	Rehabilitas/Pememliharaan Alata-alat Berat		Kab.TuBaBa			1.000.000.000,00	APBD			1.100.000.000
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya					**1.000.000.000,00**				**1.100.000.000**
	Pemeliharaan Rutin Saluran dan Embung		Kab.TuBaBa			1.000.000.000,00	APBD			1.100.000.000
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku					**500.000.000,00**				**550.000.000**
	Pengelolaan dan Operasional SPAM		Kab.TuBaBa			500.000.000,00	APBD			550.000.000
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya					**250.000.000,00**				**275.000.000**
	Sosilaisasi dan Monitoring Sumber Daya		Kab.TuBaBa			250.000.000,00	APBD			275.000.000
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		Kab.TuBaBa			**77.450.000.000,00**				**85.195.000.000**
	Pembangunan/ Peningkatan Infrastuktur					73.100.000.000,00	APBD			80.410.000.000
	Peningkatan Jalan Lingkungan 1		Kab.TuBaBa			500.000.000,00	APBD			550.000.000
	Dukungan Kegiatan RSMW		Kab.TuBaBa			1.350.000.000,00	APBD			1.485.000.000
	Pengelolaan Kompleks Islamic Center dan Sesat Agung		Kab.TuBaBa			2.500.000.000,00				2.750.000.000

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml	Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Pemugaran Bangunan Bersejarah					**4.700.000.000,00**				**5.170.000.000**
	Pemugaran Bangunan Bersejarah 1		Kab.TuBaBa			2.000.000.000,00	APBD			2.200.000.000
	Pelestarian Bangunan Arsitektur Tradisional		Kab.TuBaBa			2.700.000.000,00	APBD			2.970.000.000
	Program Perencanaan Tata Ruang					**900.000.000,00**				**990.000.000**
	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah		Kab.TuBaBa			700.000.000,00	APBD			770.000.000
	Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang		Kab.TuBaBa			200.000.000,00	APBD			220.000.000
	Program Pemanfaatan Ruang					**4.500.000.000,00**				**4.950.000.000**
	Pemanfaatan Ruang Kawasan					4.500.000.000,00	APBD			4.950.000.000
JUMLAH						**187.300.000.000**				**206.030.000.000**

OPD : DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Jml	Sat					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					**489.800.000**				**489.800.000**
				Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkala	Dokumen RKA,Renja dan Pelaporan RFK	Tubaba	3	Dok	30.175.000	APBD		100%	30.175.000
				Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertib Administrasi Surat Menyurat Dinas dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas	Tubaba	12	Bulan	367.065.000	APBD		100%	367.065.000
				Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah	Tersedianya Buku Lakip	Tubaba	1	Dok	9.950.000	APBD		100%	9.950.000
				Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen LPPD	Tubaba	1	Dok	5.535.000	APBD		100%	5.535.000
				Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Daerah	Tersedianya Mobil Hias	Tubaba	1	Keg	17.075.000	APBD		100%	17.075.000
				Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Roller Blind Dan Kaca Flim	Tubaba	100	%	60.000.000	APBD		100%	60.000.000
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					**256.200.000**				**256.200.000**
				Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Opersional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	Tubaba	1	Thn	64.200.000	APBD		100%	64.200.000
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas	Tubaba	2	Unit	192.000.000	APBD		100%	192.000.000
				Program Pengelolaan Pertanahan					**9.640.000.000**				**9.640.000.000**
				Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Tersedianya Tanah Untuk Kepentingan Umum	Tubaba	51622/10	m2/Sertifikat	9.465.000.000	APBD		51622 m2/10 Sertifikat	9.465.000.000
				Upaya Penyelesaian Konflik-Konflik Pertahanan	Mediasi Sengketa	Tubaba	3	Kasus	175.000.000	APBD		2 Kasusu	175.000.000
				Program Pemanfaatan Ruang					**1.984.000.000**				**1.984.000.000**
				Pembuatan dan Perawatan Taman	Terbangun dan Terpeliharanya Taman Kota di Tubaba	Tubaba	12	Bulan	1.725.124.000	APBD		12 Bulan	1.725.124.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Pembangunan Taman Ekowisata DAN Edukasi Embung	Terbangunnya Taman Ekowisata dan Edukasi	Tubaba	1 Keg	258.876.000	APBD		1 Keg	258.876.000
	Program Pengembangan Perumahan				**4.385.000.000**				**4.385.000.000**
	Penyusunan Rencana Pembangunan,Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	Tersedianya Perda RP3KP	Tubaba	1 Perda	100.000.000	APBD			100.000.000
	Pemeliharaan dan Pengelolaan Rumah Susun ASN	Berjalanya Pengelolaan RUSUNAWA	Tubaba	12 Bulan	200.000.000	APBD			200.000.000
	Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2020	Berjalanya Bantuan BSPS 2020	Tubaba	12 Bulan	275.000.000	APBD			275.000.000
	Perencanaan dan Pengawasan Landcleaning dan Pembentukan Badan Jalan Distrik Uluan Nughik	Perencanaan dan Pengawasan	Tubaba	1 Dok	100.000.000	APBD			100.000.000
	Perencanaan Perkotaan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perkotaan	Tubaba	1 Dok	1.725.999.500	APBD			1.725.999.500
	Penyusunan Dokumen UPL dan UKL	Tersedianya Dokumen UKL UPL	Tubaba	1 Dok	120.000.000	APBD			120.000.000
	Landcleaning dan Pembentukan Badan Jalan	Terbentuknya Badan Jalan	Tubaba	6 Bulan	1.864.000.500	APBD			1.864.000.500
JUMLAH					**16.498.800.000**				**16.498.800.000**

OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	BPBD	1 tahun	275.000.000	APBD		1 Thn	302.500.000
									-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								-
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya sewa kendaraan	BPBD	1 tahun	96.000.000	APBD		1 Thn	105.600.000
	Pengadaan gedung/kantor/gudang	Tersedianya sewa	BPBD	1 tahun	32.500.000	APBD		1 Thn	35.750.000
	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan	Terpeliharanya kendaran dinas	BPBD	1 tahun	74.500.000	APBD		1 Thn	81.950.000
									-
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam								-
	Sosialisasi penguranga resiko bencana	Terlaskananya pengurangan resiko bencana	BPBD	1 keg	18.000.000	APBD		1 Thn	19.800.000
	Pemantaun dan monitoring penanggulangan bencana	terlaksannya pemantauan monitoring	BPBD	1 keg	10.000.000	APBD		1 Thn	11.000.000
	peningkatan peranan pemuda dalam bidang rekontruksi diwilayah pasca bencana	Terlaksanya sosialisasi penngkatan peranan pemuda dalam bidang rekonstruksi di wilayah pasca	BPBD	1 keg	12.000.000	APBD		1 Thn	13.200.000
JUMLAH					**518.000.000**				**569.800.000**

OPD : BADAN KESATUAN BANGSA dan POLITIK DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
1	**Program pelayanan Administrasi umum**				**442.500.000**				**442.500.000**
	Peningkatan pelayanan Administrasi perkantoran	Penyedian jasa Administrasi Keuangan	Kesbangpol	1 Tahun	85.800.000	APBD			85.800.000
		Penyediaan Alat tulis Kantor	Kesbangpol	1 Tahun	31.530.000	APBD			31.530.000
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kesbangpol	1 Tahun	6.000.000	APBD			6.000.000
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kesbangpol	1 Tahun	9.670.000	APBD			9.670.000
		Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas	Kesbangpol	1 Tahun	5.000.000	APBD			5.000.000
		Penyediaan Jasa Kominikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Kesbangpol	1 Tahun	9.600.000	APBD			9.600.000
		Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kesbangpol	1 Tahun	24.000.000	APBD			24.000.000
		Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Kesbangpol	1 Tahun	11.225.000	APBD			11.225.000
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Kesbangpol	1 Tahun	95.700.000	APBD			95.700.000
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Kesbangpol	1 Tahun	123.000.000	APBD			123.000.000
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	Kesbangpol	23 Tahun	26.750.000	APBD			26.750.000
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Persentase Kebutuhan Peralatan Kantor	Kesbangpol	1 Tahun	6.600.000	APBD			6.600.000
	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kesbangpol	5 Tahun	7.625.000	APBD			7.625.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**				**143.000.000**	**APBD**			**96.000.000**
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	kesbangpol		47.000.000				
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas	kesbangpol	1 Unit	96.000.000	APBD			96.000.000
3	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**				**32.500.000**				**32.500.000**
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Terpenuhinya Pakaian Dinas ASN	Tubaba		17.500.000	APBD			17.500.000
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu	Terpenuhinya Pakaian Dinas ASN	Tubaba		15.000.000				15.000.000
3	**Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**				**37.500.000**	**APBD**			**37.500.000**
	Kegiatan Penanganan Konflik Sosial (PKS)	Jumlah rakor Penyelesaian Potensi Konflik Sosial	Tubaba	3 Rakor	12.500.000	APBD			12.500.000
	Pengawasan Orang Asing (POA)	Jumlah Rapat Koordinasi dan Pengawasan Orang Asing	Tubaba	3 Rakor	12.500.000	APBD			12.500.000
	Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi FKDM	Tubaba	2 Rakor	12.500.000	APBD			12.500.000
4	**Program Pendidikan Politik Masyarakat**				**22.500.000**				
	Kegiatan Verifikasi / Sosialisasi ormas dan LSM	Jumlah/Ormas/LSM Yang Terverifikasi	Tubaba	80 LSM	12.500.000	APBD			12.500.000
	Verifikasi berkas dan Fasilitasi Penyerahan Bantuan Keuangan pada partai politik				10.000.000				10.000.000
JUMLAH					**678.000.000**				**608.500.000**

OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kerja Jml	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Program pelayanan Administrasi perkantoran								
	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Honorarium polpp &damkar,Honorarium pengelola keuangan ,ATK,fotokopi,SPPD,Koran makan minum	Satpol pp	100	4.000.000.000	APBD		100	4.400.000.000
									-
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								-
	Penyiapan Tenaga Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Penjagaan Pejabat,Rumah Jabatan,Taman dan Lingkungan Pemda	Satpol pp	12 bln	600.000.000	APBD		12 bln	660.000.000
									-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								-
	Pelatihan Korps Musik	Kecakapan Anggota Dalam bermain Korsik	Satpol pp	Anggota Korsik 20 Orang	75.000.000	APBD		Anggota Korsik 20 Orang	82.500.000
									-
	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur								-
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan Dinas	Satpol pp	1 Unit	96.000.000	APBD			105.600.000
	pemeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas/operasional	kendaraan dinas yang terawat secara berkala	Satpol pp	100	238.000.000	APBD		100	261.800.000
JUMLAH					**5.009.000.000**				**5.509.900.000**

OPD : DINAS SOSIAL

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Program Administrasi Perkantoran				**236.000.000**				**490.000.000**
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Caakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Publik	SOSIAL	100 %	212.000.000			100	450.000.000
	Penyelenggaraan Pameran Daerah	Penyelenggaraan Pameran Daerah HUT TBB		1 Keg	15.000.000			1	25.000.000
	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah		5 Dok	9.000.000			5	15.000.000
	Program Perencanaan Pembangunan				**12.500.000**				**15.000.000**
	Penyusunan Renja dan RKA SKPD	Penyusunan RKPD	SOSIAL	2 Dok	12.500.000			2	15.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				**147.500.000**				**136.000.000**
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Waktu Sewa Kendaraan Dinas	SOSIAL	1 Thn	96.000.000			1	96.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Konsumsi BBM Untuk Kendaraan Dinas	SOSIAL	1 Thn	51.500.000			1	40.000.000
	Program Pelayanan Dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial				**4.079.000.000**				**4.295.000.000**
	Kegiatan Maju dan Sejahtera (Mantra Tubaba)	Jumlah Bantuan Sembako Bagi Masyarakat Kurang Mampu Tepat Waktu	SOSIAL	60000 Paket	4.000.000.000			60000	4.000.000.000
	Kegiatan Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia (ASLUT)	Penyedian Data Aslut	SOSIAL	4 Kec	12.000.000			4	50.000.000
	Pelayanan dan Rehabilitas Sosial Penyandang Cacat	Penyediaan Data Penyandang Cacat	SOSIAL	4 Kec	15.500.000			4	80.000.000
	KegiataAlam dan Peningkatan Kapasitas Bencana Sosial (TAGANA)	Gedung Penyimpanan Sembako	SOSIAL		13.000.000				50.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Pendampingan Program Keluarga Harapan	Jumlah Posko Pendampingan PKH	SOSIAL	1 Gedung	13.500.000			1	15.000.000
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH)	Data Masyarakat Yang Memperoleh Bantuan Program Pemerintah RS_RTLH	SOSIAL	4 Kec	12.000.000			4	50.000.000
	Validasi Verifikasi Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT)	Pelayanan Masyarakat Bagi Penerimaan Untuk BPNT	SOSIAL	9 Kec	13.000.000			9	50.000.000
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				**25.000.000**				**100.000.000**
	Penanaman Nilai-Nilai Perjuangan Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan	Kegiatan Upacara dan Tali Asih Veteran	SOSIAL	1 Keg	16.000.000			1	50.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Jumlah LKSA yang di Monev	SOSIAL	1 Tahun	9.000.000			1	50.000.000
JUMLAH					**4.500.000.000**				**9.582.000.000**

OPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml	Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	ProgramPelayanan Administrasi Perkantoran					**290.864.000**				**319.950.400**
	Peningkatan pelayanan adminstrasi perkantoran		Tubaba	100	%	273.464.000				300.810.400
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kator		Tubaba			2.400.000				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Laporan Berkala	Peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah	Tubaba	100	%	15.000.000				16.500.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah					**75.000.000**				**82.500.000**
	Penyusunan Renja dan RKA	Terwujudnnya pemerintahan yang efektif dan efisien	Tubaba	100	%	15.000.000				16.500.000
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah		Tubaba	100	%	60.000.000				66.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					**138.700.000**				**138.700.000**
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Tubaba	1	Keg	96.000.000				96.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Tubaba	1	Keg	42.700.000				42.700.000
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja					**26.822.000**				
	Iventarisasi Lembaga Pelatihan Kerja		Tubaba	1	Keg	26.822.000				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja				**65.000.000**				**71.500.000**
	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Peningkatan kualitas dan produktifitas angkatan kerja di daerah	Tubaba	100 %	65.000.000				71.500.000
	Program Perlindungan, Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan				**90.340.000**				**90.340.000**
	Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan		Tubaba	100 %	30.800.000				30.800.000
	Pembinaan Hubungan Antara Perusahaan Dan Pekerja		Tubaba	100 %	24.540.000				24.540.000
	Menentukan Upah Minimum Sektoral Kabupaten		Tubaba	100 %	35.000.000				35.000.000
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi				**45.000.000**				**49.500.000**
	Investasi lahan eks transmigrasi dan penyelesaian masalah pertanahan	Peningkatan kualitas dan produktifitas angkatan kerja di daerah	Tubaba	100 %	45.000.000				49.500.000
JUMLAH					**704.904.000**				**775.394.400**

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Jml	Sat					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
				Program Administrasi Perkantoran					**257.500.000**				**283.250.000**
				Peningkatan Pelayanan administrasi perkantoran	Aparatur Pemerintah (17 Personil)	Kabupaten Tulang Bawang Barat	17 Aparatur Pemerintah	Orang	257.500.000	APBD		17 Aparatur Pemerintah	283.250.000
				Program Peningakatan Sarana dan Prasarana Aparatur					**137.000.000**				**150.700.000**
				Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Penyedia Kendaraan Dinas	Kabupaten Tulang Bawang Barat	1	Unit	96.000.000	APBD		1	105.600.000
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Lancarnya Kegiatan Operasional Dinas	Kabupaten Tulang Bawang Barat			41.000.000	APBD			
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah					**35.000.000**				**38.500.000**
				Penyusunan Renja dan RKA SKPD	Tersusunnya Renja SKPD	Kabupaten Tulang Bawang Barat	1	Dok	35.000.000	APBD		1	38.500.000
				Program Penguatan Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender) dan Anak					**120.000.000**				**132.000.000**
				Pembinaan dan Pengembangan Puskesmas ramah anak dan sekolah ramah anak	Terbentuknya Puskesmas ramah anak dan sekolah ramah anak	Kabupaten Tulang Bawang Barat	6 puskesmas 27 sekolah	unit	75.000.000				82.500.000
				Fasilitasi Pengembangan P2TP2A Kabupaten Tulang Bawang Barat	Perempuan dan anak kab.Tulang Bawang Barat	Kabupaten Tulang Bawang Barat	1	unit	45.000.000				49.500.000
				Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutaman Gender dan Anak					**120.000.000**				**132.000.000**

				Fasilitas Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak		Kabupaten Tulang Bawang Barat			45.000.000				49.500.000
				Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Upaya Pencapaian Kabupaten Layak Anak(KLA)		Kabupaten Tulang Bawang Barat			75.000.000				82.500.000
				Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan					**202.500.000**				**222.750.000**
				Peringatan Hari Kartini	Peringatan Hari Kartini	Kabupaten Tulang Bawang Barat	1	~~keg~~	50.000.000				
				Peringatan Hari Ibu	Peringatan hari Ibu	Kabupaten Tulang Bawang Barat	1	keg	100.000.000				
				Peningkatan Peran Perempuan dalm Mewujudkan Keluarga Sehat Sejahtera(P3KSS)	Kader kader di tiyuh dan 100 warga binaan di 1 tiyuh 1 kecamatan	Kabupaten Tulang Bawang Barat	150	warga dan kader	52.500.000				57.750.000
JUMLAH									**872.000.000**				**959.200.000**

SKPD : DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				**327.990.000**				
	Penyusunan RKA,LAKIP,dan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA,LAKIP dan Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	3	10.090.000	APBD		4 Dokumen	12.000.000
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu	Dinas Ketahanan Pangan	100%	300.000.000	APBD		1 Tahun	248.000.000
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor		Dinas Ketahanan Pangan		17.900.000				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				**149.016.000**				
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Sarana Transportasi Yang Dapat Mendukung Operasional Kantor	Dinas Ketahanan Pangan	12	96.000.000	APBD		1 Tahun	96.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional Kantor	Dinas Ketahanan Pangan	12	53.016.000	APBD		1 Tahun	68.520.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				**11.250.000**				
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Kantor	Dinas Ketahanan Pangan	22	11.250.000	APBD		1 Tahun	18.500.000
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan(Pertanian/Perkebunan)				**118.000.000**				

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
				Lomba Cipta Menu Tingkat Kabupaten	Jumlah Penyelenggaraan Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung	1	60.000.000	APBD		1 Keg	75.000.000
				Sosialisasi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat(P-LDPM)	Jumlah P-LDPM Yang di Sosialisasikan	Kelompok Tani Tulang Bawang Bawang	1	25.000.000	APBD		1 Keg	30.000.000
				Penyusunan Peta Rawan Pangan (FSVA)	Jumlah Dokumen FSVA	Dinas Ketahanan Pangan	1	33.000.000	APBD		1 Keg	35.000.000
				Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				**62.000.000**				
				Peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	Volume Pembelian Beras Untuk Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah	Tulang Bawang Barat	1200	37.000.000	APBD		1 Keg	50.000.000
				Pembinaan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	Jumlah Pembinaan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	Kelompok Tani Tulang Bawang Bawang	1	25.000.000	APBD		1 Keg	300.000.000
JUMLAH								**668.256.000**				**933.020.000**

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kerja Sat	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
				Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup				**265.000.000**				**265.000.000**
1				Pemantauan Kualiatas Lingkungan	Nilai IKLH Kab, Tulang Bawang Barat	TUBABA	60-70%	40.000.000	APBD		60-70%	40.000.000
2				Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Usaha/Kegiatan Yang Di pantau Dalam Penataan Izin Lingkungan dan IPPL	TUBABA	20 Usaha/ Kegiatan	50.000.000	APBD		20 Usaha/ Kegiatan	50.000.000
3				Pengelolaan B3 Dan Limbah B3	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pengelolaan B3	TUBABA	10 Usaha/ Kegiatan	20.000.000	APBD		10 Usaha/ Kegiatan	20.000.000
4				Koordinasi Penyusunan AMDAL	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup Yang Disusun Dan Diperiksa Kelayakannya	TUBABA	20 Dokumen Lingkungan Usaha/kegiatan	30.000.000	APBD		20 Dokumen Lingkungan Usaha/kegiatan	30.000.000
5				Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Tersusunnya Peraturan Daerah Kabupatan Tulang Bawang Barat Tentang Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	TUBABA	1 Perda RPPLH	50.000.000	APBD	Prioritas	1 Perda	50.000.000
6				Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat Peduli Lingkungan	TUBABA	5 Kelompok	75.000.000	APBD	5 Kelompok		75.000.000
				Program Pengembangan Ekowisata Dan Jasa Lingkungan Dikawasan-Kawasan Konservasi laut Dan Hutan				**100.000.000**				**100.000.000**
7				Program Pengembangan Ekowisata Dan Jasa Lingkungan Dikawasan Konservasi	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Konservasi Taman Kura-kura	TUBABA	1 RTH	100.000.000	APBD	Prioritas	1 RTH	100.000.000
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				**958.000.000**				**958.000.000**

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kerja Sat	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
8				Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	TUBABA	56%	958.000.000	APBD	Prioritas	56%	958.000.000
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				**394.000.000**				**394.000.000**
9				Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Laporan Berkala	Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Laporan Berkala Serta Tersedianya Dokumen Renja dan RKA SKPD	DLH	6 Dokumen	10.000.000	APBD		6 Dokumen	10.000.000
10				Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	DLH	100%	384.000.000	APBD		100%	384.000.000
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				**248.000.000**				**248.000.000**
11				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional	DLH	1 Unit	96.000.000	APBD		1 Unit	96.000.000
12				Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan /Operasional	Terawatnya Kendaraan Dinas/Operasional	DLH	7 Unit	92.000.000	APBD		7 Unit	92.000.000
13				Pengadaan Meubelur	Tersedianya Meubelur Kantor	DLH	1 Paket	60.000.000	APBD		1 Paket	60.000.000
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur				**10.000.000**				**10.000.000**
14				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapan nya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	DLH	16 Stel	10.000.000	APBD		16 Pegawai	10.000.000
				JUMLAH				**1.975.000.000**				**1.975.000.000**

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Jml	Sat					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
				Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Efektif dan Efesien	Disdukcapil	100	%	357.988.000	DAU		100	357.988.000
				Laporan Akuntibilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Lakip	Disdukcapil	1	Dok	1.500.000	DAU		1	1.500.000
				Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah	LPPD	Disdukcapil	1	Dok	1.500.000	DAU		1	1.500.000
				Laporan Keterangan Pertanggungjawaban	LKPJ	Disdukcapil	1	Dok	542.000	DAU		1	542.000
				Penyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan	Disdukcapil	1	Dok	1.700.000	DAU		1	1.700.000
				Peyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Laporan Keuangan	Disdukcapil	2	Dok	1.300.000	DAU		2	1.300.000
				Penyelenggaraan Pameran Daerah	Pameran Daerah	Disdukcapil	Ikut Berpatisipasi dalam Pameran Daerah		18.000.000	DAU		Ikut Berpatisipasi dalam Pameran Daerah	18.000.000
				Program Peningkatan Sarana dan Perasarana Aparatur									
				Pengadaan Kendaraan Dinas	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	Disdukcapil	1	Unit	96.000.000	DAU		1	96.000.000
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Disdukcapil	100	%	3.000.000	DAU		100	3.000.000
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Disdukcapil	100	%	4.000.000	DAU		100	4.000.000
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Disdukcapil	100	%	44.800.000	DAU		100	44.800.000

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Jml	Sat					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Disdukcapil	100	%	4.000.000	DAU		100	4.000.000
				Program Penataan Adminstrasi Kependudukan									
				Peningkatan Sistem dan Inovasi Pelayanan	Sistem Pelayanan Yang Modern	Disdukcapil	Efisiensi dan efektivitas Pelayanan		250.000.000	DAU		Pelayanan Berbasis Digital	250.000.000
				Peningkatan Kinerja Aparatur Kependudukan	Peningkatan Kinerja Aparatur Kependudukan	Disdukcapil	100	%	850.000.000	DAU		Aparatur Yang Berkompetensi	850.000.000
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah									
				Penyusunan Renja dan RKA SKPD	Tersusunnya Renja dan RKA Disdukcapil	Disdukcapil	3	Dok	2.570.000	DAU		3	2.570.000
				Penyusunan RFK SKPD	RFK dan Tepra	Disdukcapil	12	Dok	5.100.000	DAU		12	5.100.000
JUMLAH									**1.642.000.000**				**1.642.000.000**

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml	Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					**400.800.000**				**400.800.000**
	Penyusun Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkala	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkala	DPMT	100	%	8.000.000	APBD		100	8.000.000
	Penyediaan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMT	100	%	24.000.000	APBD		100	24.000.000
	Peningkatan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	DPMT	100	%	368.800.000	APBD		100	368.800.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					**189.200.000**				**189.200.000**
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	DPMT	100	%	96.000.000	APBD		100	96.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasonal	DPMT	100	%	93.200.000	APBD		100	93.200.000
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan					**360.000.000**				**360.000.000**
	Gelar Nasional dan Teknologi Tepat Guna	Partisipasi dalam Pelaksanaan Pameran TTG Nasional	DPMT	1	Event	67.000.000	APBD		1	67.000.000
	Lomba PKK	Terrjalinnya Kegiatan PKK dalam Pelaksanaan HUT Kabupaten Tulang Bawang Barat	DPMT	2	Event	80.000.000	APBD		2	80.000.000
	Jambore PKK	Terciptanya Kader-kader PKK yang Berkualitas	DPMT	2	Event	50.000.000	APBD		2	50.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml	Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Pembinaan PKK	Terrciptanya Anggota PKK yang Berkualitas	DPMT	4796	Org	100.000.000	APBD		4796	100.000.000
	Pembinanaan dan Pengembangan BUMTI	Peningkatan Kualitas dan Pengenbangan Jenis Usaha Badan Usaha Milik Tiyuh Untuk Peningkatan PAT dan Kesejahteraan Tiyuh	DPMT	94	BUMTi	33.000.000				33.000.000
	RAKON DAN RAKOR PKK	Terciptanya Program-program PKK	DPMT	2	Rakon	30.000.000	APBD		2	30.000.000
	Program Peningkatan Partisipasi Masyrakat Dalam Membangun Desa					**295.000.000**				**295.000.000**
	Lomba Tiyuh	Meningkatkan Aparatur dan Masyarakat Dalam Lomba Tiyuh	DPMT	1	Event	50.000.000	APBD		1	50.000.000
	Bulan Bakti Gotong Royong	Terlaksananya Perencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	DPMT	1	Event	60.000.000	APBD		1	60.000.000
	Pendampingan dan Pembinaan Penyusunan Indek Desa Membangun(idm)	Persentase Terlaksanya IDM	DPMT	93	Tiyuh	50.000.000	APBD		93	50.000.000
	Pameran Hasil Usaha Masyarakat Tiyuh	Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Produksi Kerajinan,Industri Rumah Tangga dan Ekonomi Kreatif Tingkat Kabupaten dan Provinsi	DPMT	2	Event	35.000.000	APBD		2	35.000.000
	Tiyuh Siaga Mandiri	Upaya Menciptakan Terwujudnya Tiyuh Siaga	DPMT	2	Tiyuh	100.000.000	APBD		2	100.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Tiyuh					**490.000.000**				**490.000.000**
	Penyelenggaraan Tata Kelola Penyusunan Profil Tiyuh	Terselenggaranya Tata Kelola Profil Desa Yang Baik	DPMT	93	Tiyuh	100.000.000	APBD		93	100.000.000

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Jml	Sat					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
				Pelatihan Pengembangan Potensi Tiyuh/Kewirausahaan	SDM TiyuhTerlaksananya Pengembangan Potensi Tiyuh Dan Pelatihan Manajemen Pariwisata Bagi SDM Tiyuh Dalam Rangka Peningkatan PAT dan Kesejahteraan Tiyuh	DPMT	93	Tiyuh	200.000.000	APBD		93	200.000.000
				Peningkatan Kapasitas Kader PKK	Terlaksanya Kapasitas Kader PKK	DPMT	93	Tiyuh	150.000.000	APBD		93	150.000.000
				Fasilitas Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persentase Desa Yang Mendapatkan Fasilitas Dalam Peningkatan Kapasitas Lembag Kemasyarakatan Desa dan Meningkatkan Peran Serta Lembag Kemasyarakatan Desa	DPMT	6	Lembaga	40.000.000	APBD		6	40.000.000
				Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Tiyuh					**160.000.000**				**160.000.000**
				Asistensi dan Pendampingan Penyusunan RPJM,RKP dan APBT	Terselenggaranya Pelaksanaannya Asistensi dan Pendampingan Penyusunan RPJM,RKP dan APBT	DPMT	93	Tiyuh	160.000.000	APBD		93	160.000.000
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah					**10.000.000**				**10.000.000**
				Penyusunan Renja dan RKA SKPD	Tersedianya Dokumen Renja dan RKA SKPD	DPMT	100	%	10.000.000	APBD		100	10.000.000
JUMLAH									**1.905.000.000**				**1.905.000.000**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml	Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)

OPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Jml	Sat					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					**334.000.000**				**334.000.000**
				Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran	Tubaba	1	Keg	334.000.000	APBD		1	334.000.000
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					**166.000.000**				**166.000.000**
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatkan Mobilisasi Kualitas Mobilisasi Pelayanan Terhadap Masyarakat	Tubaba	1	unit	96.000.000	APBD		1	96.000.000
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasioanal	Meningkatkan Mobilisasi Kualitas Mobilisasi Pelayanan Terhadap Masyarakat	Tubaba	3	Keg	70.000.000	APBD		3	70.000.000
				Program Keluarga Berencana					**300.000.000**				**300.000.000**
				Kesatuan GerakPKK, KB dan Kesehatan	Meningkatkan Mobilisasi Kualitas Mobilisasi Pelayanan Terhadap Masyarakat	Tubaba	3	Keg	300.000.000	APBD		3	300.000.000
				Peningkatan Kualitas Pelayanan KB Bagi Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 (DAK)	Meningkatkan Mobilisasi Kualitas Mobilisasi Pelayanan Terhadap Masyarakat	Tubaba	1	Keg		APBD		1	-
				Peningkatan Pelayanan dan Melalui Balai Penyuluhan KB	Meningkatkan Mobilisasi Kualitas Mobilisasi Pelayanan Terhadap Masyarakat	Tubaba	27	Keg		APBD		27	
JUMLAH									**800.000.000**				**800.000.000**

OPD : DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Program Pelayanan Admistrasi Perkantoran	**Persentase Tertib Administarsi Perkantoran**			**434.885.000**				**434.885.000**
	Peningkatan Pelayanan Admistrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dishub Kab. Tubaba	12 Bln	394.283.000	APBD		12 BLn	394.283.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkala	Tersedianya Lakip Setiap Tahunnya	Dishub Kab. Tubaba	2 Dok	2.062.000	APBD		2Dok	2.062.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Laptop dan Printer	Dishub Kab. Tubaba	1 Unit	11.200.000	APBD		2 Unit Laptop	11.200.000
	Penyelenggaraan Pameran Daerah	ikut Sertanya Dishub Dalam Penyelenggaraan Pameran Daerah	Dishub Kab. Tubaba	1 1	25.000.000	APBD		1Keg	25.000.000
	Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun dan LPPD	Jumlah Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dishub Kab. Tubaba	2 Dok	2.340.000	APBD		2Dok	2.340.000
	Program Pengembangan Data/informasi				**5.474.000**				**5.474.000**
	Pengelolaan Sistem Informasi Bidang Kepegawaian(e-Kinerja)	Jumlah Tersedianya Data/informasi Bidang Kepegawaian	Dishub Kab. Tubaba	1 Dok	5.474.000	APBD		1	5.474.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	**Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD**			**3.391.000**				**3.391.000**
	Penyusunan Dokumen Renja Dan RKA SKPD	Tersedianya Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran	Dishub Kab. Tubaba	4 Dok	3.391.000	APBD		4	3.391.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Tersedianya dan Terpiliharanya sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Standar**			**155.000.000**				**172.250.000**
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional	Tubaba	12 Bln	116.000.000	APBD		12	116.000.000
	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Belanja BBM dan Pajak Kendaraan	Tubaba	12 Bln	39.000.000	APBD		12	39.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				**17.250.000**				
	Pengadaan Pakaian Dinas Harian(PDH)	Jumlah Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai	Tubaba	20 Stell	11.500.000	APBD		20	11.500.000
	Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu	Jumlah Tersedianya Pakaian Batik Tradisional Pegawai	Tubaba	20 Stell	5.750.000	APBD		20	5.750.000
	Program Pengembangan Data/informasi				**5.474.000**				
	Pengelolaan Sistem Informasi Bidang Kepegawaian(e-Kinerja)		Tubaba		5.474.000				
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	**Rata-Rata Penurunan Angka Kecelakaan Transportasi**			**45.000.000**				**45.000.000**
	Pengendalian dan Pengawasan Operasional Manajemen Rekayasa Lalulintas	Melakukan Sistem Rekayasa Lalu Lintas Pada Titik Rawan Kemacetan dan Kecelakaan	Tubaba	12 Bln	45.000.000	APBD		12 Bln	45.000.000

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Jml	Sat					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
				Program Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasrana	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan**				**474.000.000**				**474.000.000**
				Peningkatan Pelayanan KIR Memberi Pelayanan Prima dan Peningkatan PAD Kab.Tulang Bawang Barat	Perencanaan dan Penetapan Perda Terkait Pelaksanaan dan Penerapan Parkir Berlangganan	Tubaba	12	Bln	37.300.000	APBD		12 Bln	37.300.000
				Pengadaan Fasilitas LLAj	Jumlah Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan(Rambu Keselamatan)	Tubaba	16	Unit	7.700.000	APBD		16 Unit	7.700.000
				Perawatan dan Perbaikan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)	Tersedianya Penerangan Jalan Umum Di Wilayah Kab.Tubaba	Tubaba	12	Bln	429.000.000	APBD		12 Bln	429.000.000
				Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	**Akses Angkutan Umum Yang Menghubungan Dengan ibu Kota Kecamatan**				**45.000.000**				**45.000.000**
				Pembentukan Tim Penilai Amdalallin	Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Dokumen andalalin	Tubaba	6	Bln	20.525.000	APBD		6	20.525.000
				Pengumpulan Dokumen Dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan(Jasa Konsultasi)	Jumlah Dokumen dan Analisis database Lalulintas dan Pelayanan Angkutan	Tubaba	1	Dok	15.250.000	APBD		1	15.250.000
				Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru	Jumlah Data Perbandingan Jumlah Angkutan Terhadap Jumlah Penumpang pada Masa Angkutan Lebaran,Natal dan Tahun Baru	Tubaba	1	Dok	9.225.000	APBD		1	9.225.000
JUMLAH									**1.185.474.000**				**1.180.000.000**

OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Jml	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				**668.790.000**				**652.069.000**
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Kantor Berupa Barang dan Jasa	Tulang Bawang Barat	12	592.790.000	APBD		100	652.069.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor	Tulang Bawang Barat	7	76.000.000	APBD		7	83.600.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur				**174.280.000**				191.708.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	Tulang Bawang Barat	1	96.000.000	APBD		1	105.600.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan/Operasional Kendaraan Dinas	Tulang Bawang Barat	2	78.280.000	APBD		2	86.108.000
	Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Masa				**2.626.930.000**				**2.889.623.000**
	Partisipasi Publikasi Melalui Pomosi Daerah	Keikutsertaan dalam promosi daerah	Tulang Bawang Barat	1	30.000.000	APBD		1	33.000.000
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Pembinaan Pengawasan Menara Tower Telekomunikasi, Warnet dan Radio	Data menara telekomunikasi	Tulang Bawang Barat	82	30.000.000	APBD		82	33.000.000
	Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Tersedianya buku dan video tentang pembangunan tubaba	Tulang Bawang Barat	1	150.000.000	APBD		1	165.000.000
	Pembentukan dan Pengolaan Media Center	Jumlah layanan	Tulang Bawang Barat	1	52.150.000	APBD		1	57.365.000

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Jml	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
				Penerbitan Buletin Surat Kabar Daerah	Jumlah buletin yang terbit	Tulang Bawang Barat	3	45.235.000	APBD		3	49.758.500
				Penerbitan Buku Selayang Pandang	Jumlah buku	Tulang Bawang Barat	1	70.000.000	APBD		1	77.000.000
				Pengelolaan dan Pemuktahiran Web site	Jumlah pengunjung	Tulang Bawang Barat	1	140.000.000	APBD		1	154.000.000
				Operasional Peliputan dan Pelayan Dokumentasi	Jumlah dokumentasi	Tulang Bawang Barat	1	94.500.000				103.950.000
				Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Advetorial	Tulang Bawang Barat	2	1.950.630.000				2.145.693.000
				Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah kelompok	Tulang Bawang Barat	2	64.415.000				70.856.500
				Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi				**30.000.000**				**33.000.000**
				Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)	Persentase penerapan sistem E-Gov terhadap opd	Tulang Bawang Barat		30.000.000			1	33.000.000
JUMLAH								**3.500.000.000**				**3.766.400.000**

OPD : DINAS KOPERASI UMKM, PERINDUSTRIAN dan PERDAGANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	**Pertumbuhan Jumlah UMKM(Unit)**							
	Sosialisasi informasi Dukungan Penyedian Permodalan	Jumlah Peserta (Pengurus Koperasi dan Pelaku UMKM) Yang Mengikuti (Orang)	Kab.TUBABA	40	88.000.000	APBD		50	100.000.000
	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	**Jumlah UMKM Yang Memiliki IUMK (Unit)**							
	Monitoring ,Evaluasi Dan Pelaporan Perkembangan UMKM	Jumlah Kecamatan Yang dilaksanakan Monitoring (Kecamatan)	Kab.TUBABA	4	95.000.000	APBD		2	150.000.000
	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Peserta Pelatihan(Peserta)	Kab.TUBABA	30	93.000.000	APBD		35	574.040.000
	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Kegiatan Promosi/Pameran Yang Dilaksanakan(Pameran)	Kab.TUBABA	2	195.000.000	APBD		1	300.000.000
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	**Koperasi Baru Yang Tumbuh Pertumbuhan Jumlah Koperasi Aktif**							
	Peningkatan Kapasitas Pengelola Koperasi	Jumlah Peserta (Pengurus) Koperasi Yang Mengikuti (30 Peserta)	Kab.TUBABA	30	155.000.000	APBD		25	175.000.000
	Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah Kegiatan Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi Selama 1 Tahun (kali)	Kab.TUBABA	1	87.000.000	APBD		1	200.000.000
	Pelatihan Penyusunan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Bagi Koperasi Baru	Jumlah Koperasi Yang di Latih (Kopi)	Kab.TUBABA	10	94.000.000	APBD		5	175.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	**Jumlah Jenis Pengawasan Barang Beredar (Jenis)**							
		Jumlah UTTP							
	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Jumlah Pengawasan (Sidak Pasar) Yang Dilaksanakan (kali)	Kab.TUBABA	2	80.000.000	APBD		2	120.000.000
	Tera Ulang Alat UTTP	Jumlah UTTP yang di Tera (UTTP)	Kab.TUBABA	300	150.000.000	APBD		50	139.000.000
	Peningkatan Ketersedian Data Kemetrologian	Jumlah Dokumen Potensial UTTP Yang Tersususn (dok)	Kab.TUBABA	1	80.000.000	APBD		1	50.000.000
	Monitoring Penyaluran Barang Bersubsidi	Jumlah Monitoring Yang Di laksanakan(Kegiatan)	Kab.TUBABA	1	150.000.000	APBD		1	50.000.000
	Pemantauan Dan Informasi stock dan Harga Bahan Pokok dan Barang Strategis	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan Yang Tersususn (Laporan)	Kab.TUBABA	3	75.000.000	APBD		2	60.000.000
	Penyuluhan dan Sosialisasi Tentang Perlindungan Konsumen	Jumlah Sosialisasi (Peserta)	Kab.TUBABA	105	165.000.000	APBD		40	50.000.000
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	**Jumlah Pasar Rakyat Yang Dibangun/Revitalisasi**							
	Sosialisasi Peningkatan Penggunanaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Kegiatan Tubaba Expo Yang Dilaksnakan (Expo)	Kab.TUBABA	1	400.000.000	APBD		1	558.000.000
	Peningkatan Sistem dan jaringan informasi Pedagangan	Jumlah Pameran Yang Dilaksanakan (Pameran Lampung Fair)	Kab.TUBABA	1	800.000.000	APBD		1	750.081.000
	Penyusunan data pasar dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Yang disusun (dok)	Kab.TUBABA	1 Dok	135.000.000	APBD		1	100.000.000
	Pembinaan Organisasi Pedagang Kakilima dan Asongan	Jumlah Kegiatan Pembinaan (4 Pasar 1 Kali)	Kab.TUBABA	4 Kali	75.000.000	APBD		40	50.000.000
	Penyuluhan Peningkatan disiplin Pedagang Kakilima dan Asongan	Jumlah Kegiatan Penyuluhan (4 Pasar @ 1 Kali	Kab.TUBABA	4 Kali	100.000.000	APBD		0	-
	Peningkatan disiplin Petugas Pasar	Jumlah Peserta (Orang)	Kab.TUBABA	50 Petugas	180.000.000	APBD		0	-
	Penyusunan Kebijakan Perdagangan		Kab.TUBABA		50.000.000				

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
				Promosi dan Sosialisasi Perdagangan Pasar Desa	Lokasi Pasar Yang dilakukan Sosialisasi	Kab.TUBABA	5 Pasar	140.000.000	APBD		0	-
				Program Pengembangan industri Olahan Makanan	**Jumlah Ekspose Produk Hasil kerajinan Kabupaten Tulang Bawang Barat ke Tingkat Nasional**							
				Pengembangan industri Olahan Makanan	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan Yang Dilaksanakan	Kab.TUBABA	100	146.000.000	APBD		0	-
				Pendataan IKM	Jumlah Dokumen Yang Tersusun (dok)	Kab.TUBABA	1	50.000.000	APBD		1	115.000.000
				Promosi Hasil Industri dan Kerajinan Unggulan Daerah	Jumlah Pameran Yang Dilaksnakan (Pameran)	Kab.TUBABA	4	600.000.000	APBD		4	754.000.000
				Fasilitas Pelatihan Peningkatan Mutu Industri Kreatif(Rumah Tapis)	Jumlah Pelatihan Yang Dilaksanakan (kali) Dalam Setahun	Kab.TUBABA	1	250.000.000	APBD		1	240.000.000
				Pelatihan Kerajinan Anyaman	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan Yang Dilaksanakan	Kab.TUBABA	100	167.000.000	APBD		10	120.000.000
				Program Penataan Struktur industri	**Terlaksananya Program Penataan Struktur industri**							
				Penyusunan RPIK (Rencana Pengembangan industri Kabupaten)	Jumlah Dokumen RPIK Yang Disusun (Dok)	Kab.TUBABA	1	50.000.000	APBD		1	-
				Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	**SIKM Yang di bangun**							
				Pembangunan Sentra IKM (DAK)	jumlah SIKM Yang dibangun (sikm)	Kab.TUBABA	0	-	APBD		0	1.329.040.000
				Program pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase Dokumen Administrasi Perkantoran Yang diselesaikan tepat Waktu (Persen/Tahun)**							
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.TUBABA	1	113.000.000	APBD		1	50.000.000

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
				Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkala	Jumlah Dokumen Yang Tersusun	Kab.TUBABA	4	4.790.000	APBD		4	20.000.000
				Peningkatan pelayananadministrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Perkantoran (Persentase)	Kab.TUBABA	100	584.790.000	APBD		100	944.000.000
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
				Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab.TUBABA	2	192.000.000	APBD		1	135.000.000
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase Pemeliharaan Gedung Kantor	Kab.TUBABA	100	15.400.000	APBD		100	40.000.000
				Pemiliharaan Rutin/Berkal Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional	Kab.TUBABA	3	140.500.000	APBD		1	50.000.000
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	Jumlah Pegawai Yang Memperoleh Pakaian dinas Beserta Perlengkapannya	Kab.TUBABA	35	18.500.000	APBD		40	30.000.000
				Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pegawai Yang Memperoleh Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kab.TUBABA	40	35.000.000	APBD		40	30.000.000
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
				Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat Atau Bimtek	Kab.TUBABA	0	30.000.000	APBD		3	50.000.000
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Melibatkan Partisipasi Aktif Masyarakat (persen)**							

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
				Penyusunan Renja dan RKA SKPD	Tersedianya Dokumen Renja dan RKA OPD	Kab.TUBABA	4	6.020.000	APBD		4	25.000.000
				JUMLAH				**5.790.000.000**				**7.533.161.000**

SKPD : DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran				**683.400.000**				**649.900.000**
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan Pelayanan Perkantoran	Disporapar	1 thn	649.900.000	APBD.Kab		1	649.900.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatkan Pelayanan Perkantoran	Disporapar		33.500.000				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				**164.660.000**				**116.000.000**
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Meningkatkan Perbaikan dan Pemeliharaan Gedung Kantor	Disporapar	1 thn	20.000.000	APBD.Kab		1	20.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional				96.000.000				
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Operasional Kendaraan Dinas	Disporapar	1 thn	48.660.000	APBD.Kab		1	96.000.000
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga				**250.600.000**				
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga				250.600.000				
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				**7.000.000**				**7.000.000**
	Penyusunan Renja dan RKA SKPD, Penyusunan Lakip, RFK, dan LPPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Renja dan RKA SKPD	Disporapar	5 Dok	7.000.000	APBD.Kab		**5**	7.000.000

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Jml	Sat					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
				Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					**27.800.000**				**27.800.000**
				Penyusunan Lakip,RFK,Anjab,ABK SKP dan LPPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Lakip,RFK,Anjab,ABK SKP dan LPPD	Disporapar	5	Dok	27.800.000	APBD.Kab		**5**	27.800.000
				Program Pengembangan Data/Informasi/Statatistik Daerah					**29.300.000**				**29.300.000**
				Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Adanya Data Statistik Daerah yang Terkait dengan Program dan Kegiatan	Disporapar	1	thn	29.300.000	APBD.Kab		1	29.300.000
				Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan					**1.050.000.000**				**1.050.000.000**
				Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang Berdedikasi	Kab.Tubaba	1	kgtn	700.000.000	APBD.Kab		1	700.000.000
				Penyelenggaran Pekan Olahraga Kabupate (Bupati Cup)	Jenis Olahraga yang akan di Perlombakan	Kab.Tubaba	1	kgtn	250.000.000	APBD.Kab		1	250.000.000
				Temu Wicara Organisasi Kepemudaan	Jumlah Perserta yang diikuti	Luar Daerah	1	kgtn	100.000.000	APBD.Kab		1	100.000.000
				Program Pengembangan Destinasi Pariwisata					**100.000.000**				**100.000.000**
				Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana (Taman Kura-Kura)	Jumlah Sarana	Luar Daerah	1	kgtn	100.000.000	APBD.Kab		1	100.000.000
				Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata					**700.000.000**				**700.000.000**
				Pementasan Seni dan Pengenalan Berbagai Macam Kopi Khas Lampung	Pelaku,Sanggar,Sekolah,Masyarakat umum		1	kgtn	500.000.000	APBD.Kab		1	500.000.000

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Jml	Sat					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
				Penyelenggaraan Festival Krakatau	Keikutsertaan Festival Krakatau di Provinsi	TuBABA	6	KEG	200.000.000	APBD.Kab			200.000.000
				Pengelolaan Kekayaan Budaya					**300.000.000**				**300.000.000**
				Persentase Aset Budaya Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Rumah Badik Lampung	**Tubaba**	1	Keg	200.000.000				**200.000.000**
				Pendataan Sistematis Aset Budaya dan Cagar Budaya Dalam Komunitas Budaya Masyarakat (Etnografi)	Dokumen Pendeskripsian Kebudayaan	**Tubaba**	1	Dok	100.000.000				100.000.000
				Program Pengelolaan Keragaman Budaya					**2.650.000.000**				**2.650.000.000**
				Fasilitas Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah (Festival Ragem Sai Mangi Wawai	Pelaku Seni Sanggar, Sekolah, Masyarakat Umum	Kab.Tubaba	1	kgtn	250.000.000	APBD.Kab		1	250.000.000
				Megalitik Milenial Art	Pelaku Seni Sanggar, Sekolah, Masyarakat Umum	Bandar Lampung	1	Keg	700.000.000	APBD.Kab		1	700.000.000
				Festival Bambu	Pelaku Seni Sanggar, Sekolah, Masyarakat Umum	Kab.Tubaba	1	Keg	1.000.000.000				1.000.000.000
				Festival Teater Tubaba	Pelaku Seni Sanggar, Sekolah, Masyarakat Umum	Kab.Tubaba	1	kgtn	650.000.000	APBD.Kab		1	650.000.000
				Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah (Pentas Seni Lampung Fair)	Pelaku Seni Sanggar, Sekolah, Masyarakat Umum	Kab.Tubaba	1	kgtn	50.000.000	APBD.Kab		1	50.000.000
JUMLAH									**5.962.760.000**				**5.630.000.000**

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml	Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Program Administrasi Umum					**418.200.000**				**418.200.000**
	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	DPM-PPTSP	12	Bln	418.200.000				418.200.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana					**151.800.000**				**151.800.000**
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Adanya Kendaraan Dinas	DPM-PPTSP	1	unit	96.000.000				96.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Kendaraan Dinas/Operasional yang Terawat Baik	DPM-PPTSP	1	Thn	55.800.000				55.800.000
JUMLAH						**570.000.000**				**570.000.000**

OPD : DINAS PERPUSTAKAAN dan ARSIP DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				**200.400.000**				**200.400.000**
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Program Administrasi Perkantoran	DP&AD	1 Thn	171.344.000	APBD			171.344.000
	Laporan Akuntailitas Kinerja Instansi Pemerintah		DP&AD	1 Thn	1.000.000	APBD			1.000.000
	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		DP&AD	1 Thn	1.000.000	APBD			1.000.000
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		DP&AD	1 Thn	1.000.000	APBD			1.000.000
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor		DP&AD	1 Thn	26.056.000	APBD			26.056.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				**290.600.000**				**290.600.000**
	Pememliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	DP&AD	1 Thn	74.600.000	APBD			74.600.000
	Pengadaan Gedung Kantor/Sewa Kantor	Tersedianya Pengadaan Gedung Kantor	DP&AD	1 Thn	20.000.000	APBD			20.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pengadaan Dinas	DP&AD	1 Thn	96.000.000	APBD			96.000.000
	Pengadaan Gedung Taman Baca	Tersedianya Gedung Taman Baca	DP&AD	1 Thn	100.000.000	APBD			100.000.000
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				**374.000.000**				**374.000.000**
	Kegiatan Supervisi,Pembinaan Dan Stimulasi Pada Perpustakaan Masyarakat	Terselengaraan Kegiatan Pembinaan Perpustakaan	DP&AD	1 Thn	20.000.000	APBD			20.000.000
	Kegiatan Lomba Bercerita dan Pidato Bahasa Lampung	Terselenggaranya Lomba Bercerita Dan Pidato Bahasa Lampung	DP&AD	1 Thn	30.000.000	APBD			30.000.000

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Jml	Sat					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
				Kegiatan Pengembang Minat dan Kebiasaan Membaca	Masyarakat	DP&AD	1	Thn	100.000.000	APBD			100.000.000
				Kegiatan Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka	Tersedianya Bahan Pustaka	DP&AD	1	Thn	200.000.000	APBD			200.000.000
				Peningkatan Pengelola Kearsipan	Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan	DP&AD	1	Thn	24.000.000	APBD			24.000.000
				Program Promosi Pembangunan Daerah					**10.000.000**				**10.000.000**
				Kegiatan Promosi Daerah	Terselenggaraan Kegiatan Promosi Daerah	DP&AD	1	Thn	10.000.000	APBD			10.000.000
JUMLAH									**875.000.000**				**875.000.000**

OPD : DINAS PERIKANAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Jml	Sat					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
				Belanja Langsung									
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					**263.800.000**				**290.180.000**
				Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memenuhi kebutuhan jasa pelayanan kantor	Dinas perikanan	100	%	260.600.000	APBD		100%	286.660.000
				Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Menyusun laporan akuntabilitas instansi Pemerintah	Dinas perikanan	1	dok	3.200.000	APBD		1 dok	3.520.000
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					**138.100.000**				**151.910.000**
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	Dinas perikanan	100	%	96.000.000	APBD		100%	105.600.000
				Pemeliharaan Rutin Baerkala Kendaraan Dinas/Operasional	Prensentase kendaraan Dinas yang di Service berkala	Dinas perikanan	100	%	42.100.000	APBD		100%	46.310.000
				Program Pemberdayaan Masyarkata Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan					**7.650.000**	APBD			**8.415.000**
				Pembinaan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan	Terlasananya Pembinaan Terhadap Pengelolaan Perairan Umum Darat dan Pengawasan Terhadap ilegal Fishing	Dinas perikanan	9 kec	8 Kel	7.650.000	APBD		9 kec 8 kel	8.415.000

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Jml	Sat					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
				Program Perikanan Budaya					**150.000.000**				**165.000.000**
				Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Memenuhi Kebutuhan Bibit Ikan Se-kabupaten Tungan Bawang Barat dan BBI	Dinas perikanan	9 kec	350 ekor	50.000.000	APBD		9 kec 350 ekor	55.000.000
				Pengembangan Penangkaran Kura-kura	Pembangunan/Penangkaran Kura-kura	Dinas perikanan	Tamana Kura-Kura Agrowisata	120 Ekor	100.000.000	APBD		120 ekor	110.000.000
				Program Pengembangan Perikanan Tangkap					**7.350.000**				**8.085.000**
				Pendampingan pada Kelompok Melayanan Perikanan Tangkap	Mengurangi ilegal Fishing	Dinas perikanan	Tbt, Pagar Dewa Gunung Terang, TBU	11 Tiyuh	7.350.000	APBD		11 Tiyuh	8.085.000
				Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan					**30.000.000**				**33.000.000**
				Ekspose Perikanan	Peningkatan Konsumsi Produk Perikanan dengan Lomba Masak serba Ikan dan Pameran Tingkat Kabupaten Provinsi Lampung	Dinas perikanan	Provinsi Lampung	2 Event	30.000.000	APBD		2 Events	33.000.000

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Jml	Sat					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
				Program Perencanan Pembangunan Daerah					**3.100.000**				
				Penyusunan Renja dan RKA	Menyusunan RKA dan Renja Dinas Perikanan	Dinas perikanan	4	dok	3.100.000	APBD		4 dok	3.410.000
JUMLAH									**600.000.000**				**656.590.000**

OPD : DINAS PERTANIAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml	Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur					**150.000.000**				**165.000.000**
	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasioanal	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Dinas Pertanian	16	Kendaraan	54.000.000	APBD		16	59.400.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendraan Dinas	Dinas Pertanian	1	Kendaraan	96.000.000	APBD		1	105.600.000
	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran					**620.000.000**				**682.000.000**
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi yang diselesaikan Tepat Waktu	Dinas Pertanian	87	Persen	620.000.000	APBD		87	682.000.000
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan					**615.000.000**				**676.500.000**
	Pendamping Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persentase Peningkatan Produksi Padi Pertahun	9 Kecamatan	5	Persen	75.000.000	APBD		5	82.500.000
	Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase Serangan OPT	6 Kecamatan	7	Persen	100.000.000	APBD		7	110.000.000
	Pengawasan Mutu Benih dan Bibit Tanaman Perkebunan	Persentase Bibit yang Bersertifikat	9 Kecamatan	50	Persen	125.000.000	DBH-CHT		50	137.500.000
	Pendampingan dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida					75.000.000				82.500.000
	Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Perkebunan	Persentase Serangan OPT	9 Kecamatan	10	Persen	120.000.000	DBH-CHT		10	132.000.000
	Pengembangan Budidaya Tanaman Tembakau	Luas Tanaman Tembakau (ha)	9 Kecamatan	17	Ha	120.000.000	APBD		17	132.000.000

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Jml	Sat					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
				Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan					**400.000.000**				**440.000.000**
				Pengembangan Kebun Buah Argo Wisata	Jumlah Pengunjung (Orang/Pertahun)	Agrowisata	4000	Orang	100.000.000	APBD		4000	110.000.000
				Penerapan Teknologi Budidaya Pertanian Organik	Jumlah Kelompok Tani Organik	Kelompok Tani	20	Poktan	300.000.000	APBD		20	330.000.000
				Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan					**305.000.000**				**335.500.000**
				Promosi atau Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	Jumlah Kegiatan Promosi dan Pemasaran Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten yang dilaksanakan (even/tahun)	Kabupaten dan Provinsi	2	Even	55.000.000	APBD		2	60.500.000
				Penanganan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan yang dikelola kelompok	Kelompok Tani	10	Poktan	250.000.000	APBD		10	275.000.000
				Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan					**175.000.000**				**192.500.000**
				Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Jumlah Kelompok Tani Kelas Madya	Dinas	50	Poktan	100.000.000	APBD		50	110.000.000
				Peningkatan Kelembanggaan Petani	Jumlah Kelompok Tani Kelas Madya	Poktan	50	Poktan	75.000.000	APBD		50	82.500.000
JUMLAH									**2.265.000.000**				**2.491.500.000**

OPD : DINAS PETERNAKAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Jml	Sat					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
				Program Peningkatan Produksi Hasil Perternakan									
				Pembibitan dan perawatan ternak	Jumlah angka kelahiran ternak sapi (ekor)	Kab. Tubaba	3.475	ekor	100.000.000	APBD		3.475	110.000.000
				Pelatihan dan bimbingan pengperasian teknologi perternakan tepat guna	Penyuluhan kelompok pemanfaatan teknologi perternakan tepat guna (orang)	Kab. Tubaba	100	orang	65.000.000	APBD		100	71.500.000
					Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi perternakan tepat guna (kelompok)	Kab. Tubaba	11	kel		APBD		11	
				Ekspose perternakan	Jumlah pameran pembangunan tingkat kabupaten dan tingkat provinsi (kali)	Kab. Tubaba	1	kali	24.320.000	APBD		1	26.752.000
				Pengembangan Budidaya Lebah madu	Jumlah lebah yang tersedia (kolomi)	Kab. Tubaba	135	koloni	250.000.000	APBD		135	275.000.000
					Jumlah petani lebah yang dibina (orang)	Kab. Tubaba	30	orang		APBD		30	
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit									
				Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Realisasi pemberian vaksin ranies terhadap hewan ternak (ekor)	Kab. Tubaba	3.500	ekor	90.000.000	APBD		3.500	99.000.000

					Realisasi pemberian vaksin Avian Influenza (AI) terhadap hewan ternak (ekor)	Kab. Tubaba	20.000	ekor		APBD		20.000	
					Jumlah penanganan penyakit hewan menular strategi (ekor)	Kab. Tubaba	80	ekor		APBD		80	
					Biosecurity perunggasan (liter)	Kab. Tubaba	60	liter		APBD		60	
					Sueveilens PHMS (sampel)	Kab. Tubaba	20	Sampel		APBD		20	
					Sosialisasi bahaya penyakit rabies kepada siswa SD (orang)	Kab. Tubaba	150	orang		APBD		150	
				Pembinaan dan pengawasan keamanan produk pangan asal hewan (PAH)	Jumlah THP/TPU yang dibina (unit)	Kab. Tubaba	2	unit	30.000.000	APBD		2	33.000.000
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
				Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendraan dinas/operasional yang tersedia (unit)	Kab. Tubaba	1	unit	96.000.000	APBD		1	105.600.000
				pemeliharaan rutin/berkala kendraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit)	Kab. Tubaba	6	unit	58.400.000	APBD		6	64.240.000
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
				Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan berkala	Jumlah laporan kinerja dan ikhtiar realisasi kinerjam & keuangan OPD yang dihasilkan (dokumen)	Kab. Tubaba	4	dok	5.415.000	APBD		4	5.956.500

				Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pertumbuhan administrasi perkantoran (persen)	Kab. Tubaba	100	persen	324.095.000	APBD		100	356.504.500
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah									
				Penyusanan Renja dan RKA	Jumlah dokumen Renja dan RKA Dinas yang dihasilkan (dokumen)	Kab. Tubaba	4	dok	6.770.000	APBD		4	7.447.000
JUMLAH									**1.050.000.000**				**1.155.000.000**

OPD : SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN SOSIAL

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Jml	Sat					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					**173.010.000**				**173.010.000**
				Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Terpenuhinya segala kebutuhan dalam bidang administrasi perkantoran yang tertib	Setdakab TUBABA	100	%	173.010.000	APBD		100%	173.010.000
				Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur					**135.090.000**				**135.090.000**
				Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Setdakab TUBABA	1	Unit	96.000.000	APBD			96.000.000
				Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Terpeliharanya secara rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Setdakab TUBABA	100	%	39.090.000	APBD			39.090.000
				Program Upaya Kesehatan Masyarakat					**207.600.000**				**207.600.000**
				Penilaian Dan Perlombaan UKS Tingkat Kabupaten	Mengajarkan Murid-Murid Dan Guru Tentang Pentingnya Kegiatan UKS	Setdakab TUBABA	100	%	91.550.000	APBD			91.550.000
				Pembinaan UKS Tingkat Provinsi	Mengajarkan Murid-Murid Dan Guru Tentang Pentingnya Kegiatan UKS	Setdakab TUBABA	100		116.050.000	APBD			116.050.000
				Program Pembinaan Keragaman Agama / Bimbingan Keagamaan Masyarakat					**1.526.650.000**				**1.507.300.000**
				Penyelenggaraan Kegiatan Syafari Ramadhan	Terlaksananya kegiatan safari Ramadhan baik di setiap kecamatan maupun safari ramadhan tingkat provinsi	Setdakab TUBABA	100	%	203.350.000	APBD		100%	203.350.000

OPD : SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN SOSIAL

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Jml	Sat					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
				Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi	Terlaksananya kegiatan MTQ tingkat Provinsi	Setdakab TUBABA	100	%	327.050.000	APBD		100%	327.050.000
				Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten	Mempersiapkan Kafilah Tubaba Dalam Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi	Setdakab TUBABA	100	%	199.250.000	APBD		100%	199.250.000
				Lomba Da'I cilik dan Festival Qosidah	Terlaksananya lomba dai cilik dan festival qasidah	Setdakab TUBABA	100	%	200.000.000	APBD			200.000.000
				Penyelenggaraan Transit haji daerah	Terlaksananya penyelenggaraan transit haji daerah guna memfasilitasi kegiatan haji daerah	Setdakab TUBABA	100	%	207.500.000	APBD			207.500.000
				Seleksi Tilawati Quran					19.350.000				
				Penyediaan Hewan Qurban	Terlaksananya Pemberian Hewan Qurban di Setiap Kecamatan	Setdakab TUBABA	100	%	250.550.000	APBD			250.550.000
				Fasilitasi penyelenggaraan pengajian	Mendekatkan Masyarakat Pada Nilai Keagamaan	Setdakab TUBABA	100	%	119.600.000	APBD			119.600.000
JUMLAH									**2.042.350.000**				**2.023.000.000**

OPD : SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				**201.900.000**				**201.900.000**
	Peningkatan Pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatkan layanan administrasi perkantoran	Tubaba	12 Bln	119.900.000	APBD			119.900.000
	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dokumen LPPD	Tubaba	Dokumen	82.000.000	APBD			82.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur				**140.100.000**				**140.100.000**
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas	Tubaba	1 Unit	96.000.000	APBD			96.000.000
	Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Tersedianya Dana Rutin Kendaraan Dinas	Tubaba	12 Bln	44.100.000	APBD			44.100.000
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /Wakil Daerah				**33.250.000**				**33.250.000**
	Fasilitas Pejabat Daerah	Fasilitas Pejabat Daerah	Tubaba	10 kali	33.250.000	APBD			33.250.000
	Pragram Kerjasama antar Pelayanan Pemerintah Daerah				**144.750.000**				**144.750.000**
	Fasilitasi Rapat APKASI	Rapat Apakasi	Tubaba	4 Kali	53.000.000	APBD			53.000.000
	Koordinat dan Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Daerah	Monitoring Pemerintahan Umum Dan Daerah	Tubaba	20 Kali	71.750.000	APBD			71.750.000
	Koordinasi Kerjasama Daerah dan Lembaga	Fasilitasi Daerah Dan Lembaga	Tubaba	6 Kali	20.000.000	APBD			20.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Tiyuh				**123.750.000**				**123.750.000**

OPD : SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml	Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Penyelenggaraan Pemilihan Dan Pelantikan Kepalo Tiyuh	Terselenggaraannya Pemilihan Kepalo Tiyuh	Tubaba	15	Tiyuh	81.300.000	APBD			81.300.000
	Pembentukan Kecamatan ,Tiyuh Dan Kelurahan	Terbentuknya Kecamatan,Tiyuh/Kelurahan	Tubaba	7	Tiyuh	42.450.000	APBD			42.450.000
	Program Penataan Daerah Otonomi					**76.250.000**				**76.250.000**
	Fasilitas Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah	Tersedianya Tpal Batas Daerah	Tubaba	5	Unit	76.250.000	APBD			76.250.000
JUMLAH						**720.000.000**				**720.000.000**

OPD : SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				**179.676.000**				**179.676.000**
	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatkan Pelayanan Administrasi dan Kinerja Aparatul Dalam Pelayanan Terhadap Masyarakat	Tubaba	12 Bln	177.276.000	APBD		12	177.276.000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Tubaba	12 Bln	2.400.000	APBD		12	2.400.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur				**142.770.000**				**142.770.000**
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Tubaba	1 Unit	96.000.000	APBD		1	96.000.000
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Terpeliharanya secara rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Tubaba	12 Bln	46.770.000	APBD		12	46.770.000
	Program Pengembangan Data/informasi/Statistik Daerah				**227.554.000**				**227.554.000**
	Pengawasan,Monitoring dan Evaluasi Perekonomian Serta inflasi Daerah	Mengetahui Jalannya Perdagangan Serta Inflasi Di Daerah Tulang Bawang Barat	Tubaba	4 Dok	85.700.000	APBD		4	85.700.000
	Evaluasi dan Pelaporan Layanan Informasi Ekonomi Terpadu(One data Service)	Tersedianya Data Laporan Perekonomian	Tubaba	50 OPD	141.854.000			50	141.854.000
JUMLAH					**550.000.000**				**550.000.000**

OPD : SEKRETARIAT BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Jml	Sat					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
				Program Administrasi Umum					**287.650.000**				**287.650.000**
				Peningkatan Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya Anggaran Selama 12 Bln	Tubaba	100	%	193.600.000	APBD		100%	193.600.000
				Penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan (RFK)	Terserapnya APBD dan APBN	Tubaba	100	%	74.050.000	APBD		100%	74.050.000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya dan terselenggaranya kegiatan perkantoran yang dapat meningkatkan kinerja pegawai	Tubaba	2 Laptop,2 HDD,2Filing Kabinet	Unit	20.000.000	APBD		2 Laptop,2 HDD,2Filing Kabinet	20.000.000
				Program Pemanfaatan Teknologi Informasi					**475.000.000**				**475.000.000**
				Pembangunan TUBABA Smart City	Tersedianya Fasilitas Hotspot/wifi Di kantor Pemerintah,Sekolah dan Tempat-Tempat (Umum)		34	Titik	475.000.000	APBD		34 Titik	475.000.000
				Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur					**129.900.000**				**129.900.000**
				Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Tubaba	1	Unit	96.000.000	APBD		1	96.000.000
				Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Terpeliharanya secara rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Tubaba	12	Bln	33.900.000	APBD		12	33.900.000
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah					**71.200.000**				**71.200.000**
				Monitoring dan Pengendalian Pembangunan	Terlaksananya Pembangunan Di seluruh Kab.Tulang Bawang Barat	Tubaba	4	Dok	71.200.000	APBD		4	71.200.000

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Jml	Sat					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur					**11.250.000**				**11.250.000**
				Pengadaan Pakaian KhususHari-hari Tertentu	Pengadaan Pakaian Khusus Beserta Kelengkapannya	Tubaba	5 Stel PDH dan 15 Stel Pakaian Dinas	Stell	11.250.000	APBD		5 Stel PDH dan 15 Stel Pakaian Dinas	11.250.000
JUMLAH									**975.000.000**				**975.000.000**

OPD : SEKRETARIAT BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				**1.507.760.000**				**1.507.760.000**
	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Terpenuhi dan terselenggaranya kegiatan perkantoran yang dapat meningkatkan kinerja pegawai	Tubaba	1 Thn	221.760.000	APBD			221.760.000
	Dana Operasional Dan Pengelolaan ULP Kab. Tubaba	Terwujudnya Pemerintahan Efisien dan Efektif	Tubaba	400 Paket	1.265.000.000	APBD			1.265.000.000
	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	Terwujudnya Pemerintahan Efisien dan Efektif	Tubaba	1 Tahun	21.000.000	APBD			21.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur				**137.920.000**				**137.920.000**
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Tubaba	1 Unit	96.000.000	APBD			96.000.000
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Terpeliharanya rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Tubaba	1 Thn	41.920.000	APBD			41.920.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				**30.000.000**				**30.000.000**
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tubaba	10 Kali	30.000.000	APBD			30.000.000
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dan Informasi				**749.320.000**				**749.320.000**
	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Terwujudnya Pemerintahan Efisien dan Efektif	Tubaba	7 Dok	46.440.000	APBD			46.440.000

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Jml	Sat					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
				Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektrik (LPSE)	Terwujudnya Pemerintahan Efisien dan Efektif	Tubaba	1	Thn	610.000.000	APBD			610.000.000
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terselenggaranya Pemilihan Panitia Kelompok Kerja	Tubaba	400	Paket	46.440.000	APBD			46.440.000
				Advokasi pengadaan barang dan jasa	Terselenggaranya Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tubaba	4	Dok	46.440.000	APBD			46.440.000
JUMLAH									**2.425.000.000**				**2.425.000.000**

OPD : SEKRETARIAT BAGIAN ORGANISASI

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml	Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					**194.000.000**				**194.000.000**
	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Sarana dan Prasarana Administrasi Perkantoran	Tubaba	12	Bulan	192.500.000	APBD		12	192.500.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tubaba	3	Unit	1.500.000	APBD		3	1.500.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur					**116.000.000**				**116.000.000**
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Tubaba	1	Unit	96.000.000	APBD		1	96.000.000
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Terpeliharanya secara rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Tubaba	12	Bulan	20.000.000	APBD		12	20.000.000
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					**865.000.000**				**865.000.000**
	Bimtek Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintahan (SAKIP) Kab.Tulang Bawang Barat	Peserta Bimtek Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah(SAKIP)	Tubaba	50	Orang	225.000.000	APBD		50	225.000.000
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Kab.Tulang Bawang Barat	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab TUBABA	Tubaba	5	Dok	50.000.000	APBD		5	50.000.000
	Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Kab.Tulang Bawang Barat	Dokumen Perjanjian Kinerja OPD Kab.Tulang Bawang Barat	Tubaba	5	Dok	30.000.000	APBD		5	30.000.000

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Jml	Sat					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
				Momerandum Off Understanding(MOU) Pemerintah Kab.Tulang Bawang Barat Dengan Ombudzman Perwakilan Lampung	Perjanjian Kerjasama Pemda TUBABA Dengan Ombdzman Ri Terkait Pelayanan Publik	Tubaba	1	Keg	50.000.000	APBD		1	50.000.000
				Penyusunan Dokumen Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Kab.Tulang Bawang Barat	Dikumen Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja OPD Kab.Tulang Bawang Barat	Tubaba	100	Dok	50.000.000	APBD		100	50.000.000
				Penyusunan Dokumen Evaluasi Jabatan Kab.Tulang Bawang Barat	Dokumen Evaluasi Jabatan OPD Kab.Tulang Bawang Barat	Tubaba	50	Dok	50.000.000	APBD		50	50.000.000
				Penyusunan Dokumen Standar Kompetensi Jabatan Kab.Tulang Bawang Barat	Dokumen Standar Kompentensi Jabatan OPD Kab. Tulang Bawang Barat	Tubaba	3	Dok	85.000.000	APBD		3	85.000.000
				Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kab.Tulang Bawang Barat	Perda/Perkada Yang Mengatur Kelembagaan Perangkat Daerah Kab.Tulang Bawang Barat	Tubaba	5	Dok	70.000.000	APBD		5	70.000.000

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Jml	Sat				
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
				Bimtek Dan Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kab.Tulang Bawang Barat	Peserta Bimtek Dan Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Kab.Tulang Bawang Barat	Jakarta	50	Orang	225.000.000	APBD		50	225.000.000
				Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Di Lingkup Sekretariat Daerah Kab.Tulang Bawang Barat	Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai Dilingkup Sekretariat Daerah Kab.Tulang Bawang Barat	Tubaba	120	Dok	30.000.000	APBD		120	30.000.000
JUMLAH									**1.175.000.000**				**2.156.000.000**

SKPD : SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml	Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					**164.000.000**				**164.000.000**
	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	Tubaba	100	%	164.000.000	APBD			164.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur					**139.200.000**				**139.200.000**
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Tubaba	1	Unit	96.000.000	APBD			96.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Tubaba			43.200.000				43.200.000
	Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan					**596.800.000**				**596.800.000**
	Pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah Atau Rancangan Peraturan Daerah	Tersusunnya produk hukum daerah	Tubaba	100	%	133.050.000	APBD			133.050.000
	Jasa bantuan hukum / advokasi hukum	Terselenggranya kegiatan jasa bantuan hukum / advokasi hukum	Tubaba	100	%	275.800.000	APBD			275.800.000
	Klinik Layanan Konsultasi Hukum Peraturan Tiyuh	Terselenggaranya Bantuan Hukum /Advokasi Hukum	Tubaba	100	%	78.550.000	APBD			78.550.000
	Pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum	Terselenggranya kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum	Tubaba	100	%	109.400.000	APBD			109.400.000
JUMLAH						**900.000.000**				**900.000.000**

OPD : SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN UMUM

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				**4.372.000.000**				**4.809.200.000**
	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran		Tubaba	100 %	4.222.000.000	APBD			4.644.200.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100 %	150.000.000	APBD			165.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				**1.290.000.000**				**1.419.000.000**
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Tubaba	100 %	90.000.000	APBD			99.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Tubaba	100 %	975.000.000	APBD			1.072.500.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur		Tubaba	100 %	225.000.000	APBD			247.500.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				**80.000.000**				**88.000.000**
	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Tubaba	100 %	80.000.000	APBD			88.000.000
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala				**1.758.000.000**				**1.933.800.000**
	Pelayanan Umum Rumah Tangga Kepala Daerah		Tubaba	100 %	1.063.000.000	APBD			1.169.300.000
	Pelayanan Umum Rumah Tangga Kepala Wakil Kepala Daerah		Tubaba	100 %	695.000.000	APBD			764.500.000
JUMLAH					**7.500.000.000**				**(8.250.000.000)**

OPD : SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN TATA USAHA KEUANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml	Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					**5.042.900.000**				**5.042.900.000**
	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	dokumen administrasi yang diselenggarakan dengan baik dan tepat waktu	Setda Tubaba	1	Tahun	4.810.000.000	APBD			4.810.000.000
	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan berkala	tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan berkala	Setda Tubaba	1	Tahun	113.100.000	APBD			113.100.000
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunya laporan keuangan akhir tahun sekretariat	Setda Tubaba	1	Tahun	119.800.000	APBD			119.800.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur					**844.000.000**				**844.000.000**
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Setda Tubaba	1	Tahun	96.000.000	APBD			96.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Setda Tubaba	1	Tahun	748.000.000				748.000.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah					**113.100.000**				**113.100.000**
	Penyusunan RENJA dan RKA SKPD	Tersusunya dokumen renja dan RKA Sekretariat	Setda Tubaba	1	Tahun	113.100.000	APBD			113.100.000
JUMLAH						**6.000.000.000**				**6.000.000.000**

OPD : SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUMAS dan PROTOKOL

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Jml	Sat					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					**387.900.000**				**387.900.000**
				Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Terpenuhinya administrasi Perkantoran	Tubaba	100	%	387.900.000	APBD			387.900.000
				Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah					**412.100.000**				**412.100.000**
				Pelayanan Umum Keprotokolan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kegiatan pelayanan Keprotokolan	Tubaba	100	%	112.100.000	APBD			112.100.000
				Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terselenggaranya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Tubaba	100	%	150.000.000	APBD			150.000.000
				Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terdokuemtasinya Pelaksanaan Tugas Pimpinan	Tubaba	100	%	150.000.000	APBD			150.000.000
JUMLAH									**800.000.000**				**800.000.000**

OPD : SEKRETARIAT DPRD TUBABA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml	Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
	Penyusunan Dokumen Perencanaan & Laporan Berkala	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan & Laporan Berkala	TUBABA	140	dok	546.777.000	APBD		140	601.454.700
	Peningkatan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Terlaksananya Kegiatan Adminstrasi Perkantoran	TUBABA	12	bln	3.055.964.000	APBD		12	3.361.560.400
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Kegiatan Laporan Keuangan Akhir Tahun	TUBABA	12	dok	70.000.000	APBD		12	77.000.000
	Penyelenggaran Pameran Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pameran Daerah	TUBABA	1	krg	40.000.000	APBD		1	44.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TUBABA	5	bh	117.750.000	APBD		5	129.525.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya Kegiatan Pembayaran sewa mobil dinas	TUBABA	4	Unit	384.000.000	APBD		4	422.400.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya Kegiatan pemeliharaan Mobil Pimpinan DPRD	TUBABA	3	Unit	282.000.000	APBD		3	310.200.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Kegiatan pemeliharaan motor mobil dinas sekretariat daerah	TUBABA	11	Unit	240.856.000	APBD		11	264.941.600
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur									

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Jml	Sat					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
				Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Terlaksananya Kegiatan pengadaan Pakaian Dinas DPRD	TUBABA	139	stel	276.750.000	APBD		277	304.425.000
				Pengadaan Pakaian Khusu Hari-hari Tertentu		TUBABA	138	stel	219.300.000				241.230.000
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparataur									
				Bimbingan Teknis Implemntasi Peraturan Perundang-undang	Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis Implemntasi Peraturan Perundang-undang bagi PNS setwan	TUBABA	25	org	341.000.000	APBD		25	375.100.000
				Kursus-kursus Singkat Pengelolaan Keuangan	Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis Keuangan bagi PNS Setwan	TUBABA	24	org	299.080.000	APBD		24	328.988.000
				Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah									
				Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Terlaksananya Kegiatan Rapat-rapat Banang, Banleg, BK, Banmus	TUBABA	50	keg	510.171.000	APBD		50	561.188.100
				Rapat Paripurna	Terlaksananya Kegiatan Rapat Paripurna	TUBABA	15	keg	402.204.000	APBD		15	442.424.400
				Kegiatan Reses	Terlaksananya Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	TUBABA	2	kali	1.032.522.000	APBD		2	1.135.774.200
				Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Provinsi Lampung	TUBABA	240	org	899.512.000	APBD		100	989.463.200

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Jml	Sat					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
				Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	Luar Daerah	150	org	1.546.140.000	APBD		100	1.700.754.000
				Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan	Terlaksananya Kunjungan Kerja Banang, Banmus, BK, Banleg	Luar Daerah	4	keg	844.474.000	APBD		100	928.921.400
				Penyusunan Raperda dan Naskah Akademis	Terlaksananya Penyusunan Naskah Akademis	TUBABA	4	bh	202.080.000	APBD		100	222.288.000
				Studi Komparis Komisi Komisi DPRD	Terlaksananya Kunjungan kerja keluar daerah Komisi Komisi DPRD	TUBABA	2	kali	1.007.386.000	APBD		100	128.260.000
				Parlementari dan Liputan Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Perlementaria	Luar Daerah	4	kali	116.600.000	APBD		100	1.017.380.100
				Bimbingan Teknis dan Pendidikan Non Formal Anggota DPRD	Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis bagi seluruh Anggota DPRD		64	org	924.891.000				469.700.000
				ADKASI Bimtek Pimpinan DPRD	Terlaksananya Kegiatan Bimtek ADKASI bagi seluruh anggota DPRD	Luar Daerah	30	org	427.000.000	APBD		100	1.864.203.000
				Pembahasan Raperda	Terlaksananya kegiatan Pansus Penyusunan Raperda dalam dan luar daerah	Dalam&Luar	4	pansus	1.694.730.000	APBD		100	424.871.700
				workshop DPRD	Terlaksananya kegiatan Workshop bimtek dalam daerah bagi Dewan		32	org	386.247.000				
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah									
				Penyusunan Renja dan RKA, SKPD	Terlaksananya Penyusunan Renja dan RKA OPD	TUBABA	20	dok	132.566.000	APBD		100	145.822.600
JUMLAH									**16.000.000.000**				**16.491.875.400**

0PD : SEKRETARIAT KORPS APARATUR SIPIL NEGARA

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Jml	Sat					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					**273.440.000**				**273.440.000**
				Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantor	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	ASN	1	Thn	228.440.000	APBD		100	273.440.000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	ASN			37.000.000				
				Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkala	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	ASN			8.000.000				
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana					**87.600.000**				**87.600.000**
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor	ASN	1	Unit	15.000.000	APBD			15.000.000
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpelihara nya Kendaraan Dinas	ASN	3	Unit	72.600.000	APBD			72.600.000
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur					**12.000.000**				**12.000.000**
				Pengadaan Pakaian Batik	Tersedianya Pakaian Khusus Hari Tertentu	ASN	12	Stel	6.000.000	APBD			6.000.000
				Pengadaan Pakaian Korpri	Tersedianya Pakaian Khusus Hari Tertentu	ASN	12	Stel	6.000.000	APBD			6.000.000
				Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					**76.960.000**				**76.960.000**
				Hut Korpri	Jumlah ASN yang Mengikuti Hut Korpri	ASN	3800	Orang	76.960.000	APBD			76.960.000
JUMLAH									**450.000.000**				**450.000.000**

OPD : KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml	Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Meningakatnya Kualitas dan Kwantitas Pelayanan Admistrasi Umum**				**753.781.000**				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkala	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkala	TBT	6	dok	5.200.000	APBD		6	5.720.000
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	TBT	1	thn	175.585.000	APBD		1	193.143.500
	Operasional Kelurahan Panaragan Jaya		TBT			218.298.000				
	Operasional Kelurahan Mulya asri		TBT			237.230.000				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		TBT			117.468.000				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Untuk Meningkatkan Kinerja dan Kenyamanan ASN**				**236.040.000**				
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan D	TBT	1	Mobil	96.000.000	APBD		1	105.600.000
	Pemeliharaan Ritun/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	TBT	1	Motor	35.040.000	APBD		1	38.544.000
	Rehabilatas Sedang/Berat Gedung Kantor		TBT			105.000.000				
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**Untuk Meningkatkan Kinerja ASN**				**19.150.000**				
	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Meningkatkan Disiplin ASN	TBT	13	org	10.750.000	APBD		13	11.825.000
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Meningkatkan Disiplin ASN	TBT	13	org	8.400.000	APBD		13	9.240.000
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa					**28.910.408**				

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Jml	Sat					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
				Pendamping Pengelolaan Alokasi Dana Tiyuh	Terselenggaranya Pendamping Pengelolaan Alokasi Dana Tiyuh	TBT	19	Tiyuh	28.910.408	APBD		19	31.801.449
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	**Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pemabngunan**				**137.470.000**				**137.470.000**
				Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	TBT	3	bln	44.520.000	APBD		3	44.520.000
				Penyelenggaraan Musyawarah Bulanan Kecamatan	Tersenggaranya Musyawarah Kecamatan	TBT	12	bln	58.260.000	APBD		12	58.260.000
				Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Mulya Asri		TBT			21.740.000	APBD			21.740.000
				Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Panaragan Jaya		TBT			12.950.000	APBD			12.950.000
				Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan					**1.553.648.592**				**1.441.648.592**
				Pembangunan Sarana dan Prasrana Kelurahan Mulya Asri		TBT			751.244.296	APBD			751.244.296
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mulya Asri		TBT			25.580.000	APBD			25.580.000
				Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panaragan Jaya		TBT			21.995.000	APBD			21.995.000
				Pengadaan Seragam Linmas Lengkap Kelurahan Panaragan Jaya		TBT			16.000.000	APBD			16.000.000
				Pembangunan Taman Pendidikan Kelurahan Panaragan Jaya		TBT			34.829.296	APBD			34.829.296

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Jml	Sat					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
				Pembangunan Sumur Bor Kelurahan Panaragan Jaya		TBT			432.000.000	APBD			432.000.000
				Pembangunan Pos Kamling Kelurahan Panaragan Jaya		TBT			160.000.000	APBD			160.000.000
				Pembangunan Saluran Drainase Kelurahan Panaragan Jaya					112.000.000				
JUMLAH									**2.729.000.000**				**3.554.111.133**

SKPD : KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Jml	Sat					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
				Program Adminstrasi Perkantoran					**163.500.000**				**179.850.000**
				Peningkatan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Pemuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dengan Baik	Kec.TBU	12	Bln	141.700.000	APBD			155.870.000
				Penyediaan Peralatan dan Perelengkapan Kantor		Kec.TBU	12	Bln	21.800.000				23.980.000
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					**143.000.000**				**157.300.000**
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	Kec.TBU	12	Bln	30.000.000	APBD			30.000.000
				Pengadaan/Sewa Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas	Kec.TBU	12	Bln	96.000.000	APBD			96.000.000
				Pengadaan Laptop	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.TBU	1	Unit	8.000.000	APBD			8.000.000
				Pengadaan Printer	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.TBU	1	Unit	2.500.000	APBD			2.500.000
				Pengadaan Kursi tamu	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.TBU	1	Unit	6.500.000	APBD			6.500.000
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur					**16.500.000**				**18.150.000**
				Pengadaan Pakain Dinas Berserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas	Kec.TBU	15	Stel	11.250.000	APBD			12.375.000
				Pengadaan Pakaian Olah Raga	Tersedianya Pakaian Dinas Olah raga	Kec.TBU	15	Stel	5.250.000	APBD			5.250.000

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Jml	Sat					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
				Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa					**21.500.000**				**23.650.000**
				Pendampingan Pengelolaan Alokasi Tiyuh		Kec.TBU	9	Tiyuh	21.500.000	APBD			23.650.000
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah					**22.500.000**				**24.750.000**
				Musrenbang Kecamatan		Kec.TBU	1	Keg	22.500.000	APBD			24.750.000
JUMLAH									**367.000.000**				**403.700.000**

OPD : KECAMATAN GUNUNG TERANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran				**174.410.000**				**190.904.000**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan	Tingkat Kwalitas Pelayanan Publik	Kec. Gn.Terang	1 Thn	5.000.000	APBD		100	5.500.000
	Peningkatan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran		Kec. Gn.Terang	1 Thn	159.940.000	APBD		100	175.934.000
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor		Kec. Gn.Terang	1 Thn	9.470.000				9.470.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				**133.200.000**				**146.520.000**
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Sarana dan Transportasi	Kec. Gn.Terang	1 Unit	96.000.000	APBD		100	105.600.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Kec. Gn.Terang	1 Thn	37.200.000	APBD		100	40.920.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				**9.000.000**				**9.000.000**
	Pengadaan Perlengkapan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas	Kec. Gn.Terang	9 Stel	9.000.000				9.000.000
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				**12.630.000**				**13.893.000**
	Pendampingan Pengelolaan Alokasi Dana Tiyuh	Tercapainya Jumlah Desa yang Terbina	Kec. Gn.Terang	10 Tiyuh Tebina	12.630.000	APBD		100	13.893.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				**20.760.000**				**22.836.000**
	Murenbang Kecamatan	Terlaksananya Persentase Partisipasi Warga Dalam Musrenbang Kecamatan	Kec. Gn.Terang	2 Bln	20.760.000	APBD		100	22.836.000
JUMLAH					**350.000.000**				**383.153.000**

OPD : KECAMATAN GUNUNG AGUNG

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml	Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					**152.700.000**				**152.700.000**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkala	Tersedianya Barang /Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	TBB	12	Dok	3.800.000	APBD		12	3.800.000
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		TBB	12	thn	102.900.000	APBD		12	102.900.000
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor		TBB	12	thn	46.000.000	APBD		12	46.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					**125.100.000**				**125.100.000**
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas	TBB	1	Unit	96.000.000	APBD		1	96.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Aparatur Pemerintah Kantor	TBB	1	Gedung	2.100.000	APBD		1	2.100.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	TBB	1	Unit	27.000.000	APBD		1	27.000.000
	Program Peningkatan Displin Aparatur					**16.250.000**				**16.250.000**
	Pengadaan Pakaian Dinas Berseta Perlengakapannya	Meningkatkan Seragam Aparatur Sipil Negara	TBB	13	Orang	16.250.000	APBD		13	16.250.000
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengeloaan Keuangan Desa					**10.900.000**				**10.900.000**
	Pendampingan Pengelolaan Alokasi Dana Tiyuh	Tercapainya Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Tiyuh	TBB	12	Bln	10.900.000	APBD		12	10.900.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah					**45.050.000**				**45.050.000**
	Musrenbang Kecamatan	Meningkatkan Pembangunan Daerah	TBB	12	Bln	21.350.000	APBD		12	21.350.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml	Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Penyelenggaraan Musyawarah Bulanan Kecamatan	Meningkatkan Pembangunan Daerah	TBB	12	Bln	23.700.000	APBD		12	23.700.000
JUMLAH						**350.000.000**				**350.000.000**

OPD : KECAMATAN LAMBU KIBANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml	Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran					**188.914.000**				**184.270.900**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkala	Tingkat Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Gn.Terang	1	Thn	5.000.000	APBD		100	5.500.000
	Peningkatan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran		Kec. Gn.Terang	1	Thn	162.519.000	APBD		100	178.770.900
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kec. Gn.Terang	1	Thn	21.395.000			100	23.534.500
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					**119.700.000**				**131.670.000**
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas 1 Unit	Kec. Gn.Terang	1	Thn	96.000.000	APBD		100	105.600.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Kec. Gn.Terang	1	Thn	23.700.000	APBD		100	26.070.000
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa					**19.431.000**				**21.374.100**
	Pendampingan Pengelolaan Alokasi Dana Tiyuh	Tercapainya Pembinaan 10 Tiyuh	Kec. Gn.Terang	1	Thn	19.431.000	APBD		100	21.374.100
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah					**21.955.000**				**24.150.500**
	Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	Kec. Gn.Terang	1	Thn	21.955.000	APBD		100	24.150.500
JUMLAH						**350.000.000**				**361.465.500**

OPD : KECAMATAN WAY KENANGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Program Peningkatan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran				**146.382.700**				**157.720.970**
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dibutuhkan	Kec. Way Kenagan	100 %	137.752.700	APBD			151.527.970
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkala	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dibutuhkan	Kec. Way Kenagan	100 %	5.630.000	APBD			6.193.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kec. Way Kenagan	100 %	3.000.000				3.300.000
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				**13.230.800**				**14.553.880**
	Pendampingan Pengelolaan Alokasi Dana Tiyuh	Tercapainya Pengelolaan Dana Tiyuh yang Maksimal Secara Administrasi Maupun Realita di Masyarakat	Kec. Way Kenagan	100 %	13.230.800	APBD			14.553.880
	Program Peningkatan Sarana dan Prasrana Aparatur				**158.346.500**				**62.346.500**
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Kec. Way Kenagan	100 %	96.000.000				
	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional		Kec. Way Kenagan	100 %	36.346.500	APBD			36.346.500
	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor		Kec. Way Kenagan	100 %	26.000.000	APBD			26.000.000

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Jml	Sat					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur			100	%	**10.000.000**				**10.000.000**
				Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya		Kec. Way Kenagan	100	%	10.000.000	APBD			10.000.000
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah					**22.040.000**				**24.244.000**
				Musrenbang Kecamatan	Tersusunnya Usulan Program Pembangunan Kecamatan	Kec. Way Kenagan	100	%	22.040.000	APBD			24.244.000
JUMLAH									**350.000.000**				**268.865.350**

OPD : KECAMATAN TUMIJAJAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml	Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					**505.196.000**				**505.196.000**
	Operasional Kelurahan Dayamurni		Daya Murni	1	Keg	228.786.000			1	228.786.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Daya Murni	1	Keg	151.300.000			1	151.300.000
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Daya Murni	1	Thn	125.110.000			1	125.110.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					**148.752.000**				**148.752.000**
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Daya Murni	3	Unit	113.000.000	APBD		3	113.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Daya Murni	1	Thn	33.252.000	APBD		1	33.252.000
	Pengadaan Pemeliharaan Gedung Kantor		Daya Murni	1	Thn	2.500.000			1	2.500.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					**21.600.000**				**21.600.000**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan		Daya Murni	23	Stell	21.600.000	APBD		23	21.600.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah					**21.377.704**				**21.377.704**
	Musrenbang Kecamatan		Daya Murni	1	keg	21.377.704	APBD		1	21.377.704
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa					**26.250.000**				**26.250.000**
	Perencanaan ,Evaluasi dan Pelaporan Dana Tiyuh		Daya Murni	1	keg	26.250.000	APBD		1	26.250.000
	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan					**785.824.296**				**785.824.296**
	Pembangunan Sarana dan Prasrana Kelurahan Dayamurni		Daya Murni	1	Keg	210.641.000	APBD		1	210.641.000
	Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		Daya Murni	1	Keg	31.095.296	APBD		1	31.095.296

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Jml	Sat					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
				Pengadaan Seragam Linmas Lengkap Kelurahan Dayamurni		Daya Murni	1	Keg	40.000.000	APBD		1	40.000.000
				Pembangunan Sarana dan Prasrana Kelurahan Dayamurni		Daya Murni	1	Keg	185.200.000	APBD		1	185.200.000
				Pembangunan Saluran Drainase Kelurahan Dayamurni		Daya Murni	1	Keg	210.888.000	APBD		1	210.888.000
				Pemasangan Lampu Penerangan Depan Rumah		Daya Murni	1	Keg	108.000.000	APBD		1	108.000.000
JUMLAH									**1.509.000.000**				**1.509.000.000**

OPD : KECAMATAN PAGAR DEWA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml	Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					**156.450.000**				**172.095.000**
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Dibutuhkan	Kec Pagar Dewa	1	thn	110.950.000	APBD		1	122.045.000
	Penyusunan Dokumen Perencanan dan Laporan Berkala		Kec Pagar Dewa	1	thn	20.100.000				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kec Pagar Dewa	1	thn	25.400.000				
	Peningkatan Disiplin Aparatur					**13.800.000**				**13.800.000**
	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Kec Pagar Dewa	1	Thn	13.800.000				13.800.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					**129.250.000**				**142.175.000**
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pelayanan Kepada Masyarakat Secara Langsung	Kec Pagar Dewa	1	Thn	96.000.000	APBD		1	105.600.000
	Pememliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Kec Pagar Dewa	1	Thn	33.250.000				

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Jml	Sat					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
				Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengeloaan Keuangan Desa					**19.700.000**				**21.670.000**
				Pendampingan Pengelolaan Alokasi Dana Tiyuh	Tercapainya Pengelolaan Dana Tiyuh Yang Maksimal Secara Administrasi Maupun Realita Masyarakat	Kec Pagar Dewa	100	%	19.700.000	APBD		1	21.670.000
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah					**30.800.000**				**33.880.000**
				Musrenbang Kecamatan	Tersusunya Usulan Program Pembangunan Kecamatan	Kec. Pagar Dewa	100	%	30.800.000	APBD		1	33.880.000
JUMLAH									**350.000.000**				**383.620.000**

OPD : KECAMATAN BATU PUTIH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml	Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					**172.705.000**				**172.705.000**
	Peyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkala		Kec.Batu Putih	1	keg	5.000.000	APBD		1	5.000.000
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Kec.Batu Putih	1	thn	158.235.000	APBD		1	158.235.000
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor		Kec.Batu Putih	1	Unit	9.470.000				9.470.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					**129.600.000**				**142.560.000**
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pelayanan Kepada Masyarakat Secara Langsung	Kec.Batu Putih	1	unit	96.000.000	APBD		1	105.600.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Kec.Batu Putih	1	Thn	33.600.000	APBD		1	36.960.000
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengeloaan Keuangan Desa					**12.000.000**				**13.200.000**
	Pendampingan Pengelolaan Alokasi Dana Tiyuh	Tercapainya Pengelolaan Dana Tiyuh Yang Maksimal Secara Administrasi Maupun Realita Masyarakat	Kec.Batu Putih	10	Tiyuh	12.000.000	APBD		1	13.200.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					**13.500.000**				**13.500.000**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	Jumlah Pakaian Dinas	Kec.Batu Putih	1	Stel	13.500.000				13.500.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah					**22.195.000**				**24.414.500**
	Musrenbang Kecamatan	Tersusunya Usulan Program Pembangunan Kecamatan	Kec.Batu Putih	2	Orang	22.195.000	APBD		1	24.414.500
JUMLAH						**350.000.000**				**352.879.500**

OPD : INSPEKTORAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaia Jml	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	.(9)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan pelayanan administrasi kantor dengan baik**		**16**	**Kab. TUBABA**	**85%**	**651.437.000**	**APBD**		**85%**	**818.430.000**
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi kantor dengan baik		1	Kab. TUBABA	0,85	481.692.000	APBD		0,85	584.225.000
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkala	Jumlah Dokumen dan Pelaporan yang dilaksanakan tepat waktu		20	Kab. TUBABA	16 Dokumen	12.500.000	APBD		16 Dokumen	12.500.000
	Kegiatan Penyelengaraan Pameran Daerah	Jumlah Pameran yang diselenggarakan			Kab. TUBABA	1 kegiatan	10.000.000	APBD		1 kegiatan	10.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediaan			Kab. TUBABA	15 unit	147.245.000	APBD		15 unit	211.705.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Tingkat Kepuasan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur**			**Kab. TUBABA**	**0,95**	**228.340.500**	**APBD**		**0,95**	**160.175.000**
	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah waktu untuk sewa kendaraan dinas/operasional			Kab. TUBABA	12 bulan	96.000.000	APBD		12 bulan	96.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Luas gedung kantor			Kab. TUBABA	250 m2	13.300.000	APBD		250 m2	15.000.000
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dengan baik			Kab. TUBABA	11 unit	119.040.500	APBD		11 unit	145.175.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**Persentase kapasitas sumber daya APIP**			**Kab. TUBABA**	**95%**	**27.775.000**	**APBD**		**95%**	**32.700.000**
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah jenis pakaian/perlengkapan yang diadakan			Kab. TUBABA	2 Set	27.775.000	APBD		2 Set	32.700.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase kapasitas sumber daya APIP**			**Kab. TUBABA**	**95%**	**90.300.000**	**APBD**		**95%**	**98.960.000**
	Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri	Jumlah pelatihan yang diselenggarakan di kantor sendiri			Kab. TUBABA	5 Kegiatan	90.300.000	APBD		5 Kegiatan	98.960.000
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	**Persentase APIP yang berkualitas dan profesional**			**Kab. TUBABA**	**0,55**	**430.710.000**	**APBD**		**0,55**	**643.000.000**
	Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan			Kab. TUBABA	15 orang	124.180.000	APBD		15 orang	146.500.000

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaia Jml	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	.(9)
				Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pelatihan			Kab. TUBABA	15 orang	84.080.000	APBD		15 orang	146.500.000
				Kegiatan Diklat Aparatur (APIP dan Non JFA)	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat			Kab. TUBABA	15 orang	222.450.000	APBD		15 orang	350.000.000
				Program Peningkatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	**Persentase Laporan Keuangan SKPD yang Sesuai SAP Dalam Mendukung Tercapainya WTP**			**Kab. TUBABA**	**83%**	**1.571.437.500**	**APBD**		**83%**	**1.864.185.000**
				Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Interenal Secara Berkala	Jumlah LHP			Kab. TUBABA	45lhp	293.400.000	APBD		45lhp	297.000.000
				Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase pengaduan kasus yang selesai			Kab. TUBABA	100%	98.450.000	APBD		100%	115.000.000
				Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Persentase rekomendasi tindak lanjut APIP dan BPK yang selesai			Kab. TUBABA	80%	104.100.000	APBD		80%	124.085.000
				Kegiatan Pemutahiran Data Tindak Lanjut	Persentase rekomendasi APIP dan BPK yang ditindaklanjuti			Kab. TUBABA	0,8	18.700.000	APBD		0,8	25.500.000
				Kegiatan Reviu LAKIP	Persentase OPD yang selesai dilakukan evaluasi/reviu tepat waktu			Kab. TUBABA	0,9	27.750.000	APBD		0,9	27.750.000
				Kegiatan Evaluasi SPIP	Jumlah OPD yang dilakukan evaluasi penerapan SPIP			Kab. TUBABA	10 opd	37.050.000	APBD		10 opd	47.100.000
				Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Reviu LKPD yang sesuai dengan realisasi fisik keuangan			Kab. TUBABA	1 laporan	17.375.000	APBD		1 laporan	37.750.000
				Kegiatan Reviu RKA	Persentase keselarasa RKA dengan Renja			Kab. TUBABA	0,8	35.875.000	APBD		0,8	80.000.000
				Pengawasan Khusus	Persentase penyeleaian investigasi			Kab. TUBABA	100%	67.200.000	APBD		100%	84.600.000
				Evaluasi Implementasi SAKIP	Jumlah OPD yang keselarasanya sesuai dengan RPJMD Bupati			Kab. TUBABA	10 opd	38.025.000	APBD		10 opd	47.750.000
				Kegiatan Pemeriksaan, Evaluasi dan Monitoring Desa	Persentase desa yang mengelola dan mengalokasikan dana desanya denganbaik dan tepat			Kab. TUBABA	60%	115.500.000	APBD		0,6	133.500.000
				Kegiatan Pembangunan dan Penilaian Zona Integritas	Jumlah OPD yang masuk dalam Zona Integritas			Kab. TUBABA	2 opd	-	APBD		2 opd	-
				Kegiatan Verifikasi LHKPN	Persentase Pelaporan LHKPN Tepat Waktu			Kab. TUBABA	100%	24.000.000	APBD		100%	24.000.000
				Kegiatan Penanganan Laporan Gratifikasi	Persentase Pengendalian Gratifikasi OPD			Kab. TUBABA	1	12.150.000	APBD		1	23.800.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaia Jml	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	.(9)
	Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Aksi Pencegahan Korupsi Serta Verifikasi Pelaporan Renaksi	Persentase OPD tepat waktu dalam pelaporan Renaksi			Kab. TUBABA	80%	41.650.000	APBD		0,8	55.900.000
	Audit Kinerja	Jumlah Obrik yang di Audit Kinerjanya			Kab. TUBABA	8 OPD	49.400.000	APBD		8 OPD	57.000.000
	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Obrik yang di Audit			Kab. TUBABA	2 OPD	59.750.000	APBD		2 OPD	59.750.000
	Kegiatan Reviu RKPD	Perentae Kesesuaian RKPD setelah direviu			Kab. TUBABA	100%	17.375.000	APBD		1	25.000.000
	Kegiatan Reviu Penyerapan Anggaran	Perentae Kesesuaian Laporan Penyerapan Anggaran setelah direviu			Kab. TUBABA	80%	49.400.000	APBD		0,8	58.600.000
	Kegiatan Reviu Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa	Perentae Kesesuaian Laporan Penyerapan Pengadaan Barang dan Jaa setelah direviu			Kab. TUBABA	0,8	37.050.000	APBD		0,8	48.200.000
	Kegiatan Reviu DAK	Jumlah DAK yang di Reviu			Kab. TUBABA	6 Keg	50.150.000	APBD		6 Keg	66.200.000
	Kegiatan Monitoring Dana BOS	Jumlah Monitoring yang dilakukan			Kab. TUBABA	2 Keg.	49.400.000	APBD		2 Keg.	72.000.000
	Pendampingan dan Konsultasi	Jumlah OPD yang didampingi dan berkonsultasi ke Inspektorat			Kab. TUBABA	25 Opd	24.700.000	APBD		25 Opd	35.000.000
	Kegiatan Telaah Sejawat	Jumlah Laporan Hasil Telaah Sejawat			Kab. TUBABA	2 Laporan	11.200.000	APBD		2 Laporan	15.000.000
	Kegiatan Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi			Kab. TUBABA	1 Laporan	40.000.000	APBD		1 Laporan	45.000.000
	Kegiatan Pemeriksaan serempak	Jumlah OPD yang tutup buku akhir tahun tepat waktu			Kab. TUBABA	25 OPD	33.150.000	APBD		25 OPD	35.000.000
	Kegiatan Probity Audit	Jumlah Kegiatan yang di lakukan Probity Audit			Kab. TUBABA	5 Keg	38.637.500	APBD		5 Keg	38.700.000
	Kegiatan Saber Pungli	Persentase OPD yang bebas dari pungli			Kab. TUBABA	-	-	APBD		-	
	Kegiatan Survey Penegakan Intergritas dan Penanganan Whistle Blower System	Jumlah OPD yang dilakukan Survey WBS			Kab. TUBABA	2 OPD	180.000.000	APBD		2 OPD	185.000.000
JUMLAH							**3.000.000.000**				**3.617.450.000**

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml	Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					**2.122.165.000**				**2.306.881.500**
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	Kab.TUBABA	12		1.721.165.000	APBD		12	1.893.281.500
	Penyediaan Peralatan dan Perkantoran Perkantoran		Kab.TUBABA			66.000.000				72.600.000
	Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Dokumen LKPJ				125.000.000	APBD			137.500.000
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Akhir Tahun	Kab.TUBABA	1	dok	25.000.000	APBD		1 dok	27.500.000
	penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Laporan Keuangan semesteran	Kab.TUBABA	1	dok	25.000.000	APBD		1 dok	27.500.000
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) SKPD	Laporan LPPD	Kab.TUBABA	1	dok	25.000.000	APBD		1 dok	27.500.000
	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Laporan Lakip	Kab.TUBABA	1	dok	25.000.000	APBD		1 dok	27.500.000
	Fasilitasi Penyelenggaran Pameran Daerah	Terselenggaranya promosi pembangunan Daerah Kab.Tubaba	Kab.TUBABA	100	%	85.000.000	APBD		100%	93.500.000
	Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan		Kab.TUBABA			25.000.000				27.500.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					**292.000.000**				**27.500.000**
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Kab.TUBABA	1	Unit	25.000.000	APBD		1 unit	27.500.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Kab.TUBABA			242.000.000				266.200.000
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Kab.TUBABA			25.000.000				27.500.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					**75.000.000**				**82.500.000**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Kab.TUBABA			75.000.000	APBD			82.500.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					**75.000.000**				**82.500.000**
	Pendidikan dan Pelatihan Formal					75.000.000	APBD			82.500.000

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Jml	Sat					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh					**370.100.000**				**407.110.000**
				Penyusunan Perencanaan Kawasan Perkotaan					185.100.000	APBD			203.610.000
				Pendamping Kerjasama Dengan Dunia Usaha					60.000.000	APBD			66.000.000
				kajian Terhadap Implementasi Kebijakan dan Potensi dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif					125.000.000	APBD			137.500.000
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah					**3.891.996.000**				**6.591.195.600**
				Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terlaksananya Musrenbang RPJMD	Kab.TUBABA	Usulan Kecamatan,Usulan APPD Prop,Usulan SKPD		250.000.000	APBD		Usulan Kecamatan,Usulan APPD Prop,Usulan SKPD	275.000.000
				Penyusunan RKPD	Tersusunnya RKPD sesuai dengan tahapan	Kab.TUBABA	Dokumen RKPD (1 dok)		150.000.000	APBD		Dokumen RKPD (1 dok)	165.000.000
				Penyelenggara Musrenbang RPJMD	Terlaksananya Musrenbang RPJMD	Kab.TUBABA			150.000.000	APBD			165.000.000
				Penyusunan Perubahan RPJMD	Tersusunnya Perubahan RPJMD sesuai dengan tahapan	Kab.TUBABA	Dokumen perubahan RPJMD		300.000.000	APBD		Dokumen perubahan RPJMD	330.000.000
				Penyusunan Renja dan RKA SKPD	Tersusunnya Renja dan RKA SKPD	Kab.TUBABA	Dokumen Renja dan RKA SKPD		15.000.000	APBD		Dokumen Renja dan RKA SKPD	16.500.000
				.-Evaluasi RKPD	Tingkat Kesesuaian dan RPJMD	Kab.TUBABA	12 BULAN		75.000.000	APBD		12 BULAN	82.500.000
				Penyusunan KUA PPAS	Tersusunnya Dokumen KUA - PPAS	Kab.TUBABA	Dokumen KUA PPAS (2 dok)		100.000.000	APBD		Dokumen KUA PPAS (2 dok)	110.000.000

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Jml	Sat					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Penyusunan KUPA PPAS-P	Tersusunnya Dokumen KUPA-PPAS-P	Kab.TUBABA	Dokumen KUPA PPASP (2 dok)		100.000.000	APBD		Dokumen KUPA PPAS-P	110.000.000
				Penyusunan RKPD-P	Tersusunnya buku RKPD-P	Kab.TUBABA	Dokumen RKPD - P (1 dok)		100.000.000	APBD		Dokumen RKPD - P (1dok)	110.000.000
				Publikasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Program perenc yang telah di laksanakan melalui media massa	Kab.TUBABA	Dokumen Publikasi Perencanaan Daerah		200.000.000	APBD		Dokumen Publikasi Perencanaan Daerah	220.000.000
				Koordinasi Perencanaan Menggunakan E-Planing	Penggunaan Aplikasi	Kab.TUBABA			200.000.000	APBD			220.000.000
				Penyusunan Indikator Kinerja Utama	Tersusunnya Indikator Kinerja Utama	Kab.TUBABA			75.000.000	APBD			82.500.000
				Koordinasi dan Pendamping Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Kab.Tubaba	Kesesuaian renja dan RKPD,Renstra,RPJMD,Serta dokumen perencanaan lainnya	Kab.TUBABA	100	%	150.000.000	APBD		100%	165.000.000
				Laporan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten TBB	Laporan LP2KD	Kab.TUBABA	100	%	150.000.000	APBD		100%	165.000.000
				Fasilitasi Aksi Daerah	Laporan RAD	Kab.TUBABA	1	dok	100.000.000	APBD		1 dok	110.000.000
				Koordinasi dan Pendampingan Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Kesesuaian renja dan RKPD, Renstra , RPJM, serta dokumen Perencanaan lainnya	Kab.TUBABA	1	thn	175.000.000	APBD		100%	192.500.000
				Koordinasi dan Pendampingan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Kesesuaian renja dan RKPD, Renstra , RPJM, serta dokumen Perencanaan lainnya	Kab.TUBABA	100	%	150.000.000	APBD		100%	165.000.000
				Pendampingan Kegiatan Percepatan Sanitasi	Terlaksananya Pendampingan Percepatan Sanitasi	Kab.TUBABA	1	thn	150.000.000	APBD		100%	165.000.000
				Monitoring, Evaluasi program/kegiatan pembangunan	Kesesuaian renja dan RKPD, Renstra , RPJM, serta dokumen Perencanaan lainnya	Kab.TUBABA			150.000.000	APBD			165.000.000
				Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana TP/UB dan DAK	Persentase perencanaan dan laporan DAK, TP/UB	Kab.TUBABA			75.000.000	APBD			82.500.000

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Jml	Sat					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Pendampingan Kerjasama dengan dunia usaha	Fasilitasi Pelaksanaan CSR	Kab.TUBABA	10	perusahaan	50.000.000	APBD			55.000.000
				Pembuatan Grand Design Kependudukan Kab. Tubaba	Dokumen Kependudukan	Kab.TUBABA			300.000.000	APBD			330.000.000
				Pembuatan Video Profil Pembangunan dan Investasi		Kab.TUBABA			70.000.000				77.000.000
				Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (S'DGES)	Kesesuaian Dokumen S'DGES dengan Dokumen Perencanaan	Kab.TUBABA			90.000.000	APBD			99.000.000
				Penyusunan/Updeting Data sistem Jaringan Berbabasi GIS					125.000.000				137.500.000
				Pembinaan Kabupaten Kota Sehat Kabupaten Tulang Bawang Barat					109.160.000				120.076.000
				Penyusunan Profil OPD Koordinasi Sosial Budaya					57.836.000				63.619.600
				Penyusunan neraca sumber daya alam	Tersusunnya Neraca Hutan,Lahan air Mineral	Kab.TUBABA	1	dok	125.000.000	APBD		1 dok	137.500.000
				Kajian Lingkungan hidup Stratgis (KLHS)	Tersusunnya KLHS	Kab.TUBABA			150.000.000	APBD			165.000.000
				Pengembangan Data /Informasi dan Statistik Daerah					**1.675.000.000**				**1.842.500.000**
				Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Kab.TUBABA	1	dok	75.000.000	APBD			82.500.000
				Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kab. Tulang Bawang Barat	Persentase data pada aplikasi SIPD		100	%	200.000.000	APBD			220.000.000
				Penyusunan Data Inflasi daerah	Jumlah Buku tentang gambaran inflasi daearah	Kab.TUBABA	1	dok	150.000.000	APBD		12	165.000.000
				Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat					150.000.000	APBD			165.000.000
				Road Map pengembangan kadaulatan pangan	jumlah koordinasi pembangunan dalam mendukung kedaulatan pangan dan data base sektor pertanian	Kab.TUBABA	100	%	150.000.000	APBD		100%	165.000.000

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Jml	Sat					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Penyusunan Data Spasial Infrastruktur					150.000.000	APBD			165.000.000
				Perencanaan model infrastruktur hijau	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Model Infrastruktur	Kab.TUBABA	1	dok	200.000.000	APBD		1 dok	220.000.000
				Penyusunan Pusat Data Base					600.000.000	APBD			660.000.000
JUMLAH									**8.501.261.000**				**10.933.077.100**

OPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Jml	Sat					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					**2.009.310.000**				**2.009.310.000**
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Laporan Berkala	Tersusunya Dokumen Perencanaan Dan Laporan Berkala	BPKAD-TUBABA	1	Keg	50.000.000				50.000.000
				Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	BPKAD-TUBABA	1	Keg	1.534.310.000				1.534.310.000
				Penyelenggaraan Pameran Daerah	Terselenggaranya Pameran Daerah	BPKAD-TUBABA	1	Keg	50.000.000				50.000.000
				Peningkatan Kapasitas Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Pengembangan Sumber Daya Aparatur	BPKAD-TUBABA	1	Keg	50.000.000				50.000.000
				Penyelenggaraan Tata Usaha Keuangan	Terselenggaranya Tata Usaha Keuangan	BPKAD-TUBABA	1	Keg	50.000.000				50.000.000
				Penatausahaan Barang Persediaan dan Aset Daerah	Terselenggranya Penatausahaan Barang Persediaan dan Aset Daerah	BPKAD-TUBABA	1	Keg	50.000.000				50.000.000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD-TUBABA	1	Keg	50.000.000				50.000.000
				Penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Kerangka Acuan Kerja	Tersusunnya Standar Operasional Prosedur dan Kerangka Acuan Kerja	BPKAD-TUBABA	1	Keg	175.000.000				175.000.000
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					**627.690.000**				**627.690.000**
				Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	Prosentase Tersedianya Gedung Knator	BPKAD TUBABA	100	%	268.690.000	APBD		100	268.690.000

				Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	BPKAD TUBABA	100	%	167.000.000	APBD		100	167.000.000
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	BPKAD TUBABA	100	%	192.000.000	APBD		100	192.000.000
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur					**100.000.000**				**100.000.000**
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	BPKAD TUBABA	100	%	100.000.000	APBD		100	100.000.000
				Program Peningkatan Kapasitas Pengembangan Sumber Daya Aparatur					100.000.000				**100.000.000**
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Formal	BPKAD TUBABA	1	Keg	100.000.000	APBD		100	100.000.000
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					**4.152.327.000**				**4.152.327.000**
				Penyusunan Laporan-Laporan Keuangan(LRA/LO)Secara Periodik		BPKAD TUBABA	51	OPD	45.025.000	APBD		51	45.025.000
				Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		BPKAD TUBABA	1	Keg	67.947.000	APBD		1	67.947.000
				Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah(RAPERDA)Tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD		BPKAD TUBABA	1	Keg	54.038.000	APBD		1	54.038.000
				Penyusunan Daptar Gaji		BPKAD TUBABA	1	Tahun	164.445.000	APBD		1	164.445.000
				Pengendalian Surat PerintahPencairan Dana(SP2D)		BPKAD TUBABA	1	Tahun	214.924.000	APBD		1	214.924.000
				Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah		BPKAD TUBABA	1	Tahun	163.850.000	APBD		1	163.850.000
				Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah		BPKAD TUBABA	1	Tahun	163.340.000	APBD		1	163.340.000

				Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA)dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran(DPPA)		BPKAD TUBABA	1	Tahun	35.000.000	APBD		1	35.000.000
				Pendampingan Pelaporan Dana Perimbangan,Pendapatan Lainnya Dan Pinjaman Daerah		BPKAD TUBABA	12	Bulan	297.560.000	APBD		12	297.560.000
				Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah TA 2019		BPKAD TUBABA	51	0p	50.000.000	APBD		51	50.000.000
				Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah		BPKAD TUBABA	1	Keg	30.000.000	APBD		1	30.000.000
				Penyusunan Paket Regulasi Tentang Pengolalaan Keuangan Daerah		BPKAD TUBABA	3	Perbup	20.000.000	APBD		3	20.000.000
				Sosialisasi Permendagri Tentang Pedoman Penyusunan APBD		BPKAD TUBABA	1	Keg	15.000.000	APBD		1	15.000.000
				Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah		BPKAD TUBABA	1	Keg	283.600.000	APBD		1	283.600.000
				Pendukung Operasional Penyelenggaraan Belanja Hibah,Bantuan Sosial,Bantuan Keuangan dan Pembiayaan		BPKAD TUBABA	1	Tahun	138.000.000	APBD		1	138.000.000
				Penyusunan Neraca Awal 2018 Atas LKPD 2017		BPKAD TUBABA	1	Tahun	64.250.000	APBD		1	64.250.000
				Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah		BPKAD TUBABA	1	Keg	89.403.000	APBD		1	89.403.000
				Pengawasan dan Pengamanan Aset Daerah		BPKAD TUBABA	1	Keg	125.000.000	APBD		1	125.000.000
				Penyusunan Neraca Aset		BPKAD TUBABA	1	Keg	133.200.000	APBD		1	133.200.000
				Pembinaan dan Penertiban Tata Kelola Barang Milik Daerah		BPKAD TUBABA	1	Tahun	139.910.000	APBD		1	139.910.000
				Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD		BPKAD TUBABA	1	Keg	44.700.000	APBD		1	44.700.000
				Penyusunan Standar Satuan Harga		BPKAD TUBABA	1	Keg	60.290.000	APBD		1	60.290.000
				Penyusunan Analisis Standar Biaya		BPKAD TUBABA	1	Keg	135.000.000	APBD		1	135.000.000
				Penyusunan Laporan dan Rekonsialiasi Data Kas Non Anggaran		BPKAD TUBABA	1	Keg	57.920.000	APBD		1	57.920.000
				Rekonsiliasi dan Verifikasi Data Belanja Modal Perangkat Daerah Yang Menjadi Aset Daerah		BPKAD TUBABA	1	Tahun	125.100.000	APBD		1	125.100.000

				Inventarisasi Aset		BPKAD TUBABA	1	Tahun	200.200.000	APBD		1	200.200.000
				Penyusunan Laporan dan Rekonsialiasi Data Penerima TPG,Tamsil Guru,Sertifikasi Guru		BPKAD TUBABA	1	Tahun	57.475.000	APBD		1	57.475.000
				Sosiallisasi Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Kerja		BPKAD TUBABA	1	Keg	41.650.000	APBD		1	41.650.000
				Bimbingan Teknis Bagi Bendahara Pengeluaran Tentang Pelaporan e SPT Masa		BPKAD TUBABA	1	Keg	35.800.000	APBD		1	35.800.000
				Konsilidasi Laporan Keuangan Tiyuh dan Dana BOS Pada Aplikasi Simda Keuangan Untuk Menjadi Bagian Dari LKPD		BPKAD TUBABA	1	Keg	48.880.000	APBD		1	48.880.000
				Rekonsiliasi Dana JKN Pada Aplikasi Simda Keuangan		BPKAD TUBABA	1	Keg	32.220.000	APBD		1	32.220.000
				Integrasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasisi Online		BPKAD TUBABA	1	Keg	66.100.000	APBD		1	66.100.000
				Bimtek Aplikasi Simda Versi 2,7		BPKAD TUBABA	1	Keg	35.000.000	APBD		1	35.000.000
				Sosialisasi Pengelolaan DAK Fisik Dan Non Fisik		BPKAD TUBABA	1	Keg	17.500.000	APBD		1	17.500.000
				Pengendalian Pelaksanaan Anggaran		BPKAD TUBABA	1	Keg	156.000.000	APBD		1	156.000.000
				Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah		BPKAD TUBABA	1	Perbup	48.500.000	APBD		1	48.500.000
				Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah		BPKAD TUBABA	1	Keg	34.500.000	APBD		1	34.500.000
				Verifikasi dan Penginputan Data Belanja Modal Menjadi Aset Daerah		BPKAD TUBABA	1	Keg	141.300.000	APBD		1	141.300.000
				Konsilidasi dan Rekonsiliasi Dana Bos Pada Aplikasi Simda Keuangan		BPKAD TUBABA	1	Keg	39.700.000	APBD		1	39.700.000
				Penilaian dan Penghapusan Barang Milik Daerah		BPKAD TUBABA	1	Keg	200.000.000	APBD		1	200.000.000
				Pengelolaan Administrasi Gaji dan Pajak		BPKAD TUBABA	1	Keg	250.000.000	APBD		1	250.000.000
				Penyusunan Raperda Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah		BPKAD TUBABA	1	Keg	30.000.000	APBD		1	30.000.000
JUMLAH									**6.989.327.000**				**6.989.327.000**

OPD : BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD)

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Jml	Sat					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
				Program Pelayanan Jasa Adminstrasi Perkantoran									-
				Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		TBB	100	%	569.900.000	APBD		100	626.890.000
				Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)		TBB	100	%	7.100.000	APBD		100	7.810.000
				Peyusunan Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah		TBB	100	%	6.600.000	APBD		100	7.260.000
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									-
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		TBB	100	%	96.000.000	APBD		100	105.600.000
				Pememliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		TBB	100	%	77.100.000	APBD		100	84.810.000
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah									-
				Pemungutan Pajak Daerah		TBB	100	%	137.086.000	APBD		100	150.794.600
				Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah		TBB	100	%	88.272.000	APBD		100	97.099.200
				Penyusunan Perturan Bupati Tentang BPHTB		TBB	100	%	15.000.000	APBD		100	16.500.000
				Monitoring dan Evaluasi Pembayaran Pajak dan Restribusi Daerah		TBB	100	%	109.901.000	APBD		100	120.891.100
				Pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB Kab.TBB		TBB	100	%	476.728.000	APBD		100	524.400.800
				Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB		TBB	100	%	88.013.000	APBD		100	96.814.300
				Pembukuan dan Pelaporan Penerimaan Pajak Daerah		TBB	100	%	205.600.000	APBD		100	226.160.000

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Jml	Sat					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
				Penyebarluasan Informasi Pajak dan Restribusi Daerah Melalui Promosi Daerah		TBB	100	%	33.050.000	APBD		100	36.355.000
				Optimalisasi Penerimaan PAD		TBB	100	%	300.000.000	APBD		100	330.000.000
				Pembuatan Web Service Berbasis Representasional StateTransfer Javascript Objet Nationn		TBB	100	%	149.650.000	APBD		100	164.615.000
JUMLAH									**2.360.000.000**				**2.596.000.000**

OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml	Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					**603.667.000**				**664.033.700**
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		TBB	12	bln	541.133.000	APBD		12	595.246.300
	Fasilitasi Penyenggaraan Pameran Daerah		TBB	2	keg	15.500.000	APBD		2	17.050.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		TBB	1	keg	17.700.000	APBD		1	19.470.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkala		TBB	5	dok	29.334.000	APBD		5	32.267.400
	Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur					**289.000.000**				**317.900.000**
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		TBB	1	ls	96.000.000	APBD		1	105.600.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan		TBB	12	bln	63.000.000	APBD		12	69.300.000
	Pengadaan Gedung Kantor		TBB	12	bln	30.000.000	APBD		12	33.000.000
	Pengadaan Sistem Aplikasi Penilaian Kinerja Secara Online		TBB	1	keg	100.000.000	APBD		1	110.000.000
	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS					**132.778.000**				**146.055.800**
	Pengelolaan Pegawai yang akan Pensiun		TBB	12	bln	78.160.000	APBD		12	85.976.000
	Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Penyusunan Kebutuhan PNS dan Evaluasi Tenaga Kontrak		TBB	12	bln	54.618.000	APBD		12	60.079.800
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					**3.945.152.000**				**4.339.667.200**
	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pejabat		TBB	1	keg	1.500.000.000	APBD		1	1.650.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi PNS		TBB	1	keg	2.445.152.000	APBD		1	2.689.667.200

OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Jml	Sat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	.(10)
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					**3.903.409.000**				**4.293.749.900**
	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS		TBB	12	bln	122.850.000	APBD		12	135.135.000
	Pengurusan Kenaikan Pangkat, Diklat dan Allah Tugas ASN		TBB			2.999.664.000				3.299.630.400
	Pengurusan Pensiun, Evaluasi dan Seleksi JPT dan Pemuktakhiran Data ASN		TBB			310.000.000				341.000.000
	Pembinaan Jabatan		TBB	3	keg	39.395.000	APBD		3	43.334.500
	Penenrimaan Calon Mahasiswa STTD		TBB	9	bln	31.500.000	APBD		9	34.650.000
	Pengelolaan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala		TBB	2	keg	50.000.000	APBD		2	55.000.000
	Seleksi dan Evaluasi Kinerja ASN		TBB	12	bln	350.000.000	APBD		12	385.000.000
JUMLAH						**8.874.006.000**				**9.761.406.600**

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

6.1. Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat *impact* yang diukur setiap tahunnya.

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat/warga Kabupaten Tulang Bawang Barat terkait pembangunan manusia, ketertiban dan ketentraman, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja. Aspek pelayanan umum mengukur kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain pengarustamaan gender, kualitas lingkungan hidup dan persampahan, perumahan dan kawasan permukiman, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (sustainable growth) didukung oleh pertumbuhan volume komoditi keluar masuk Kabupaten Tulang Bawang Barat,

serta masyarakat yang menerapkan budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan. Indikator kinerja daerah sebagai indikator kinerja utama (key performance indicators) berdasarkan uraian tersebut di atas sebagai alat ukur menilai kinerja organisasi, maka indikator kinerja daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. menggunakan indikator pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. memfokuskan pada hal-hal utama, kearifan lokal yang penting dan sinergi dengan pembangunan antar jenjang pemerintahan;
4. terkait dengan penanggung jawab pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci untuk target indikator kinerja daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2019 - 2020 dapat dilihat pada table 6.1. dibawah ini :

Tabel 6.1
Target Indikator Kinerja Daerah Tahun 2019-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian				Target	
		2014	2015	2016	2017	2019	2020
A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat							
A.1.	Pertumbuhan PDRB /Rata – Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,50	5,35	5,27	5,64	5,70	5,75
A.2.	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	62,46	63,01	63,77	64,58	66,07	66,81
A.3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,13	2,61	4,43	1,86	2,0	1,2
A.4.	Indesk Gini	N/A	0,32	0,28	0,26	0,29	0,25
B. Aspek Daya Saing Daerah							
B.1.	Angka Konflik / Kriminalitas	1,64	1,28	4,27		3,07	2,48
B.2.	Nilai Tukar Petani (NTP)	115,62	121,35	130,32	136,06	105,00	106,67
C. Aspek Pelayanan Umum							
C.1.	IPG (Indeks Pemberdayaan Gender)	NA	*NA*	NA	NA	61,61	62,39
C.2.	Nilai SAKIP	C	C	C	C	CC	B
C.3.	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	NA	*NA*	NA	NA	70	75
C.4.	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	NA	NA	NA	NA	73	75

C.5.	Nilai LPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
C.6.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
C.7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	NA	*NA*	NA	NA	72	73
C.8.	Persentase Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap	NA	*NA*	NA	NA	40	45

Sumber : RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat 2017 - 2022

6.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah (PD). Tujuan dalam penetapan IKU Kepala PD adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah (outcome). Pencapaian indikator sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program.

Adapun untuk target Indikator Kinerja Utama (IKU) secara rinci terdapat dalam Tabel 6.2.

Tabel 6.2.
Target Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kabupaten Tulang Bawang Barat 2019 - 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target		Urusan	OPD Penanggung Jawab
			2019	2020		
1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat;	Harapan lama sekolah	12,15	12,23	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Angka rata – rata lama sekolah	6,87	6,89		
2	Menigkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup (AHH)	69,61	69,74	Kesehatan	Dinas Kesehatan
3	Penurunan pengangguran	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) (%)	7,50	6,67	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan serta terpenuhinya hak – hak anak	IPG	61,61	62,39	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Nilai skor kabupaten layak anak	500	550		
5	Meningkatnya PMKS yang mandiri	Persentase penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) yang menjadi mandiri	13,85	4,23	Sosial	Dinas Sosial

6	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Jumlah pemuda berprestasi	70	80	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
7	Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi	4	5		
8	Meningaktnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan	PDRB sektor pertanian	34,91	34,47	Pertanian	Dinas Pertanian
		PDRB sektor perikanan	3,20	3,25	Perikanan	Dinas Perikanan
		Nilai tukar petani (NTP)	105,00	106,67	Pertanian	Dinas Pertanian
9	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan	PDRB sektor industri pengolahan	29,35	29,65	Perindustrian	Dinas Koperindag
10	Meningkatnya investasi	Nilai investasi	151.577.000.000	166.735.580.000	Invetasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
11	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	PDRB sektor perdagangan	11,17	11,44	Perdagangan	Dinas Koperindag
12	Meningkatnya Kontribusi dan daya saing koperasi dan	Jumlah aset koperasi (juta)	17.350	18.600	Koperasi	Dinas Koperindag

	UMKM	Persentase kenaikan usaha mikro menjadi usaha kecil menengah	20	22	Perindustrian	Dinas Koperindag
13	Meningkatnya sektor pariwisata	Pendapatan sektor pariwisata	85 Juta	102 Juta	Pariwisata	Dinas Pemuda OLahraga dan Pariwisata
		Jumlah kunjungan wisatawan domistik	3000	4000		
14	Meningkatnya ketersediaan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	Persentase panjang jalan dengan konsisi mantap	40	45	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase jembatan dalam kondisi mantap	40	45		
15	Meningkatnya ketersediaan jaringan irigasi dalam kondisi mantap dan berfungsi	Persentase jaringan irigasi yang baik	35	37	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana air minum	Persentase tiyuh yang dialiri air bersih	75	80		
17	Terwujudnya daya dukung infrastruktur komunikasi dan informasi yang handal dan merata	Persentase tiyuh yang tersambung jaringan telekomunikasi	75	85	Komunikasi dan Informatika	Dinas Kumunikasi dan Informasi

18	Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	73	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
19	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan Transparan	Indeks RB	70	75	Administrasi Pemerintah	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
		Nilai SAKIP	CC	B		Sekretariat Daerah Bagian Organisasi & BAPPEDA
		IKM	73	75		BAPPEDA
		Sekor LPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan
		Opini BPK	WTP	WTP		BPKAD
20	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan nyaman	Persentase tiyuh rawan kriminal	4,15	4,10	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Dinas Satuan Pol PP dan Badang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
		Indeks desa membangun	0,595	0,600	Pemberdayaan masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh
21	Meningkatnya pelestarian warisan budaya	Jumlah aset budaya yang dilestarikan	5	5	Kebudayaan	Dinas Pemuda OLahraga dan Pariwisata

BAB VII
PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 merupakan tahun Ke-Tiga perode RPJMD 2017-2022, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif.

Sesuai amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa RKPD Kabupaten / Kota merupakan pedoman untuk penyusunan rancangan APBD Kabupaten / Kota. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa RKPD tahun 2020 Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadi pedoman dalam penyusunan RABPD tahun anggaran 2020 Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat seyogyanya dapat memperhatikan dan menjaga konsistensi antara RKPD Tahun 2020 dengan alokasi anggaran dalam RAPBD Tahun Anggaran 2020 dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat serta demi tercapainya tujuan bernegara.

Selajutnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini, disusun sebagai konsekuensi dari pemberlakuan peraturan dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, untuk implementasinya diperlukan koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan partisipasi masyarakat serta seluruh pelaku pembangunan (stake holder) melalui Forum OPD dan FGD serta musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan, sehingga dokumen RKPD terbentuk.

Dokumen RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2020 merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat maupun masyarakat dalam merumuskan prioritas pembangunan dan sinergi dalam pelaksanaan program

pembangunan tahun 2020. Untuk itu diperlukan langkah-langkah, yaitu:

1. pemerintah daerah bersama masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk mendukung dan berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan yang ingin dicapai dengan sebaik-baiknya;
2. OPD Kabupaten Tulang Bawang Barat berkewajiban menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD yang menjabarkan prioritas pembangunan, dengan memperhatikan hal berikut:
    a) dokumen RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2020 menjadi pedoman bagi setiap OPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD tahun 2020, dalam rangka pencapaian indikator kinerja OPD yang akan dicapai;
    b) dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya, utamanya sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum (KUA) APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
    c) renja-OPD yang disusun dalam rangka pencapaian indikator kinerja yang telah disepakati bersama dan pada akhirnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA-OPD);

Disamping itu, usulan kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga selain pembiayaannya diusulkan ke APBD Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, juga diusulkan ke APBD Propinsi Lampung dan ke Pemerintah Pusat melalui APBN.

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat selain dilaksanakan jajaran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat juga ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita – cita masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat

sesuai visi dan misi yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat terwujud sesuai waktu yang telah ditentukan.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, Badan Perencanaan Kabupaten Tulang Bawang Barat berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran dan sinergisitas RKPD tahun 2020 ke dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja–OPD) dan Kebijakan Umum APBD 2020 serta Prioritas dan Pagu Indikatif OPD 2020 .

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
NIP. 19770409 200212 1 008